

Edisi November 2021



OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

OUTLOOK

PEREKONOMIAN

INDONESIA

“Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan”

Edisi November 2021

OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA

PEMULIHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Pengarah

Airlangga Hartarto
Susiwijono
Iskandar Simorangkir
Musdhalifah Machmud
Montty Girianna
Mohammad Rudy Salahuddin
Wahyu Utomo
Edi Prio Pambudi

Penanggung Jawab

Hari Kristijo

Editor

Ferry Irawan
Thasya Pauline

Tim Penulis

Andiga Kusuma Nur Ichsan
Anggun Nastiti Pramusinta
Fadiyah Khairina
Imam Wahyudi
Kusmawati Limbongan
Ni Made Krina Marsela
Prasetyaningtyas Ekarini
Suhindarto
Sheiffi Puspapertiwi
Wina Andari
Yulya Aryani

Desain Grafis

Nauval Fais

ISBN: 978-623-94584-8-5

Penerbit:

Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Redaksi:

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, 10710;
Telp: (021) 352 1835, Fax: (021) 345 682;
bioperencanaan@ekon.go.id

Edisi November 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit



“Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan”



Tahun 2021 dipenuhi peristiwa yang menjadi momentum menuju pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Lonjakan kasus pada pertengahan tahun dapat diatasi dengan baik sehingga kasus Covid-19 cukup terkendali dan diikuti dengan pemulihan perekonomian di berbagai sektor yang mendorong penciptaan lapangan usaha. Peluang-peluang pemulihan ekonomi semakin meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi global dan meningkatnya literasi digital di Indonesia. Pemerintah akan memanfaatkan momentum ini secara optimal untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi kesehatan, pemerintah terus mendorong upaya penanganan COVID-19 melalui kebijakan akselerasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terukur, dan peningkatan pelaksanaan 3T. Dari sisi ekonomi Pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan lebih adaptif.

Sejalan dengan peningkatan kinerja berbagai indikator perekonomian pada Triwulan III-2021, **pemerintah meyakini peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berlanjut di tahun 2022 pada 5,2% (yoy)**. Optimisme ini didukung dengan capaian pelaksanaan vaksinasi yang semakin baik, efektivitas kebijakan PPKM, peningkatan mobilitas domestik dan internasional, peningkatan aktivitas industri serta penguatan ekspor komoditas dan produk manufaktur. Pemerintah terus mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor melalui berbagai kebijakan. Selain itu, pemerintah mendorong kebijakan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi berkelanjutan melalui program vaksinasi, diversifikasi ekonomi, dan reformasi struktural.

Berbagai kebijakan dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan, tentunya memerlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun *Outlook Perekonomian Indonesia* sebagai salah satu instrumen untuk memonitor pelaksanaan kebijakan dalam rangka mendukung agenda pemulihan ekonomi yang telah ditargetkan. Seiring dengan hal tersebut, kami berharap Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia beserta lembaga perbankan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi dan Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, dapat **bersinergi dalam mewujudkan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan** sesuai dengan perannya masing-masing.

Semoga buku "*Outlook Perekonomian Indonesia*" Edisi November 2021 ini, memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai gambaran kondisi perekonomian saat ini dan arah kebijakan ekonomi ke depan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya *Outlook Perekonomian Indonesia* ini secara berkala.

AIRLANGGA HARTARTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional telah membawa Indonesia menuju pemulihan ekonomi dan kesehatan. Pelaksanaan program vaksinasi dan kebijakan PPKM berjenjang secara efektif telah meningkatkan optimisme terhadap *outlook* perekonomian Indonesia di tahun 2022. Kemenko Perekonomian memproyeksikan PDB Indonesia akan tumbuh pada rentang 3,7%-4,0% pada tahun 2021. Optimisme pemulihan ekonomi tersebut juga diekspektasikan berlanjut pada tahun 2022 yang diproyeksikan pada 5,2% (yoy). Optimisme ini terefleksi dari beberapa indikator ekonomi yang membaik di antaranya *google mobility index*, PMI Manufaktur, kegiatan dunia usaha, serta indeks keyakinan konsumen.

Buku *Outlook* ini mengambil tema “Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan”. Tema ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Untuk mendukung agenda pemulihan tersebut, Kemenko Perekonomian telah menyiapkan serangkaian program strategis untuk mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Selain program-program strategis, Kemenko Perekonomian juga mendorong kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada pemulihan jangka menengah-panjang. Kebijakan tersebut adalah Program Vaksinasi, Program Diversifikasi Ekonomi dan Reformasi Struktural melalui Implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Diversifikasi Ekonomi bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh. Sementara reformasi struktural bertujuan untuk meningkatkan daya saing sehingga dapat meningkatkan investasi yang berkelanjutan.

Outlook Perekonomian disusun dengan tujuan memberikan gambaran kondisi dan target perekonomian tahun 2022. Buku ini dibagi menjadi enam pembahasan secara komprehensif mulai dari perkembangan ekonomi global dengan pembahasan pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pasar komoditas, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan pasar finansial. Bagian kedua merupakan pembahasan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi moneter, kondisi fiskal, kondisi neraca pembayaran, dan perkembangan investasi. Bagian ketiga membahas mengenai tantangan dan peluang perekonomian dari sisi eksternal dan internal. Kemudian, bagian keempat pembahasan berfokus pada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dari sisi pengeluaran dan lapangan usaha beserta kebijakan pendorongnya. Pada bagian kelima, dipaparkan berbagai kebijakan Kemenko Perekonomian yang dilaksanakan bersama Kementerian/Lembaga di bawah koordinasinya untuk mencapai agenda pemulihan ekonomi. Selanjutnya pada bagian terakhir dijabarkan pembahasan mengenai sinergi menjaga pemulihan ekonomi berkelanjutan.

Kami harapkan buku *Outlook* Perekonomian Indonesia 2021 ini mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku *Outlook* Perekonomian Indonesia ini.

Susiwijono, S.E., M.E.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Pemulihan ekonomi global pada awal tahun 2021 masih berlanjut pada semester II-2021. Pemulihan tersebut diproyeksikan akan berlanjut pada tahun 2022 seiring dengan meningkatnya pelaksanaan vaksinasi global, meningkatnya kapasitas sistem layanan kesehatan, dan dibukanya aktivitas perekonomian di berbagai negara. Meskipun demikian tantangan munculnya varian baru COVID-19 masih membayangi dan berpotensi menahan laju pemulihan tersebut.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih kuat menjadi *upside risk* bagi *outlook* perekonomian 2021-2022. Penguatan ekonomi di kedua negara tersebut diekspektasikan akan diikuti dengan peningkatan permintaan ekspor komoditas maupun produk hasil industri dalam negeri. Selain itu, peningkatan mobilitas orang baik lokal maupun internasional juga akan menjadi pendorong pertumbuhan pada sektor jasa-jasa. Sementara itu, selain potensi munculnya varian-varian baru COVID-19, ketidakseimbangan akses setiap negara terhadap vaksin menjadi *downside risk* terhadap *outlook* pertumbuhan ke depan.

Keterbatasan akses terhadap vaksin dialami oleh kelompok negara berkembang. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah untuk membiayai pengadaan vaksin. WHO memperkirakan distribusi vaksin kepada kelompok negara berkembang akan berlangsung secara bertahap pada tahun 2021 hingga 2023.

Secara umum kondisi finansial global masih cukup akomodatif dengan berlanjutnya dukungan kebijakan moneter dari berbagai bank sentral. Selain itu dukungan stimulus fiskal di berbagai negara juga masih

berlanjut. *The America Rescue Plan Act* yang disahkan pada Maret 2021 dengan nilai US\$1,9 triliun telah menopang daya beli kelas menengah dan beberapa korporasi besar. Sementara itu, pemerintah Tiongkok juga masih melanjutkan dukungan kepada pelaku usaha dan inovasi di bidang teknologi. Namun penguatan ekonomi AS yang telah mendorong peningkatan inflasi dan suku bunga surat hutangnya diperkirakan akan direspons oleh The Fed dengan kebijakan *tapering*.

Berlanjutnya pemulihan ekonomi global dan menurunnya kasus aktif COVID-19 dalam negeri telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun pada bulan Juli dan Agustus pemerintah meningkatkan pembatasan mobilitas penduduk, namun perekonomian pada triwulan III-2021 masih tumbuh 1,55% (qtq). Di mana sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial, diikuti pertambangan dan penggalian, serta informasi dan komunikasi. Sementara pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen ekspor.

Selanjutnya di tahun 2021, Kemenko Perekonomian memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada rentang 3,7 hingga 4,0% (yoy). Angka proyeksi tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, perdagangan dan reparasi, serta pertambangan dan penggalian. Faktor pendorong pertumbuhan tersebut adalah peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan permintaan ekspor, penguatan harga komoditas, serta peningkatan pelaksanaan vaksinasi.

Indikator-indikator ekonomi Indonesia masih terjaga dan menunjukkan perbaikan. Tingkat



inflasi di bulan September tercatat sebesar 1,60%, masih berada pada level rendah dan stabil menuju target Pemerintah sebesar $3,0\% \pm 1,0\%$ di tahun 2021. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS secara rata-rata terapresiasi sebesar 0,15% (qtq) selama triwulan III-2021. Rupiah diproyeksikan menguat hingga akhir tahun 2021 dan akan stabil pada kisaran Rp14.300/US\$ di tahun 2022. Selain itu, IHSG juga menguat dan telah menyentuh nilai yang lebih tinggi dari nilai pra pandemi.

Membbaiknya kondisi perekonomian dalam masa pandemi tidak lepas dari respons aktif pemerintah. Dari sisi fiskal, Pemerintah melanjutkan prioritas penanganan COVID-19 dalam APBN 2021. Stimulus fiskal masih menjadi instrumen utama Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat kelompok rentan, serta pemulihan dunia usaha. Dari sisi moneter, Bank Indonesia masih melanjutkan kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung likuiditas.

Dengan dukungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang berkelanjutan, Kemenko Perekonomian memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tahun 2022 dapat kembali ke pertumbuhan pra-COVID, yaitu pada 5,2% (yoy). Kontributor utama pertumbuhan tersebut adalah sektor industri pengolahan, perdagangan dan reparasi, pertanian, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta sektor informasi dan komunikasi. Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah menjadi motor penggerak perekonomian terutama dalam menjaga Konsumsi RT, Pengeluaran Pemerintah serta Investasi.

Optimisme akan pemulihan ekonomi masih disertai berbagai tantangan. Salah satunya ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global. Pulihnya ekonomi negara maju mendorong pemerintah untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter. Potensi pelemahan nilai tukar menjadi tantangan bagi negara berkembang. Dari profil risiko investasi, negara berkembang dengan populasi besar memiliki risiko investasi lebih tinggi diukur dari persentase capaian vaksinasi terhadap total penduduk, yang relatif lebih rendah dibandingkan negara dengan populasi kecil. Sebagai dampak dari pemulihan ekonomi negara maju, harga energi akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan yang tidak diikuti dengan peningkatan pasokan energi.

Meskipun demikian peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pemulihan ekonomi juga cukup besar. Dari sisi eksternal, selain penguatan permintaan ekspor dan harga komoditas, presidensi G20 Indonesia yang dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyampaikan gagasan mengenai pemulihan yang berkelanjutan melalui kolaborasi antar negara anggota G20. Peluang dari sisi internal yaitu berbagai kemudahan yang diberikan kepada UMKM sebagai penopang perekonomian. Selain itu perkembangan digitalisasi yang cukup pesat di Indonesia juga merupakan peluang yang besar di mana Indonesia menduduki urutan kelima dengan jumlah startup terbanyak di dunia.

Dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kemenko Perekonomian telah menyusun kebijakan-kebijakan strategis Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional



(PC-PEN). Di bidang ekonomi makro dan keuangan, terdapat kebijakan: penempatan dana pada bank umum mitra disertai dukungan penjaminan dalam rangka pemulihan ekonomi; pinjaman PEN daerah; stimulus UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional; dan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19.

Di bidang pangan dan agribisnis, kebijakan strategis meliputi: stabilisasi harga pangan; pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor; kemitraan *closed loop* hortikultura; pengembangan usaha peternakan terintegrasi; program padat karya infrastruktur pertanian; dan peremajaan sawit rakyat (PSR).

Selanjutnya di bidang pengembangan usaha BUMN, riset dan inovasi, terdapat kebijakan: pelaksanaan dan percepatan vaksinasi COVID-19, pengembangan vaksin merah putih; pengembangan katalis merah putih untuk produksi bahan bakar hijau terutama untuk diesel nabati dan bioavtur; restrukturisasi BUMN; dan percepatan pelaksanaan program PEN pada BUMN.

Di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM, terdapat kebijakan strategis: pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi dan kartu prakerja. Kemudian untuk bidang perniagaan dan industri, terdapat kebijakan penataan ekosistem logistik nasional. Di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang, terdapat kebijakan strategis berupa: percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.

Terakhir di bidang kerja sama ekonomi internasional, Kemenko Perekonomian merumuskan kebijakan strategis berupa: *Travel Corridor Arrangement* (TCA) Indonesia; dukungan penanganan COVID-19 dalam forum ASEAN; dukungan penanganan

COVID-19 dalam Forum G20; percepatan negosiasi Indonesia – EU CEPA; peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (RI-PEA); dan penyelesaian sengketa dagang WTO DS477/478 (impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan).

Kemenko Perekonomian menyadari bahwa untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan kebijakan yang berorientasi jangka menengah-panjang. Oleh karena itu terdapat 3 kebijakan utama dalam rangka mewujudkan PEN berkelanjutan. Pertama, program vaksinasi untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan *herd immunity*. Dengan tercapainya *herd immunity* maka peningkatan mobilitas masyarakat tidak akan menekan pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi sebelumnya. Kedua, pemulihan daya beli dan usaha melalui program PEN.

Program PEN akan dilanjutkan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 321,2 T. Program PEN tahun 2022 akan difokuskan kembali pada klaster kesehatan dan perlindungan masyarakat untuk menjaga rem dan gas pemulihan ekonomi melalui penanganan pandemi dan menjaga daya beli masyarakat. Ketiga, diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan mendorong sektor lainnya yang berpotensi tumbuh. Keempat, peningkatan daya saing melalui reformasi struktural untuk mempermudah investasi prioritas dan investasi berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	i
Kata Pengantar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Gambar	x
Perkembangan Perekonomian Global	1
Pertumbuhan Ekonomi	2
Perdagangan	10
Pasar Komoditas	11
Kebijakan Moneter	12
Kebijakan Fiskal	13
Pasar Finansial	14
Topik Spesial: Indonesia Sebagai Presidensi G20 Tahun 2022	17
Perkembangan Perekonomian Indonesia	20
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	21
Inflasi	25
Kondisi Moneter	26
Kondisi Fiskal	29
Kondisi Neraca Pembayaran	30
Perkembangan Investasi	33
Topik Spesial: Percepatan Digitalisasi UMKM dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	35
Tantangan dan Peluang	38
Tantangan dan Peluang Eksternal	39
Tantangan dan Peluang Internal	41
Topik Spesial: Integrasi Kartu Prakerja-KUR: Mendorong Inovasi dan UMKM Naik Kelas	44
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021	47
Perekonomian Tahun 2021 Dari Sisi Pengeluaran	48
Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Lapangan Usaha	55
Topik Spesial: Holding BUMN Farmasi untuk Kemandirian	90
Program Strategis Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional	93
Topik Spesial: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Dan Karimun	113
Sinergi Menjaga Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan	116
Strategi Penanganan Covid-19 Sebagai Kunci Pemulihan Ekonomi di Indonesia	117
Sinergi Menjaga Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan	120
Pemulihan Ekonomi Nasional Semester II	122
Daftar Pustaka	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDB Global (% , yoy)	5
Tabel 2.1	Perkembangan BI7DRR	27
Tabel 4.1.	Pertumbuhan Perekonomian Berdasarkan Pengeluaran (dalam %)	48
Tabel 4.2.	Pertumbuhan Perekonomian Berdasarkan Lapangan Usaha (dalam %)	56
Tabel 5.1.	Capaian Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional	100
Tabel 5.2.	Realisasi Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Melalui Program Kartu Prakerja	105
Tabel 6.1	Belanja Penanganan COVID-19 dan PEN	122
Tabel 6.2	Alokasi Sementara PEN Tahun 2022	123

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan Kasus Baru COVID-19 (rerata 14 hari)	2
Grafik 1.2.	Google Mobility Index (rerata 14 hari)	2
Grafik 1.3.	Jumlah Penduduk Per 1000 Orang yang telah Divaksin menurut Kelompok Pendapatan	3
Grafik 1.4.	Purchasing Manager's Index	6
Grafik 1.5.	Indeks Optimisme Ekonomi	6
Grafik 1.6.	Tingkat Pengangguran (dalam %)	6
Grafik 1.7.	Neraca Perdagangan Tiongkok (dalam US\$ miliar)	7
Grafik 1.8.	Global Container Freight Rate Indeks (dalam US\$)	10
Grafik 1.9.	Survei Global Ekspektasi Kembalinya Aktivitas Pariwisata ke Level Pra Pandemi	11
Grafik 1.10.	Indeks Harga Komoditas	11
Grafik 1.11.	Tekanan Inflasi di Kelompok Ekonomi Maju	12
Grafik 1.12.	Hutang Perusahaan Non-finansial Kelompok Ekonomi Maju	12
Grafik 1.13.	Perkiraan Inflasi di Kelompok Negara Berkembang	13
Grafik 1.14.	Hutang Pemerintah terhadap PDB	13
Grafik 1.15.	Indeks Kondisi Finansial Global	14
Grafik 1.16.	Rasio Pendapatan per Saham Global	15
Grafik 1.17.	Penerbitan Surat Hutang Hard Currency di Kelompok Negara Berkembang	15
Grafik 2.1.	Perkembangan Kasus Aktif COVID-19 Indonesia dan Global	21
Grafik 2.2.	Total Dosis Vaksinasi Indonesia dan Negara Lainnya (Juta)	21
Grafik 2.3.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (% , yoy)	23
Grafik 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (% , yoy)	24
Grafik 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Spasial (%)	25
Grafik 2.6.	Perkembangan Inflasi yoy (%)	26
Grafik 2.7.	Suku Bunga Kredit Perbankan	27
Grafik 2.8.	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan IHSG	28
Grafik 2.9.	Perkembangan Yield SBN Tenor 10 Tahun	28
Grafik 2.10.	Realisasi APBN s.d. 31 Maret, 2020 – 2021 (triliun Rp)	30
Grafik 2.11.	Neraca Transaksi Berjalan	31
Grafik 2.12.	Neraca Perdagangan	31
Grafik 2.13.	Neraca Jasa	31
Grafik 2.14.	Neraca Pendapatan Primer	32
Grafik 2.15.	Neraca Pendapatan Sekunder	32
Grafik 2.16.	Posisi Cadangan Devisa	33
Grafik 2.17.	Perkembangan Investasi Asing di Indonesia Berdasarkan Sektor (Ribu US\$)	33
Grafik 2.18.	Perkembangan Investasi Dalam Negeri Berdasarkan Sektor (juta Rupiah)	34
Grafik 4.1.	Perkembangan Distribusi PDB Komponen Pengeluaran Konsumsi RT (%)	49
Grafik 4.2.	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen	49
Grafik 4.3.	Laju Pertumbuhan PDB Komponen Konsumsi RT (% , yoy)	49
Grafik 4.4.	Perkembangan Distribusi PDB Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%)	50
Grafik 4.5.	Laju Pertumbuhan PDB Komponen Konsumsi LNPRT (% , yoy)	50
Grafik 4.6.	Perkembangan Distribusi PDB Komponen Pengeluaran Pemerintah (%)	51
Grafik 4.7.	Laju Pertumbuhan Komponen PDB Pengeluaran Pemerintah (% , yoy)	51
Grafik 4.8.	Perkembangan Distribusi PDB Komponen PMTB (%)	52
Grafik 4.9.	Perkembangan Impor Barang Modal dan Impor Bahan Baku (% , yoy)	52
Grafik 4.10.	Pertumbuhan Konsumsi Semen dan Penjualan Mesin Konstruksi (% , yoy)	52
Grafik 4.11.	Purchasing Manager Indeks (PMI) Manufaktur	52
Grafik 4.12.	Laju Pertumbuhan PDB Komponen PMTB (% , yoy)	53

Grafik 4.13.	Perkembangan Distribusi PDB Komponen Ekspor (%)	53
Grafik 4.14.	Laju Pertumbuhan PDB Tiongkok dan Amerika Serikat (% , yoy)	54
Grafik 4.15.	Laju Pertumbuhan PDB Komponen Ekspor (% , yoy)	54
Grafik 4.16.	Perkembangan Distribusi PDB Komponen Impor (%)	55
Grafik 4.17.	Laju Pertumbuhan PDB Komponen Impor (% , yoy)	55
Grafik 4.18.	Pertumbuhan Triwulanan PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (% , yoy)	56
Grafik 4.19.	Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (% , yoy)	58
Grafik 4.20.	Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian (% , yoy)	59
Grafik 4.21.	Perkembangan ICP pada tahun 2021 (US\$ per barel)	60
Grafik 4.22.	Perkembangan HBA pada tahun 2021 (US\$ per ton)	61
Grafik 4.23.	Perkembangan Utilisasi Industri Pengolahan (%)	63
Grafik 4.24.	Perkembangan Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	64
Grafik 4.25.	Pertumbuhan PDB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (%)	65
Grafik 4.26.	Perkembangan Pertumbuhan PDB Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang (% , yoy)	67
Grafik 4.27.	Kontribusi PDB Sektor Konstruksi terhadap PDB Nasional (%)	68
Grafik 4.28.	Pertumbuhan PDB Sektor Konstruksi (%)	69
Grafik 4.29.	Laju Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan (persen)	71
Grafik 4.30.	Pertumbuhan PDB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	73
Grafik 4.31.	Pertumbuhan PDB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (% , yoy)	76
Grafik 4.32.	Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi (% , yoy)	77
Grafik 4.33.	Laju Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Keuangan (% , yoy)	79
Grafik 4.34.	Perkembangan Pertumbuhan PDB Real Estat (% , yoy)	81
Grafik 4.35.	Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Perusahaan (% , yoy)	81
Grafik 4.36.	Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (% , yoy)	84
Grafik 4.37.	Laju Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Pendidikan (% , yoy)	85
Grafik 4.38.	Laju Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Kesehatan dan Sosial Lainnya (% , yoy)	87
Grafik 4.39.	Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Lainnya (% , yoy)	89
Grafik 5.1.	Target dan Realisasi KUR (s.d. 22 Oktober 2021)	97
Grafik 5.2.	Debitur KUR (s.d. 22 Oktober 2021)	97
Grafik 5.3.	Capaian Implementasi Kartu Tani (s.d 31 Oktober 2021)	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Prakerja Meningkatkan Kompetensi dan Kewirausahaan	44
Gambar 3.2.	Tahapan Graduasi Penerimaan Program Kartu Prakerja kepada Program Kredit Usaha Rakyat	45
Gambar 3.3	Integrasi Fasilitas dan Program Pembiayaan/ Kredit dari Pemerintah	46
Gambar 3.4	Capaian dan Evaluasi Kartu Prakerja	46
Gambar 4.1	Sebaran Penerimaan Program Kartu Prakerja	85
Gambar 5.1.	Realisasi PEN (s.d. 22 Oktober 2021)	94
Gambar 5.2.	Lokasi Pengembangan Kawasan Hortikultura tahun 2021	95
Gambar 5.3.	Data Vaksin COVID-19	101
Gambar 5.4.	User’s Journey Program Kartu Prakerja	105
Gambar 5.5.	Penataan Ekosistem Logistik Nasional	107
Gambar 5.6.	Proyek Strategis Nasional	107
Gambar 5.7.	Penyelesaian PSN s.d. September 2021	108
Gambar 5.8.	Lokasi Usulan KEK BAT	114
Gambar 5.9.	Lokasi Usulan KEK Nongsa	115
Gambar 6.1	Perkembangan Kasus COVID-19 dan Kebijakan PPKM	122
Gambar 6.2	Tren Kasus COVID-19 dan Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2021	119
Gambar 6.3.	Realisasi Program PEN	122

1

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

PERTUMBUHAN
EKONOMI

PERDAGANGAN

PASAR KOMODITAS

KEBIJAKAN MONETER

KEBIJAKAN FISKAL

PASAR FINANSIAL

TOPIK SPESIAL: INDONESIA SEBAGAI
PRESIDENSI G20 TAHUN 2022

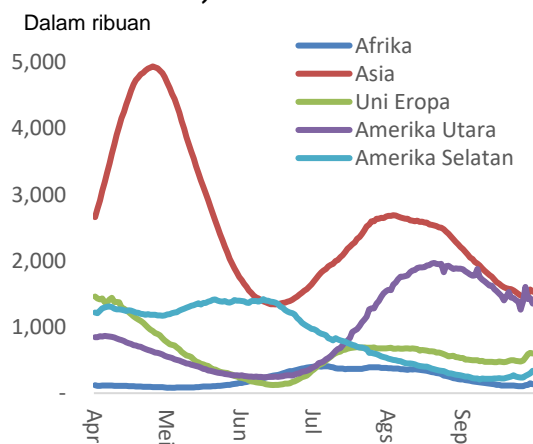


PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemulihan perekonomian global menunjukkan tren positif di paruh kedua 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai negara. Pemulihan yang solid di dua ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, serta perkembangan vaksinasi di berbagai dunia telah mendorong penguatan indikator-indikator ekonomi makro dan meningkatkan kepercayaan pasar. Meskipun demikian pemulihan yang terjadi belum merata, dengan sebagian kelompok negara menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan program pemulihan ekonomi hingga tantangan untuk mendapatkan akses vaksin.

Kemunculan varian baru COVID-19 juga masih menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpastian kebijakan di tahun 2021. Merebaknya varian Delta sejak Mei 2021 yang menjadi penyebab terjadinya gelombang lanjutan di beberapa kawasan seperti di Asia dan Amerika Utara serta kenaikan kasus di Uni Eropa (lihat Grafik 1.1) membuktikan seberapa cepat kondisi dapat berubah akibat penyebaran COVID-19. Di sisi lain, kemunculan mutasi virus COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan kebijakan jangka menengah-panjang.

Grafik 1.1 Perkembangan Kasus Baru COVID-19 (rerata 14 hari)



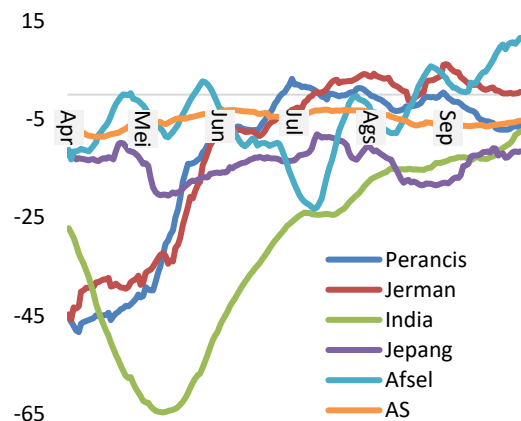
Sumber: Our World in Data, 2021

Kemunculan varian baru COVID-19 terus terjadi namun tidak semuanya menjadi *variants of concern* (VOC). Hingga akhir November 2021, telah terdapat empat VOC dengan varian terbaru dinamai Omicron (B.1.1.529). Varian ini memicu peningkatan kewaspadaan negara-negara dunia, untuk menghindari dampak sebagaimana yang terjadi ketika VOC sebelumnya, yaitu Delta, merebak.

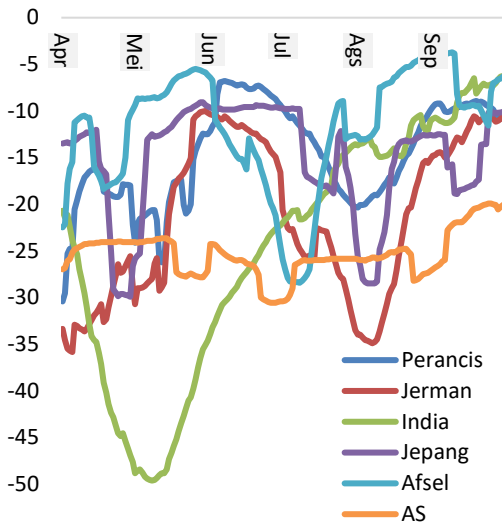
Pergerakan data *Google Mobility Index* (lihat Grafik 1.2) secara umum memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas luar rumah masyarakat di beberapa negara di paruh kedua 2021. Dalam kasus Jerman dan Perancis, pergerakan masyarakat di area komersial mengalami kenaikan signifikan dengan naik ke zona positif. Meskipun demikian, pergerakan masyarakat ke tempat bekerja dan residensial tidak mengalami perubahan yang berarti. Data tersebut dapat menjadi refleksi terjadinya perubahan kebiasaan kerja masyarakat, di mana *work from home* masih terus berlanjut meskipun kebijakan pembatasan aktivitas telah dilonggarkan.

Grafik 1.2 Google Mobility Index (rerata 14 hari)

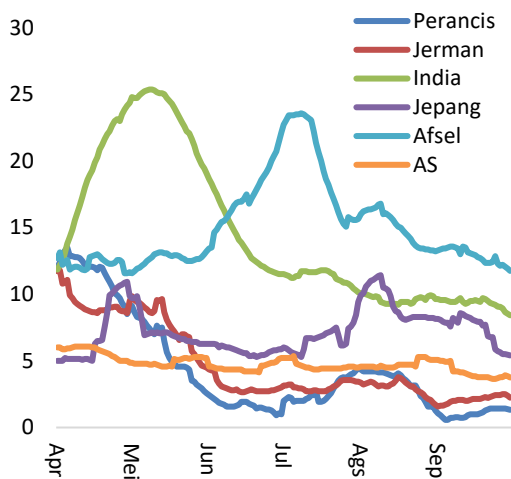
a. Pusat Retail dan Rekreasi



b. Tempat Bekerja



c. Residensial



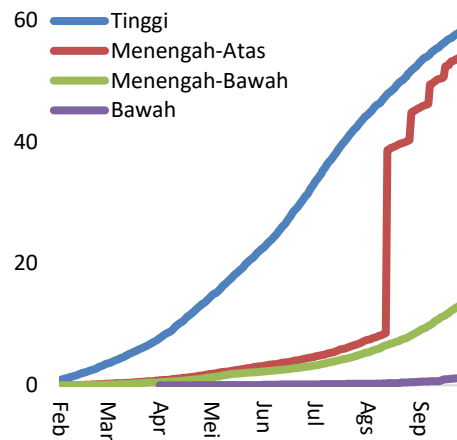
Sumber: Google, 2021

Sementara terus berupaya mengendalikan penyebaran virus serta mempercepat vaksinasi, berbagai pemerintah juga telah menyiapkan skenario untuk keluar dari fase pandemi. Beberapa negara juga telah bersiap melakukan transisi ke fase endemi COVID-19 dengan menyesuaikan kebijakan pembatasan mobilitas dan sosial. Dalam masa transisi ini, beberapa negara telah membuka migrasi internasional meskipun tetap menerapkan kebijakan pembatasan untuk memfilter warga negara asing yang masuk. Beberapa strategi yang ditempuh adalah menetapkan persyaratan asal negara,

jenis perjalanan, titik masuk (bandara, pelabuhan, jalan), pemberlakuan karantina, hingga syarat jenis vaksin yang digunakan.

Pada paruh kedua 2021, telah terjadi peningkatan vaksinasi secara global. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti strategi pemerintah mempercepat vaksinasi dalam rangka menghadapi gelombang lanjutan, semakin banyaknya jenis vaksin COVID-19 yang tersedia, hingga keluarnya otorisasi penggunaan vaksin di negara-negara di kawasan Asia Timur. Di saat yang sama, gap tingkat vaksinasi antara kelompok negara berpendapatan tinggi dan menengah-tinggi dengan kelompok negara berpendapatan menengah-bawah dan rendah menjadi semakin lebar (lihat Grafik 1.3).

Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Per 1000 Orang yang telah Divaksin menurut Kelompok Pendapatan



Sumber: Ourworld in Data, 2021

Dalam kasus kelompok negara berpenghasilan tinggi, hambatan vaksinasi lebih disebabkan karena keengganan penduduk untuk melakukan. Sementara itu di kelompok negara berpendapatan rendah, kendala utama yang dihadapi adalah suplai yang tidak memadai. Lebih jauh, WHO memperkirakan sebagian kecil negara berkembang akan memperoleh vaksin dalam jumlah yang memadai di tahun 2021.

Sebagian besar lainnya akan memperolehnya di akhir tahun 2022 sementara sisanya baru akan memperolehnya di tahun 2023.

Pemerataan akses terhadap vaksin masih menjadi isu yang perlu ditangani secara global. Terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah di banyak negara berkembang untuk membiayai serta kapasitas teknis untuk melaksanakan program vaksinasi menjadi tantangan yang nyata.

Dalam hal ini, inisiatif global melalui COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) telah menjadi salah satu solusi terkait terbatasnya pembiayaan. Namun demikian, dukungan yang lebih banyak dibutuhkan agar pemerataan akses vaksin dapat semakin ditingkatkan. Di samping itu, tantangan juga datang dari sisi kesiapan infrastruktur (*cold storage*, fasilitas kesehatan), jumlah tenaga kesehatan, hingga pelayanan kesehatan setelah vaksinasi menentukan kecepatan distribusi dan efektivitas vaksinasi yang dilakukan oleh negara.

Dari sisi perkembangan ekonomi, kondisi global menuju ke arah pemulihan yang lebih solid. Dengan performa ekonomi AS terus menguat sejak akhir tahun 2020 lalu serta kondisi ekonomi Tiongkok yang masih menunjukkan optimisme, perekonomian di negara-negara lain juga ikut terdorong menuju pemulihan.

Tren positif atas keberhasilan kebijakan pengendalian COVID-19 di berbagai negara dalam menghadapi gelombang lanjutan dengan relatif cepat telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan pasar, sehingga meningkatkan permintaan untuk membuka ekonomi kembali secara bertahap. Peningkatan aktivitas ekonomi

selanjutnya mendorong peningkatan harga-harga komoditas, terutama minyak bumi dan logam. Meskipun demikian, tekanan dalam rantai suplai global serta logistik masih berlanjut sehingga meningkatkan biaya perdagangan, dan pada akhirnya juga berdampak pada harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, kondisi finansial global secara umum masih relatif cukup akomodatif berkat berlanjutnya dukungan kebijakan moneter oleh berbagai bank sentral. Meskipun demikian, penguatan ekonomi AS telah mendorong peningkatan inflasi dan suku bunga surat hutangnya. Oleh karena itu, negara-negara berkembang yang saat ini masih menikmati kondisi moneter global yang akomodatif perlu mengantisipasi kebijakan *tapering* The Fed, setidaknya dalam jangka waktu menengah. Negara-negara pengekspor komoditas juga perlu mewaspadai peningkatan inflasi karena tren peningkatan harga-harga komoditas global yang diperkirakan dapat berlanjut hingga awal 2022.

Dengan mempertimbangkan dinamika kasus dan vaksinasi COVID-19 serta perkembangan perekonomian terkini, Kemenko Perekonomian meyakini prospek pemulihan ekonomi di tahun 2021 akan menunjukkan hasil yang positif. Sejalan dengan perkiraan lembaga internasional IMF dan World Bank (Tabel 1.1), Kemenko Perekonomian melihat ekonomi global di tahun 2021 akan mengalami *rebound* dari kelesuan di tahun 2020. Penguatan ekonomi di negara-negara dunia masih akan digerakkan oleh pertumbuhan AS dan Tiongkok, serta didukung oleh perbaikan kondisi eksternal dan peningkatan harga komoditas. Secara umum, risiko dalam *outlook* perekonomian ke depan juga mulai bergerak ke arah netral.

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDB Global (% , yoy)

Ekonomi	IMF		World Bank		
	2021 ^e	2022 ^p	2021 ^e	2022 ^p	2023 ^p
Dunia	5,9	4,9	5,6	4,3	3,1
Amerika Serikat	6,0	5,2	6,8	4,2	2,3
Kawasan Euro	5,0	4,3	4,2	4,4	2,4
Jepang	2,4	3,2	2,9	2,6	1,0
Tiongkok	8,0	5,6	8,5	5,4	5,3
India	9,5	8,5	8,3	7,5	6,5
ASEAN-5	2,9	5,8	4,8	5,3	5,3

Sumber: IMF (Oktober 2021), World Bank (Juni 2022)

Keterangan: “e” adalah singkatan dari “estimasi” dan “p” adalah singkatan dari “prediksi”

Dari sisi *upside risk*, perkiraan pertumbuhan ekonomi global akan didukung oleh vaksinasi yang lebih cepat dari perkiraan. *Upside risk* lainnya yaitu aktivitas manufaktur global dan kawasan yang terus tumbuh ekspansif (PMI>50). Target vaksinasi di negara-negara produsen vaksin yang akan segera tercapai membuka peluang bagi percepatan distribusi kelebihan produksi vaksin ke negara-negara lain yang membutuhkan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global akan turut didukung oleh *spillover* dari penguatan ekonomi di AS dan Tiongkok, sehingga diharapkan tren pemulihan akan ikut terjadi di negara-negara lain.

Selanjutnya dari sisi *downside risk*, pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi oleh ketidakpastian akan munculnya varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya. *Downside risk* lainnya yaitu potensi normalisasi kebijakan moneter AS lebih cepat dari ekspektasi yang berpotensi *capital outflow* di EM; beberapa negara sudah menaikkan suku bunga kebijakan seperti Rusia, Korea Selatan, dan Afrika Selatan; potensi terjadinya stagflasi; perubahan iklim dan krisis energi. Kenaikan

inflasi ini sendiri disebabkan oleh *mismatch* antara permintaan dan penawaran, dengan latar belakang pemulihan ekonomi lebih cepat dari ekspektasi serta kenaikan harga komoditas yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi karena hambatan rantai suplai dan logistik.

Kemudian dari sisi finansial, risiko muncul dari meningkatkan level hutang negara maupun perusahaan akibat pandemi. Meningkatnya level hutang perusahaan membawa risiko meningkatnya potensi kebangkrutan, yang nantinya dapat berimplikasi pada kondisi sistem perbankan. Tensi geopolitik juga masih membayangi kondisi eksternal. Selain kondisi di Timur Tengah yang terus perlu diperhatikan, eskalasi tensi antara AS dan Tiongkok kini perlu diwaspadai terutama dengan bergabungnya Inggris Raya dan Australia dalam aliansi AS (Australia, United Kingdom, United States – AUKUS).

Amerika Serikat – Kemenko Perekonomian meyakini AS akan mampu pulih dan tumbuh kuat di tahun 2021 melebihi negara ekonomi besar lainnya. Pemulihan ini didukung oleh

progres vaksinasi yang positif serta AS kembali menghadapi gelombang lanjutan COVID-19 paska liburan Musim Panas, dengan tingkat kasus mencapai hingga 150.000 kasus per hari di awal September. Peningkatan kasus tersebut meningkatkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat terhadap varian baru COVID-19 sehingga mendorong progres vaksinasi. Sejak program vaksinasi dimulai pada Desember 2020, tingkat vaksinasi di AS telah mencapai 77% populasi usia dewasa untuk dosis pertama pada awal Oktober 2021.

Keberlanjutan stimulus fiskal juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong solidnya pemulihan AS di tahun 2021. Sejak disahkan di bulan Maret 2021, The America Rescue Plan Act yang bernilai US\$1,9 triliun telah menopang daya beli kelas menengah, selain juga memiliki dampak pada keberlanjutan usaha beberapa korporasi besar di masa krisis akibat COVID-19.

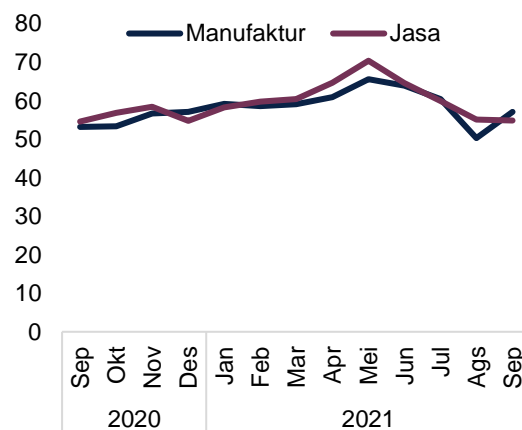
Melihat masih diperlukannya keberlanjutan stimulus untuk menjaga perekonomian AS, Pemerintahan Presiden Joseph Biden kembali mengusulkan paket stimulus dengan nilai sebesar US\$1,2 triliun dan telah disahkan oleh Kongres AS di awal November 2021 dengan nama Infrastructure Investment and Jobs Act. Paket stimulus ini nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur transportasi publik, meningkatkan sistem energi dan pengairan, mendorong penggunaan kendaraan listrik, serta penguatan jaringan *broadband*.

Sejalan dengan progres vaksinasi dan stimulus fiskal yang masih digulirkan, indikator-indikator perekonomian AS seperti PMI dan indeks optimisme ekonomi menunjukkan performa yang solid meskipun sempat terdampak oleh kenaikan kasus di akhir Musim Panas (lihat Grafik 1.4 dan 1.5).

dilanjutkannya stimulus fiskal.

Membairnya perekonomian AS juga terlihat dari turunnya tingkat pengangguran, dengan pencapaian di September tercatat sebagai yang terendah sejak pandemi terjadi (lihat Grafik 1.6).

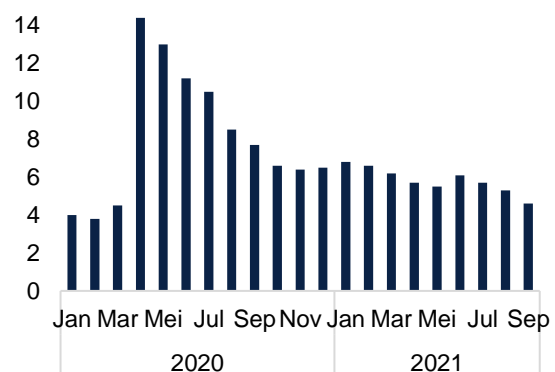
Grafik 1.4 Purchasing Manager's Index



Grafik 1.5 Indeks Optimisme Ekonomi



Grafik 1.6 Tingkat Pengangguran (dalam %)



Sumber: CEIC

Dengan memperhatikan perkembangan vaksinasi, keberlanjutan dukungan stimulus fiskal, serta pemulihan perekonomian global, Kemenko Perekonomian meyakini AS akan mengalami *rebound* di tahun 2021 sebelum mengalami moderasi di tahun 2022.

Tiongkok – Kemenko Perekonomian melihat ekonomi Tiongkok masih akan tumbuh tinggi karena mengalami *rebound* di tahun 2021, sebelum turun di tahun 2022 karena dampak normalisasi kebijakan ekonomi. Namun demikian, terdapat risiko dari krisis *evergrande* dan dampaknya terhadap sektor properti Tiongkok, pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan pasar obligasi EM.

Di tahun 2021, Pemerintah Tiongkok melanjutkan dukungan stimulus fiskal dan moneter secara selektif guna menjaga momentum pemulihan. Dukungan kepada usaha dan inovasi teknologi masih akan dilanjutkan, diiringi oleh kebijakan moneter akomodatif untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.

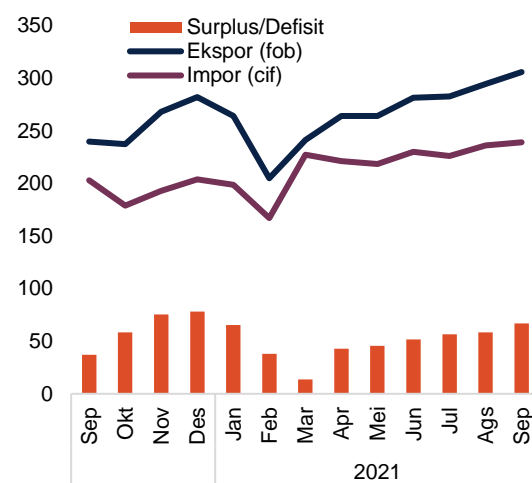
Menuju fase normalisasi kebijakan, Pemerintah Tiongkok akan melanjutkan reformasi struktural di tahun 2021 untuk mewujudkan transisi dari ekonomi berbasis suplai menuju ekonomi berbasis permintaan. Secara umum strategi *dual-circulation* ini akan mensinergikan permintaan domestik dan eksternal, yang akan diwujudkan dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan jaminan sosial, pengembangan kelas menengah, mendorong investasi asing, dan mendorong produksi beorientasi ekspor.

Di sepanjang tahun 2021, perekonomian Tiongkok menunjukkan pemulihan secara bertahap dengan kembalinya investasi publik, konsumsi domestik, hingga ekspor. Investasi masih akan menjadi kunci utama pertumbuhan, sementara konsumsi akan

pulih secara gradual. Peningkatan permintaan sendiri masih ditopang oleh *pent up demand*, baik di domestik maupun ekspor.

Dari sisi neraca perdagangan (Grafik 1.7), pemulihan impor Tiongkok masih mengalami *lag* dibandingkan ekspor sehingga terjadi surplus. Perdagangan internasional mengalami perlambatan lagi di awal tahun sebagai dampak ikutan dari kondisi negara-negara mitra dagang yang kembali melakukan pengetatan pembatasan aktivitas, selain Tiongkok juga mulai memasuki musim liburan Tahun Baru. Namun secara umum, aktivitas perdagangan Tiongkok terus mengalami pertumbuhan di tahun 2021, merefleksikan pemulihan ekonomi global secara bertahap.

Grafik 1.7 Neraca Perdagangan Tiongkok (dalam US\$ miliar)



Sumber: CEIC

Tiongkok sebagai salah satu negara yang memproduksi vaksin telah melakukan vaksinasi sejak pertengahan Desember 2020. Hingga Oktober 2021, Pemerintah Tiongkok telah menyuntikkan 2,25 miliar dosis vaksin atau setara dengan keperluan dua dosis untuk 80,6% populasinya. Tingkat penyebaran COVID-19 di Tiongkok juga terkendali, sehingga mendukung peningkatan aktivitas masyarakat.

Jepang – Kemenko Perekonomian melihat Jepang di tahun 2021 ini mampu tumbuh lebih tinggi dari perkiraan awal tahun berkat dukungan pengeluaran pemerintah serta penguatan perekonomian global.

Pemerintah dan Parlemen Jepang telah menyepakati tambahan paket stimulus fiskal pada Desember 2020 dengan nilai ¥73,6 triliun, atau setara dengan US\$708 miliar. Stimulus tersebut akan digunakan untuk melanjutkan subsidi pemerintah guna mempromosikan pariwisata domestik, meningkatkan konsumsi, menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja, serta memberikan insentif untuk digitalisasi dan pengurangan emisi karbon.

Pemerintah Jepang juga kembali mengusulkan stimulus fiskal dengan nilai antara ¥10 – 15 triliun, dengan setengahnya akan dibiayai dari penerbitan surat hutang baru. Namun demikian, keberlanjutan proposal ini akan ditentukan oleh dinamika politik dalam negeri Jepang. Sebagai catatan, Perdana Menteri Yoshihide Suga yang saat ini menjabat telah memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sehingga akan diadakan pemilihan umum sebelum tanggal 30 November.

Sektor manufaktur Jepang turut terdorong oleh peningkatan permintaan domestik dan global. Permintaan akan semikonduktor dan elektronik mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi global. Namun demikian, naiknya biaya akibat kelangkaan bahan baku dan ketersediaan kapal pengangkutan menjadi penghambat tersendiri bagi tumbuhnya produksi.

Di sisi lain, laju vaksinasi di Jepang mengalami akselerasi yang signifikan di paruh kedua 2021. Tercatat pada akhir September 2021, sebanyak 70,8% populasi telah mendapatkan vaksin dosis 1 dan 60,2% populasi telah menyelesaikan program

vaksinasinya. Progres yang positif ini mendukung upaya pembukaan kembali aktivitas perekonomian masyarakat. Namun demikian, peningkatan kembali kasus COVID-19 dengan puncak pada bulan Mei dan Agustus sempat menahan pemulihan aktivitas ekonomi karena pemerintah memberlakukan kembali kebijakan pembatasan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan tersebut, Kemenko Perekonomian memperkirakan ekonomi Jepang akan membaik di tahun 2021 berkat progres vaksinasi dan pemulihan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Jepang diprediksi akan mengalami moderasi di tahun 2022, tertahan akibat rendahnya permintaan yang berlarut-larut di tengah lemahnya pertumbuhan upah.

ASEAN-5 – Kemenko Perekonomian melihat pertumbuhan ekonomi kelompok ASEAN-5 di tahun 2021 masih akan tertahan oleh upaya pengendalian COVID-19 dan masih lemahnya sektor pariwisata di tengah kondisi eksternal yang membaik secara bertahap.

Vietnam yang mampu mengendalikan COVID-19 paling cepat di antara kelompok ASEAN-5 telah mencatatkan tingkat *output* melebihi level sebelum pandemi. Indonesia yang menunjukkan resiliensi dari jatuhnya sektor pariwisata dan perdagangan, masih dalam proses pemulihan untuk mengembalikan tingkat *output* untuk mencapai level sebelum pandemi. Sementara itu, kelompok negara sebagai kelompok negara yang lebih tergantung pada sektor pariwisata seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand juga masih memerlukan waktu untuk kembali ke level *output* sebelum pandemi.

Efektivitas pengendalian COVID-19 dan laju perkembangan vaksinasi masih akan menjadi faktor determinan pembukaan aktivitas ekonomi di kawasan. Tingkat vaksinasi yang masih rendah akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, sementara ketidakpastian penyebaran dan kemunculan varian baru COVID-19 masih membayangi. Risiko lain yang perlu diwaspadai oleh negara-negara kawasan adalah pengetatan kondisi finansial global, mengingat kemungkinan peningkatan suku bunga The Fed. Di sisi lain, percepatan vaksinasi dan *spillover* pemulihan ekonomi di AS terhadap peningkatan permintaan ekspor kawasan menjadi *upside risk* yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan memperhatikan kondisi dari sisi Kesehatan dan ekonomi, Kemenko Perekonomian memperkirakan Kawasan ASEAN-5 akan tumbuh positif di tahun 2021, dan akan bergerak ke angka yang lebih tinggi di tahun 2022 seiring dengan pemulihan di sektor pariwisata dan penguatan harga-harga komoditas.

Kawasan Euro – Pemulihan ekonomi di Kawasan Euro pada tahun 2021 ditopang oleh pertumbuhan yang positif pada paruh kedua seiring dengan peningkatan vaksinasi, penguatan permintaan domestik, serta peningkatan ekspor di kawasan tersebut. Di antara negara-negara anggota dengan ekonomi besar, Perancis diekspektasikan akan tumbuh paling tinggi, diikuti oleh Italia, Spanyol, dan Jerman. Namun demikian, terdapat risiko yang perlu diwaspadai seperti tren kenaikan kasus covid-19 di Uni Eropa sejak awal Oktober 2021 yang berdampak pengetatan mobilitas dan penurunan aktivitas ekonomi di sejumlah negara Eropa

Dari sisi kebijakan, pemerintah Uni Eropa masih melanjutkan stimulus fiskal Next Generation EU serta menggulirkan pembiayaan untuk proyek-proyek hijau dan infrastruktur digital. Dari sisi aktivitas ekonomi, pertumbuhan di paruh kedua 2021 didukung oleh pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat pada paruh kedua 2021 yang selanjutnya berdampak pada peningkatan konsumsi domestik.

Data pergerakan mobilitas juga telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan aktivitas pariwisata, yang turut diuntungkan dengan adanya *EU Digital COVID certificate*. Pembukaan kembali aktivitas pariwisata juga semakin diuntungkan dengan diadakannya acara kenegaraan internasional (KTT G20 di Italia) pada triwulan akhir 2021 yang dapat menjadi parameter kesiapan kawasan dalam menangani imigrasi internasional di masa pandemi.

Risiko terhadap *outlook* pertumbuhan kawasan relatif seimbang. Di satu sisi, laju pemulihan ekonomi akan berhadapan dengan ketidakpastian penyebaran dan munculnya varian baru COVID-19. Selain itu, pemulihan juga akan dibayangi oleh kemungkinan naiknya inflasi jika hambatan rantai suplai terjadi lebih lama dari ekspektasi sehingga akan menyebabkan tekanan terhadap harga-harga.

Dengan melihat tren pemulihan ekonomi dan risikonya, Kemenko Perekonomian optimis ekonomi Kawasan Euro akan tumbuh solid di tahun 2021 dan selanjutnya mengalami sedikit moderasi di 2022 seiring dengan berkurangnya dampak stimulus fiskal pada perekonomian.

India – Kemenko Perekonomian memperkirakan India akan mengalami *rebound* di tahun 2021 dengan didorong oleh

penguatan permintaan (*pent up demand*) dan ekspor.

Aktivitas perekonomian India di tahun 2021 juga masih akan didorong oleh dukungan kebijakan, termasuk belanja pemerintah untuk infrastruktur, pembangunan daerah pedesaan, dan Kesehatan. Kemudian dari sisi sektoral, pertumbuhan di sektor pertanian diperkirakan masih baik dengan pemulihan terjadi di sektor jasa dan manufaktur.

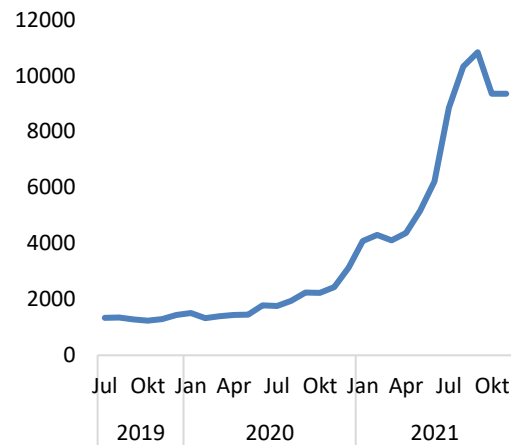
Selanjutnya di tahun 2022, Kemenko Perekonomian memperkirakan pertumbuhan ekonomi India akan mengalami moderasi, merefleksikan dampak berkelanjutan dari COVID-19 terhadap rumah tangga, perusahaan, dan neraca perbankan.

PERDAGANGAN

Perdagangan global diperkirakan akan mengalami *rebound* di tahun 2021. Pertumbuhan akan tertahan dengan adanya pergeseran dari perdagangan produk manufaktur ke produk dengan intensitas perdagangan rendah di tingkat domestik.

Perdagangan barang-barang manufaktur mengalami hambatan karena terjadinya kelangkaan bahan baku serta keterbatasan dalam rantai suplai global. Produsen mengalami kenaikan biaya pengapalan serta kelangkaan kontainer (lihat Grafik 1.8) di beberapa wilayah, sehingga mereka perlu beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital atau melakukan diversifikasi penyuplai maupun lokasi produksi. Ketidakseimbangan tingkat pemulihan ekonomi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kenaikan biaya pengiriman, mengingat kontainer yang diberangkatkan tidak semua dapat kembali dengan cepat karena tidak ada atau kurangnya barang untuk dikirimkan kembali.

Grafik 1.8. Global Container Freight Rate Index (dalam US\$)

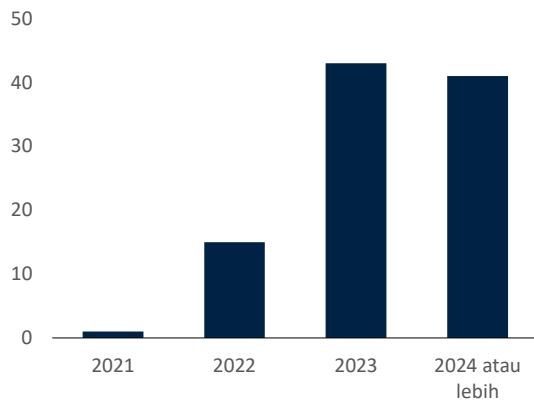


Sumber: Statista, 2021

Tekanan logistik paling dirasakan di Asia, terutama Tiongkok, di mana tidak hanya menghadapi kelangkaan kontainer tetapi juga peningkatan biaya pengiriman. Sebagai contoh, biaya pengapalan dari Tiongkok ke Amerika Selatan mengalami peningkatan sebanyak 443% dibandingkan kenaikan biaya pengapalan ke rute Amerika Utara yang naik sebesar 63%.

Sementara itu, pemulihan perdagangan jasa masih tertahan terutama untuk sektor-sektor yang memerlukan interaksi langsung seperti perjalanan dan pariwisata. Dari survei yang dilakukan oleh World Bank, hanya sebagian kecil responden yang meyakini perjalanan internasional dapat pulih dalam waktu dekat. Sebagian besar di antaranya masih berpendapat bahwa baru memungkinkan untuk kembali melakukan perjalanan pariwisata internasional paling cepat di tahun 2023 (lihat Grafik 1.9). Meskipun demikian, data menunjukkan telah terjadi perbaikan untuk beberapa sektor jasa lain seperti jasa perdagangan, telekomunikasi, dan finansial.

Grafik 1.9. Survei Global Ekspektasi Kembalinya Aktivitas Pariwisata Internasional ke Level Pra-Pandemi

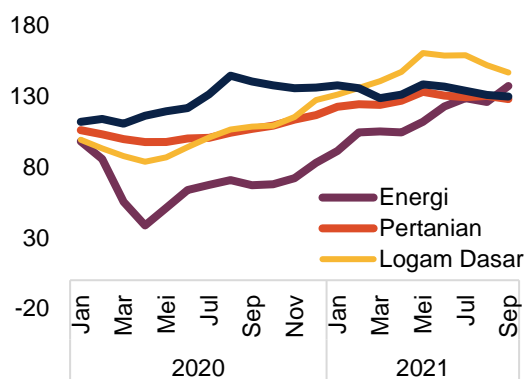


Sumber: World Bank, 2021

PASAR KOMODITAS

Secara umum, harga-harga komoditas mengalami penguatan di tahun 2021 dan telah melebihi level sebelum pandemi (lihat Grafik 1.11). Penguatan tersebut didukung oleh peningkatan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi di beberapa negara ekonomi kunci serta berlanjutnya kebijakan pembatasan produksi minyak mentah oleh OPEC.

Grafik 1.10. Indeks Harga Komoditas



Sumber: World Bank, 2021

Komoditas Energi – Komoditas energi menjadi kelompok yang paling terdampak oleh pandemi dan pemulihannya merupakan yang paling akhir di antara kelompok

komoditas lainnya. World Bank memprediksi minyak bumi akan menguat di harga rata-rata US\$70/barel di tahun 2021 dan naik kembali menjadi US\$74/barel di tahun 2021. Setidaknya terdapat dua risiko yang perlu diperhatikan terkait prospek harga minyak bumi. Pertama, kemungkinan OPEC+ memutuskan untuk menaikkan produksi minyak yang lebih cepat dari perkiraan. Kedua, kemungkinan peningkatan aktivitas pengeboran *shale oil* di AS.

Sementara itu, World Bank memperkirakan harga batu bara akan mengalami penurunan ke US\$120/metrik ton di tahun 2022 setelah menguat US\$140/metrik ton. Gas alam secara umum diperkirakan juga akan mengalami penurunan harga di tahun 2022 setelah menguat di tahun 2021. Dalam jangka panjang, prospek komoditas energi akan dipengaruhi oleh kebijakan transisi menuju sumber energi terbarukan.

Komoditas Logam – Logam dasar merupakan kelompok yang mengalami kenaikan harga paling tinggi di antara komoditas lainnya. Penguatan ini tidak lepas dari meningkatnya permintaan dari Tiongkok dan negara-negara lain yang perekonomiannya pulih.

Di antara kelompok logam-logam dasar, World Bank memprediksi timah akan menjadi komoditas dengan penguatan tertinggi di tahun 2021, diikuti oleh tembaga dan bijih besi. Setelah mengalami *rebound* di tahun 2021, harga komoditas logam dasar secara umum akan mengalami normalisasi di tahun 2022 seiring dengan berkurangnya gangguan rantai suplai, meskipun diprediksi masih akan berada di atas level pra-pandemi.

Komoditas logam mulia merupakan kelompok dengan harga yang relatif stabil selama pandemi. Tren harga untuk kelompok ini diperkirakan juga akan

mengikuti tren komoditas secara umum, dengan penguatan di tahun 2021 dan diikuti moderasi harga di tahun 2022.

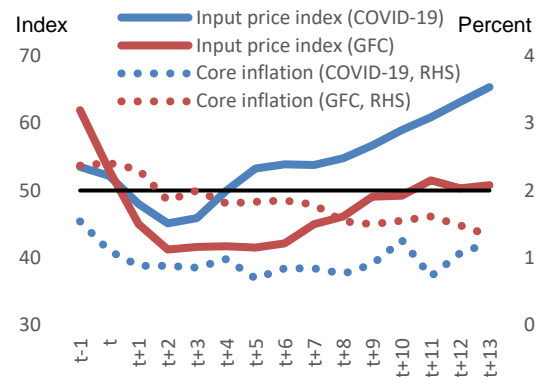
Komoditas Pertanian – World Bank memperkirakan harga-harga komoditas pertanian akan mengalami kenaikan sebesar 16% di tahun 2021 sebelum turun kembali di tahun 2022. Sebagian besar produk pertanian diperkirakan akan dapat terjaga suplainya, meskipun pertumbuhan produksi untuk bahan pangan pokok masih di bawah tren dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini selanjutnya dapat menyebabkan kenaikan harga yang signifikan untuk kelompok makanan dan dikhawatirkan dapat meningkatkan ancaman terhadap keamanan pangan di beberapa negara, terutama yang terdampak konflik atau mengalami bencana alam.

KEBIJAKAN MONETER

Di kelompok negara maju, inflasi mulai mengalami kenaikan karena peningkatan harga komoditas serta dampak dari terganggunya suplai (lihat Grafik 1.12). Meskipun demikian, sebagian besar negara-negara maju masih dalam fase awal pemulihan sehingga kebijakan moneter yang akomodatif masih perlu dipertahankan.

Kondisi dilematis tersebut juga dialami oleh AS, di mana penguatan permintaan domestik telah meningkatkan inflasi sehingga dapat menjadi justifikasi The Fed untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunganya. Tingkat inflasi tahunan AS di bulan Oktober 2021 kembali naik menjadi 6,2% (yoy), naik sebesar 0,8% dibandingkan bulan September.

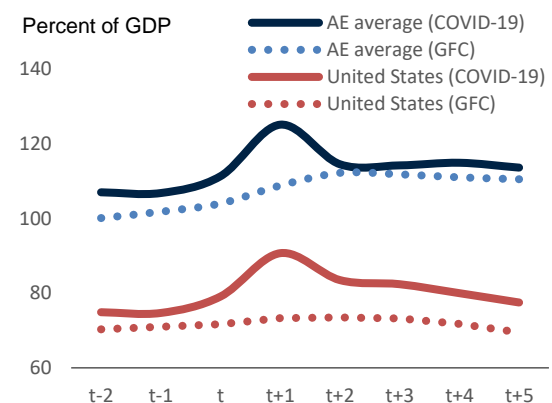
Grafik 1.11 Tekanan Inflasi di Kelompok Ekonomi Maju



Sumber: World Bank, 2021

Isu kedua yang dihadapi oleh kelompok negara-negara maju adalah tingkat hutang dan moratoria pembayaran hutang, mengingat sebelumnya telah terjadi peningkatan tingkat hutang perusahaan non-finansial (lihat Grafik 1.13). Risiko gagal bayar juga mengalami peningkatan untuk perusahaan berskala kecil dan menengah. Oleh karena itu, otoritas moneter perlu secara proaktif meningkatkan kebijakan untuk menjaga kesehatan sistem perbankan. Di antara strategi yang dapat digunakan adalah restrukturisasi hutang, pemisahan aset, hingga rekapitalisasi yang dapat digunakan perusahaan dan rumah tangga untuk memfasilitasi kemungkinan gagal bayar.

Grafik 1.12 Hutang Perusahaan Non-finansial Kelompok Ekonomi Maju



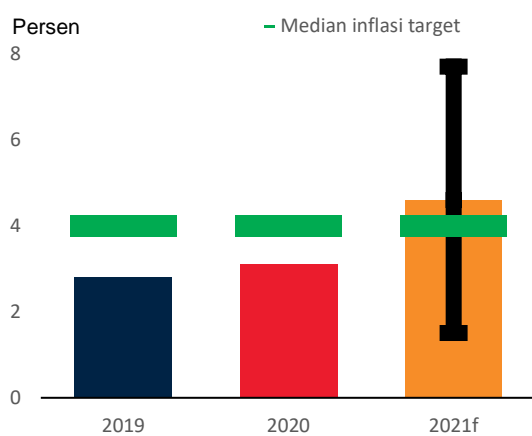
Sumber: World Bank, 2021

Negara-negara berkembang secara umum masih mempertahankan posisi kebijakan moneter ekspansi berkat dukungan kondisi finansial global yang masih relatif akomodatif. Beberapa bank sentral negara berkembang juga tengah menghadapi dilema kebijakan untuk memastikan tekanan inflasi tetap terjaga, sementara terdapat *output gap* yang substansial.

Di tengah pemulihan ekonomi global dan meningkatnya harga-harga komoditas, kelompok negara berkembang juga turut mengalami peningkatan inflasi di tahun 2021 (lihat Grafik 1.14). Kenaikan inflasi dapat menjadi tantangan ganda bagi kelompok negara-negara yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi dalam mengarahkan kebijakan moneter di antara pengetatan atau mempertahankan pada posisi akomodatif.

Isu lain yang perlu diwaspadai di kelompok negara berkembang adalah terjadinya depresiasi mata uang. Dalam hal ini, beberapa negara berkembang dengan defisit neraca yang besar dan tingkat hutang eksternal yang tinggi mengalami depresiasi mata uang rata-rata yang besar dalam satu tahun terakhir.

Grafik 1.13 Perkiraan Inflasi di Kelompok Negara Berkembang



Sumber: World Bank, 2021

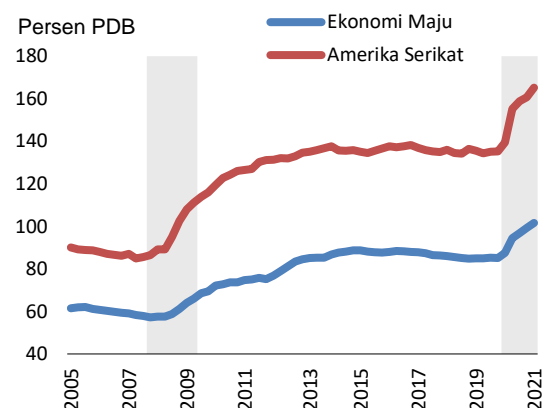
Secara rata-rata, rasio kecukupan modal masih tinggi dengan tingkat *nonperforming*

loan masih rendah. Kondisi ini merefleksikan adanya kebijakan pengontrol, jaminan pemerintah, dan penundaan gagal bayar pinjaman yang juga pernah terjadi di resesi sebelumnya. Sektor perbankan di beberapa negara berkembang diperkirakan akan menghadapi tantangan serius ketika dukungan terhadap kredit dari pemerintah ditarik serta dilakukan pengetatan klasifikasi pinjaman.

KEBIJAKAN FISKAL

Pada umumnya ketika tingkat hutang pemerintah mengalami kenaikan tajam, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan fiskal untuk mengendalikan risiko fiskal di masa mendatang. Meskipun demikian, dalam kondisi di mana ekonomi masih berada di fase awal pemulihan, kebijakan fiskal tidak dapat serta merta dihentikan sehingga alternatifnya adalah dengan melakukan penyesuaian. Dalam kasus negara maju yang mengalami pemulihan yang cepat seperti AS, tambahan stimulus fiskal dapat berimplikasi pada tingkat inflasi serta keberlanjutan hutang dalam jangka panjang.

Grafik 1.14 Hutang Pemerintah terhadap PDB



Sumber: World Bank, 2021

Meskipun tinggi secara historis, tingkat hutang serta rasio defisit fiskal di kelompok negara maju tidak memiliki risiko negatif

dalam jangka pendek mengingat rendahnya tingkat bunga saat ini. Namun demikian, negara-negara perlu untuk mulai memikirkan strategi untuk membangun kembali ruang fiskalnya serta memastikan keberlanjutan hutang dalam jangka menengah.

Di tahun 2020, paket stimulus fiskal di kelompok negara-negara berkembang mencapai rata-rata sebesar 4% PDB. Relatif terhadap negara-negara maju, stimulus fiskal di sebagian besar negara berkembang lebih banyak digunakan di tahun 2020, dibandingkan alokasi di tahun 2021. Kenaikan pengeluaran tersebut berkontribusi terhadap pelebaran defisit fiskal, mengingat di saat yang sama juga terjadi penurunan pendapatan.

Di tahun 2021, sebagian besar negara berkembang diekspektasikan akan melakukan pengetatan fiskal untuk meningkatkan keberlanjutan pembiayaan publik. Meskipun demikian, pemerintah negara-negara berkembang mengantisipasi kenaikan hutang pemerintah, sehingga membatasi ruang fiskal yang dimiliki. Lebih jauh, keberlanjutan fiskal diekspektasikan masih akan berada di teritori negatif meskipun saat ini masih berada dalam kondisi finansial global yang akomodatif. Dalam konteks ini, pengetatan kondisi finansial secara tiba-tiba atau pertumbuhan yang lebih rendah dari ekspektasi dapat berakibat pada peningkatan keperluan penyesuaian kebijakan untuk menstabilkan hutang pemerintah.

PASAR FINANSIAL

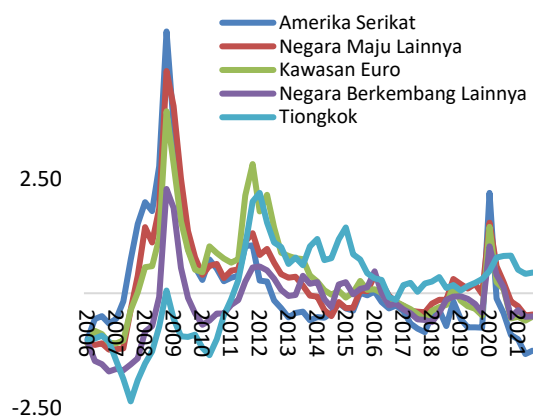
Risiko terkait stabilitas finansial global dapat dikendalikan masih dapat dikendalikan dengan cukup baik di tahun 2021. Terlepas dari perbaikan yang terjadi setelah kejatuhan pasar finansial di awal pandemi tahun 2020 lalu, masih terdapat beberapa kerentanan

yang semakin meningkat di beberapa faktor. Pasar finansial sendiri menunjukkan penguatan di paruh kedua 2021 seiring dengan perkembangan positif terkait vaksinasi di sebagian negara dunia serta mulai naiknya inflasi dan suku bunga global.

Pasar finansial global juga perlu mengantisipasi risiko pembalikan arus modal asing di EM setelah the Fed mengurangi pembelian obligasi (*tapering off*) hingga Juni 2022 dan potensi rencana kenaikan suku bunga yang lebih cepat. Namun demikian, dampak terhadap pasar finansial diperkirakan tidak lebih besar dibandingkan periode *tapering off* yang terjadi di tahun 2013

Secara umum, kondisi finansial di kelompok negara-negara maju masih longgar di tahun 2021, didukung oleh ekspektasi berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif serta meningkatnya risiko valuasi aset. Di sisi lain, kondisi finansial di kelompok negara-negara berkembang mengalami sedikit perubahan, di mana terjadi pengetatan kebijakan moneter sebagai respon terhadap tekanan inflasi yang telah melebihi perolehan risiko harga aset di beberapa negara (lihat Grafik 1.15)

Grafik 1.15 Indeks Kondisi Finansial Global



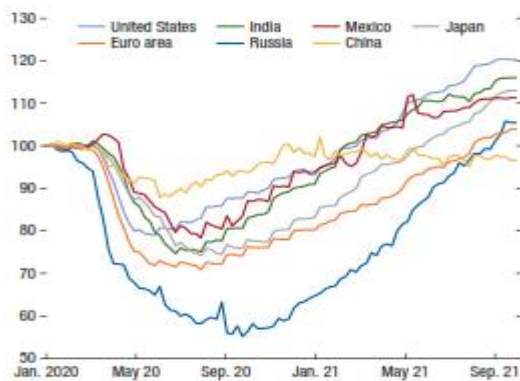
Sumber: IMF, 2021

Keuntungan perusahaan secara global mengalami *rebound* dengan naik sebesar 15%

di tahun 2021, bahkan di beberapa negara telah melebihi tingkat sebelum pandemi (lihat Grafik 1.17). Di sisi lain, neraca perusahaan juga mengalami penguatan secara umum. Kondisi ini tidak terlepas dari dukungan fiskal dan moneter yang tepat sasaran di banyak negara, sehingga dapat mencegah kebangkrutan di sektor bisnis. Kualitas kredit di pasar surat hutang spekulatif juga terus mengalami penguatan, dengan tingkat kebangkrutan diekspektasikan tetap rendah.

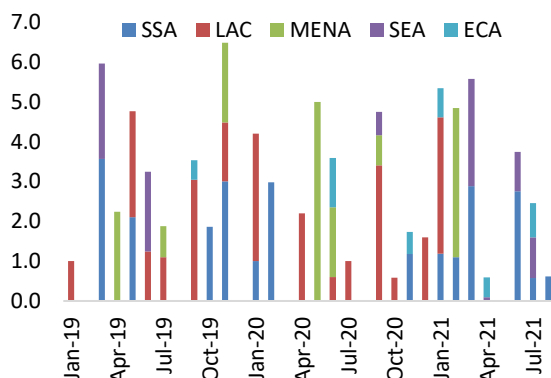
Grafik 1.16 Rasio Pendapatan per Saham Global

Januari 2020 = 100



Sumber: IMF, 2021

Grafik 1.17 Penerbitan Surat Hutang Hard Currency di Kelompok Negara Berkembang



Sumber: IMF, 2021

Keterangan: SSA = Sub-Sahara Africa; LAC = Latin America and the Carribean; MENA = Middle East and North Africa; SEA = South East Asia; ECA = Europe and Central Asia

Di kelompok negara berkembang, outlook terkait arus modal portofolio mengalami peningkatan, didukung oleh tren positif pemulihan ekonomi serta sentimen risiko global. Sejalan dengan tren tersebut, penerbitan surat hutang berdenominasi *hard currency* mengalami *rebound*, dengan beberapa penerbit berperingkat rendah kembali ke pasar modal (lihat Grafik 1.18). Namun demikian, surat hutang dengan denominasi mata uang lokal belum mampu pulih penjualannya.

Rasio kecukupan modal perbankan global mengalami perbaikan, merefleksikan resiliensi sektor tersebut serta dukungan pemerintah dan/atau otoritas moneter di masa pandemi. Stabilitas tersebut mendukung peran penting sektor perbankan global dalam mendukung arus aliran kredit ke berbagai dunia.

Meskipun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, peningkatan kasus kembali setelah Musim Panas serta kemunculan varian baru COVID-19 dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi yang telah dibuka di sebagian negara. Kedua, tidak meratanya pemulihan ekonomi terutama di negara berkembang juga turut menjadi perhatian investor di paruh kedua 2021 ini.

Ketiga, risiko dari peningkatan inflasi seiring dengan pemulihan ekonomi secara umum dan penguatan harga komoditas termasuk energi. Tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh disrupsi rantai suplai dan logistik yang masih berlangsung sejak puncak pandemi hingga saat ini. Meskipun kondisi moneter saat ini masih relatif akomodatif, tekanan inflasi dapat mengubah posisi kebijakan moneter menjadi lebih ketat di masa mendatang.

Lebih spesifik, harga/inflasi di AS yang mungkin terus naik, dapat berimplikasi pada kebijakan suku bunga The Fed yang nantinya

dapat mempengaruhi arus modal ke negara-negara berkembang. Peningkatan inflasi di AS sendiri telah meningkatkan suku bunga surat hutang AS, sehingga dapat mendorong peningkatan biaya kredit di banyak negara.

Selain tiga risiko utama tersebut, beberapa risiko lain yang dapat mempengaruhi stabilitas di pasar finansial antara lain adalah eskalasi tensi geopolitik AS-Tiongkok, gangguan di sektor energi global secara tiba-tiba, pasar yang terkonsentrasi, hingga peningkatan aset kripto yang pesat.



SEJARAH DAN KEANGGOTAAN G20

G20 merupakan forum ekonomi yang beranggotakan 19 negara, Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). Secara kolektif G20 mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pembentukan forum ini dilatarbelakangi oleh Krisis Keuangan Global tahun 1997-1999. Pada saat itu dalam pertemuan negara-negara maju anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis), para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyarankan untuk mengadakan pertemuan yang melibatkan negara-negara berkembang. Alasannya adalah pertemuan G7 saat itu dianggap kurang efektif jika tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain. Dengan melibatkan negara-negara berkembang keputusan-keputusan yang dibuat akan memiliki pengaruh yang lebih besar, serta menjadi media untuk mendengarkan kepentingan-kepentingan yang belum tercakup dalam kelompok G7. Sejak saat itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Negara-negara yang tergabung dalam G20 yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Britania Raya, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. KTT G20 pertama kali

diselenggarakan pada tanggal 14 - 15 November 2008, di mana Presiden Amerika Serikat saat itu mengundang para pemimpin negara-negara G20 untuk membahas krisis keuangan di Amerika Serikat yang berdampak pada kondisi keuangan global. Selanjutnya KTT G20 diselenggarakan setiap tahun dengan presidensi (tuan rumah) KTT adalah rotasi dari negara-negara anggotanya. KTT G20 kedua dilaksanakan pada 1 - 2 April 2009 di London. KTT G20 selanjutnya diadakan di Pittsburg, Amerika Serikat (2009); Toronto, Kanada (2010); Seoul, Korea (2010); Cannes, Prancis (2011); Los Cabos, Mexico (2012); St. Petersburg, Rusia (2013); Brisbane, Australia (2014); Antalya, Turki (2015); Hangzhou, RRT (2016); Hamburg, Jerman (2017); Buenos Aires, Argentina (2018); Osaka, Jepang (2019); Riyadh, Arab Saudi (2020); Roma, Italia (2021). Dalam perjalanannya, pertemuan G20 menjadi forum konsultasi dan kerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional, kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional serta upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara.

Agenda-agenda prioritas telah berkembang dari waktu ke waktu sejak KTT Washington pada tahun 2008. Isu-isu baru kemudian bertambah pada KTT-KTT selanjutnya. Pada KTT London bulan April 2009, isu ketenagakerjaan dimasukkan dalam agenda prioritas yang kemudian terus dibahas dalam KTT tahun-tahun selanjutnya (kecuali KTT

Seoul, September 2009). Isu ketahanan energi, isu keuangan inklusif, dan isu pembangunan mulai masuk dalam pembahasan di KTT Toronto bulan Juni 2010. Isu pemberantasan korupsi mendapat perhatian besar pada KTT di Seoul bulan November 2010. Isu perpajakan internasional menjadi agenda penting dalam pembahasan KTT Cannes bulan November 2011. Kemudian, pada tahun-tahun selanjutnya isu pertanian, ekonomi digital, perubahan iklim, dan pendidikan diangkat pada KTT-KTT selanjutnya. Tantangan global yang terus berkembang membuat pembahasan prioritas-prioritas G20 tidak hanya pada isu keuangan dan ekonomi, melainkan juga isu non-keuangan (Sumber: sherpag20indonesia.ekon.go.id)

PRESIDENSI G20 INDONESIA

Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya (disebut Troika) secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20. Pada tanggal 22 November 2020, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 tahun 2022 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi. Kemudian pada 31 Oktober 2021, Indonesia secara resmi telah menerima penyerahan sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dari Italia sebagai Presidensi G20 tahun 2021. Dengan demikian Indonesia secara efektif menjadi Presidensi G20 2022 pada 1 Desember 2021. Sementara itu, KTT G20 tahun 2022 direncanakan akan diselenggarakan pada 30-31 Oktober 2022.

Sebagai Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia mengangkat tema utama yaitu *Recover Together, Recover Stronger*. Tema tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa negara-negara anggota G20 harus bekerjasama untuk pulih dari pandemi COVID-19 baik dalam aspek kesehatan

maupun ekonomi. Indonesia berkomitmen untuk mencapai kesepakatan terkait pertumbuhan yang inklusif, berorientasi pada Sumber Daya Manusia, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tema yang diusung didukung oleh lima pilar yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan ketahanan dan stabilitas, pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, membangun lingkungan kondusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan penguatan kepemimpinan kolektif global. Kelima pilar tersebut mencakup berbagai isu prioritas yang akan dibahas dalam setiap *working group dan engagement group*.

KEGIATAN DAN ISU PRESIDENSI G20 INDONESIA

Selama masa kepemimpinan Indonesia sebagai Presidensi G20 sejak 1 Desember 2021 hingga November 2022, akan terdapat banyak pertemuan baik tingkat kepala negara, tingkat menteri dan gubernur bank sentral, tingkat *sherpa* dan *finance deputies*, tingkat *working group* dan *engagement group*, hingga *side event*, baik dalam bentuk fisik maupun *hybrid*. Rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia diperkirakan akan mencakup lebih dari 120 pertemuan yang melibatkan setidaknya 21 K/L dan berbagai lembaga non-pemerintah. Pertemuan tersebut akan diadakan di berbagai daerah di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan sarana dan prasarana serta protokol kesehatan. Selama masa presidensi, Indonesia berperan dalam menentukan isu prioritas serta memimpin pertemuan di berbagai tingkatan. Pertemuan ini dilakukan secara berjenjang melalui dua jalur, yaitu Jalur Keuangan (*Finance Track*) dan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*).

Finance Track yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia merupakan jalur yang fokus pada isu

makroekonomi, fiskal, moneter, dan keuangan. Untuk Presidensi Indonesia tahun depan, *Finance Track* akan mengangkat tujuh agenda utama: 1) *exit strategy* dalam mendukung pemulihan ekonomi, 2) upaya mengatasi dampak permanen pandemi dalam perekonomian untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan, 3) mata uang digital bank sentral, 4) keuangan berkelanjutan, 5) sistem pembayaran di era digital, 6) inklusi keuangan, dan 7) perpajakan internasional.

Selanjutnya, *Sherpa Track* yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri merupakan jalur yang fokus pada isu non-keuangan. Isu tersebut di antaranya pembangunan, perdagangan-investasi-industri, ekonomi digital, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan perubahan iklim, pertanian, pariwisata, anti korupsi, dan pemberdayaan perempuan. Pada pembahasannya, jalur ini terdiri dari 10 *working group*, 1 *task force*, dan 1 *initiative* yang diampu berbagai K/L terkait, serta 10 *engagement group* yang diikuti oleh berbagai lembaga non-pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing jalur di atas berjalan secara paralel dan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan presidensi. Isu-isu yang diangkat dari setiap jalur akan dibahas secara berjenjang mulai dari pertemuan tingkat *working group* dan diakhiri dengan KTT. Dari pertemuan tersebut secara berjenjang juga akan dihasilkan mulai dari konsep kesepakatan (*communiqué*) hingga kesepakatan aksi kebijakan berdasarkan isu-isu prioritas yang akan disepakati pada KTT oleh setiap Kepala Negara anggota G20.

MANFAAT PRESIDENSI G20 INDONESIA

Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam

mendukung pemulihan ekonomi nasional. Melalui presidensi, Indonesia mendapatkan kesempatan dalam memimpin pembahasan tata kelola global di sejumlah isu penting. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari proses pembangunan negara lain sehingga dapat menjadi masukan dalam kebijakan pembangunan Indonesia ke depannya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia baik di bidang ekonomi, pembangunan sosial, dan juga politik. Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, serta penyerapan tenaga kerja hingga 33 ribu di berbagai sektor.

Potensi manfaat strategis lainnya yaitu peluang kerja sama baik di bidang investasi maupun perdagangan dengan negara anggota G20 lain. Melalui kepemimpinan ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk *showcase* keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja dan *Sovereign Wealth Fund* yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor global. Selanjutnya, dari sisi sosial budaya Pemerintah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di sektor pariwisata, revitalisasi daerah dan promosi sektor pariwisata, serta eksposur potensi budaya melalui keterlibatan UMK.

Kontributor

Kusmawati Limbongan dan Wina Andari
(Analisis Kebijakan Ahli Pertama)

2

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

**PERTUMBUHAN
EKONOMI INDONESIA**

INFLASI

KONDISI MONETER

KONDISI FISKAL

KONDISI NERACA PEMBAYARAN

PERKEMBANGAN INVESTASI

**TOPIK SPESIAL: PERCEPATAN DIGITALISASI UMKM
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL**

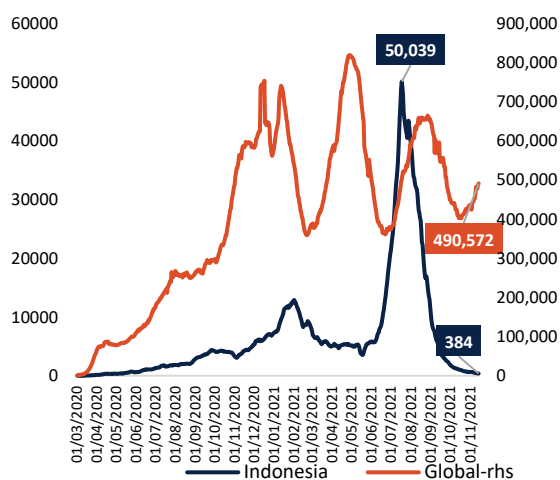


Photo by Tech Daily on Unsplash



Sejak awal tahun 2020, perekonomian Indonesia dan berbagai negara lainnya telah terdisrupsi akibat adanya pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021, harapan baru bagi perekonomian Indonesia sudah mulai tampak seiring dengan keberhasilan penanganan pandemi serta akselerasi vaksinasi COVID-19. Berdasarkan data hingga 15 November 2021, kasus harian covid-19 global mulai mengalami peningkatan. Sementara Indonesia terus melandai pasca puncak gelombang kedua covid-19 dengan kasus aktif Indonesia yang menurun dari 574 ribu (24 Juli-21) menjadi 8,5 ribu (15 Nov-21). Hal ini disebabkan karena penerapan strategi penanganan covid dari hulu ke hilir yang kemudian efektif menurunkan kasus aktif, kematian, dan *reproduction rate*

Grafik 2.1 Perkembangan Kasus Aktif COVID19 Indonesia dan Global

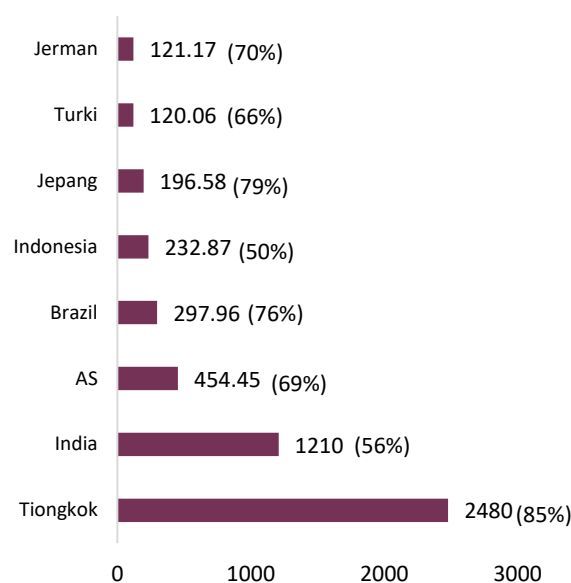


Sumber : CEIC, 2021 (Per 15 November 2021)

Melandainya kasus aktif di Indonesia juga disebabkan oleh akselerasi vaksinasi. Hingga 25 November 2021, tercatat dari total sasaran 208.265.720 sudah divaksin 65.68% dosis 1 dan 44.27% dosis 2. Pada Agustus 2021, juga telah dilaksanakan booster (dosis 3) untuk SDM Kesehatan. Untuk total vaksinasi, Indonesia menempati urutan ke 5 terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Brazil. Total dosis

vaksinasi di Indonesia lebih tinggi dari Turki, Jerman, maupun Jepang sebagaimana terlihat pada grafik 2.2. Namun demikian, secara persentase masih lebih rendah dari ketiga negara tersebut dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak dibandingkan ketiga negara tersebut.

Grafik 2.2 Total Dosis Vaksinasi Indonesia dan Negara lainnya (Juta)



Ket : (persentase (%) dari total populasi)

Sumber: Our World in Data COVID-19, Worldometer (Per 27 November 2021)

Kedepannya, vaksinasi diharapkan dapat semakin cepat dan masif dilakukan sehingga dapat meningkatkan ekspektasi positif terhadap perekonomian. Disisi lain pemerintah akan terus melanjutkan berbagai kebijakan dalam rangka menangani perkembangan kasus COVID-19 termasuk mengantisipasi berkembangnya varian baru virus COVID-19, sehingga tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi.

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Kinerja perekonomian domestik membaik secara bertahap. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kembali membaiknya



mobilitas masyarakat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas sebagai dampak respons penanganan Covid-19 yang semakin baik. Pada periode Agustus hingga awal September 2021, aktivitas ekonomi domestik berangsur membaik, setelah mengalami perlambatan pada Juli 2021.

Optimisme terhadap perbaikan kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2021 mulai terlihat sejak adanya pertumbuhan positif pada triwulan II 2021 sebesar 7,07% (yoy). Kinerja tersebut melanjutkan perbaikan yang telah terjadi pada triwulan I 2021 sebesar -0,74 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan IV 2004 sebesar 7,16% (yoy). Pertumbuhan ini telah menyebabkan nilai PDB riil pada triwulan II telah melampaui nilai PDB riil pada triwulan IV 2019, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Perbaikan tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat sebagai dampak respons penanganan Covid-19 yang semakin baik.

Proses pemulihan yang sudah berjalan baik di semester I, sedikit terhambat karena adanya peningkatan kasus Covid-19 varian delta di awal triwulan III-2021. Kasus positif Covid-19 di Indonesia sempat mencapai titik tertinggi sebanyak 574 ribu kasus pada tanggal 24 Juli 2021. Seiring efektivitas pelaksanaan intervensi pemerintah melalui pelaksanaan PPKM leveling dan percepatan pelaksanaan vaksin, jumlah kasus berangsur-angsur turun, dan telah kembali ke level di bawah rata-rata kasus aktif 100 ribu pada akhir September 2021. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2021 mengalami perlambatan menjadi sebesar 3,51% yoy.

Upaya penanganan COVID-19 sejalan dengan ketersediaan vaksin akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional tahun 2021. Selain itu, prospek membaiknya

perekonomian nasional juga didukung oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta penguatan reformasi struktural yang akan berlanjut dalam rangka membangun pondasi bagi pembangunan.

Produk Domestik Bruto (PDB) Berdasarkan Lapangan Usaha

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,07% (yoy), setelah sebelumnya selalu tumbuh positif pasca krisis ekonomi tahun 1998. Namun apabila dilihat berdasarkan lapangan usaha (sektor), pada tahun 2020 terdapat beberapa sektor yang mampu tumbuh positif, sehingga menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi yakni pertanian, infokom, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa pendidikan, pengadaan air, dan *real estate*.

Pada tahun 2021, optimisme perbaikan pertumbuhan ekonomi terus berlanjut. Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 7,07% (yoy) tumbuh positif untuk yang pertama kalinya pasca adanya pandemi COVID-19. Pertumbuhan tertinggi utamanya terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan mencapai 25,10%.

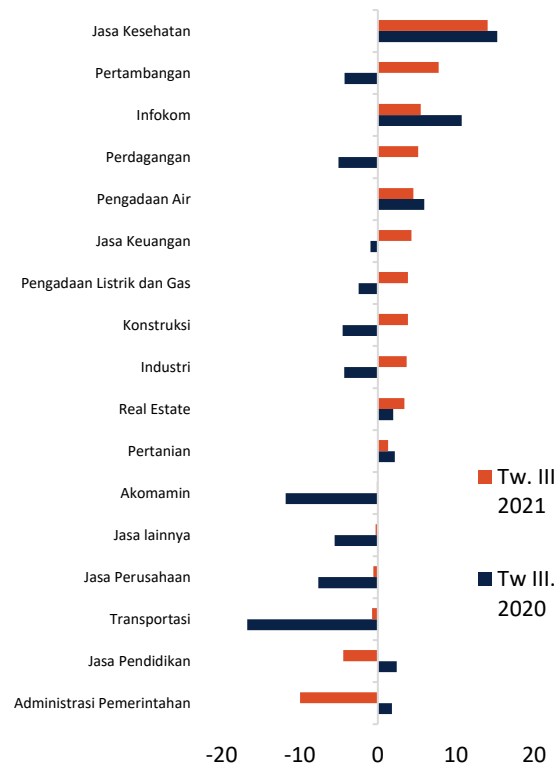
Pertumbuhan positif terus berlanjut, hingga pada triwulan III 2021 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,51%. Pada periode ini, sektor yang tumbuh signifikan adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 14,06%; diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 7,78%.

Selain itu sektor yang tetap tumbuh positif dan signifikan pada tahun triwulan III 2021 yakni sektor informasi dan komunikasi (infokom) yang mampu tumbuh sebesar 5,51% (yoy) disebabkan oleh transformasi digital industri musik dan film serta pemberlakuan *work from home* (WFH) dan *school from home* (SFH) yang memicu



peningkatan *traffic* data internet, belanja iklan digital, jumlah pelanggan TV berbayar, dan bisnis digital yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna *website* dan *hosting*.

Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (% , yoy)



Sumber : BPS, 2021

Sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi besar terhadap PDB. Namun demikian, sektor ini menjadi sektor yang mengalami tantangan terbesar dari pandemi COVID-19. Proses pemulihannya membutuhkan dukungan stimulus fiskal dan nonfiskal untuk mengembalikan tingkat kapasitas produksi seperti sebelum pandemi, dan sekaligus memberikan fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang. Pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 3,68%, utamanya disebabkan oleh peningkatan kinerja beberapa industri pengolahan nonmigas yang didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri.

Kemenko Perekonomian memandang arah pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2021 hingga tahun 2022 akan tetap pada jalur pertumbuhan yang positif. Tahun 2022 akan menjadi tahun pemantapan pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan pemerintah akan diarahkan pada perbaikan fundamental dan menyeluruh untuk menyediakan fondasi yang kokoh bagi kebangkitan perekonomian Indonesia.

Produk Domestik Bruto (PDB) Berdasarkan Pengeluaran

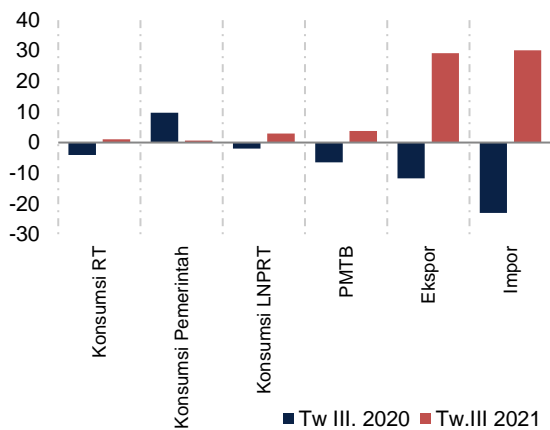
Pada tahun 2021, Pemerintah kembali melakukan strategi yang mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan agar aspek kesehatan maupun ekonomi dapat saling beriringan. Pada triwulan III 2021, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,03% (yoy) melambat dibanding pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2021 sebesar 5,96%, namun menguat dibanding triwulan III 2020 -4,05%.

Positifnya konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2021, utamanya didorong oleh pengeluaran untuk kelompok restoran dan hotel sebesar 2,48%; kesehatan dan pendidikan sebesar 2,44%; serta komponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 2,29%. Selain itu, hal ini didukung oleh penjualan eceran untuk komoditas makanan, minuman, dan tembakau tumbuh sebesar 5,79%, menguat dibanding triwulan III 2020 yang hanya tumbuh sebesar 1,24%. Pemerintah memperkirakan hingga akhir tahun 2021, konsumsi masyarakat akan terus pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Seiring dengan hal tersebut, pada tahun 2022 konsumsi masyarakat



diperkirakan akan mengalami *rebound*, karena daya beli masyarakat yang meningkat dan tingkat inflasi yang rendah. Faktor lain yang akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat adalah *revenge spending*, seiring dengan pulihnya tingkat keyakinan masyarakat, terutama kelompok kelas menengah ke atas.

Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (% yoy)



Sumber : BPS, 2021

Konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 0,66%. Pertumbuhan ini menurun dibandingkan triwulan III 2020 sebesar 9,76%. Penurunan ini disebabkan oleh melambatnya realisasi belanja pemerintah pusat (APBN), sebagai dampak kontraksinya belanja pegawai yang disebabkan oleh pembayaran THR dan gaji ke-13 yang sudah dilakukan pada triwulan II 2021.

Pada tahun 2022, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh relatif melambat, namun diharapkan tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan secara bertahap melakukan proses konsolidasi. Konsumsi pemerintah yang relatif melambat juga didorong, salah satunya oleh realokasi belanja ke belanja yang lebih produktif.

Kinerja PMTB atau investasi pada tahun triwulan III 2021 tumbuh sebesar 3,74% (yoy) dibandingkan triwulan III 2020 yang berkontraksi sebesar -6,48% (yoy). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan barang modal jenis mesin dan perlengkapan, peralatan lainnya, dan kendaraan masing – masing sebesar 11,54%; 9,97%; dan 9,01%. Pertumbuhan investasi ini, sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha.

Pemerintah juga terus mengawal realisasi berbagai proyek terkait infrastruktur industri dan pariwisata melalui penyelesaian *debottlenecking* operasional dan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi agar tidak berpindah ke negara lain. Pemerintah dan pihak swasta harus terus bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran COVID-19, pelaksanaan vaksinasi, keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter, implementasi reformasi struktural seperti UU Cipta Kerja merupakan faktor kunci yang akan mendorong investasi Indonesia tahun 2022.

Kinerja ekspor barang dan jasa pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 29,16% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan III 2020 yang berkontraksi 11,66%. Meningkatnya kinerja ekspor dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas migas karena prospek permintaan global yang membaik. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perekonomian sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, kinerja ekspor diperkirakan terus meningkat seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi global.

Pada tahun 2022, kinerja ekspor diperkirakan akan membaik seiring dengan proyeksi perekonomian global yang mulai bangkit akibat penanganan pandemi COVID-19 yang terkendali serta berbagai stimulus yang



diberikan oleh pemerintah. Dari dalam negeri, pemerintah juga tetap melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor, seperti fasilitasi perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi yang efektif serta optimalisasi pemanfaatan PTA/FTA/ CEPA. Namun, arah perekonomian global pasca pandemi COVID-19 tahun 2022 yang cenderung kepada *green recovery* perlu diantisipasi karena dapat menyebabkan penurunan harga komoditas batu bara dan kelapa sawit.

Pertumbuhan Ekonomi Spasial

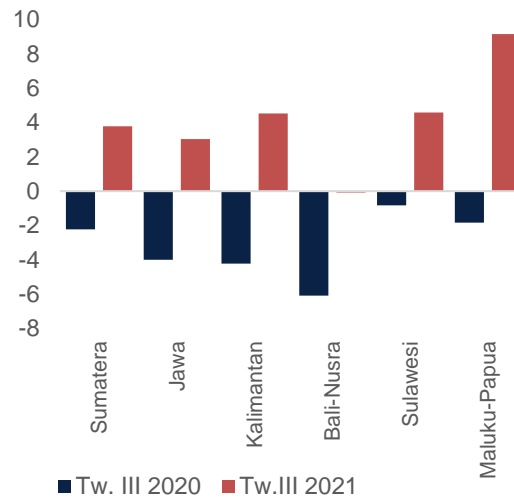
Pada triwulan III 2021, hampir seluruh wilayah mengalami pertumbuhan yang positif kecuali wilayah Bali-Nusra yakni Sumatera (3,78%); Jawa (3,03%); Kalimantan (4,52%); Sulawesi (4,5%); serta Maluku-Papua (9,15%). Kondisi ini disebabkan oleh adanya perbaikan ekonomi yang ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam (SDA) di berbagai wilayah yang tetap kuat seiring permintaan eksternal yang menguat, terutama dari Tiongkok dan India, disertai harga komoditas yang meningkat.

Sementara pada wilayah Bali – Nusra, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 kembali berkontraksi sebesar 0,09% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya telah tumbuh positif sebesar 2,83%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kegiatan sektor pariwisata yang merupakan sektor penopang ekonomi di wilayah tersebut akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Secara keseluruhan 2021, perbaikan ekonomi di seluruh wilayah diperkirakan berlanjut karena turunnya penyebaran COVID-19 pasca penerapan PPKM pada triwulan III 2021 serta akselerasi vaksinasi yang mendukung pemulihan ekonomi di seluruh daerah, baik dari sisi permintaan maupun sisi produksi. Selain itu, permintaan eksternal yang tetap

kuat juga diperkirakan akan mendorong kinerja sektor yang berorientasi ekspor diberbagai wilayah.

Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Spasial (%)



Sumber : BPS, 2021

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2021, pemantapan pemulihan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi wilayah pada tahun 2022 akan dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas dan perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah mendorong realisasi investasi khususnya di kawasan-kawasan strategis melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS).

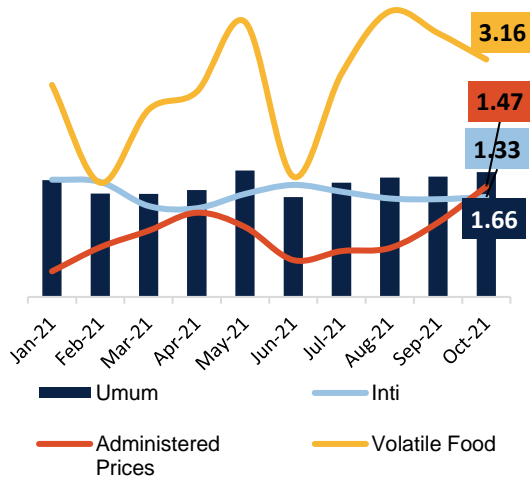
INFLASI

Kebijakan pengendalian inflasi hingga akhir tahun 2021 tetap diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.



Inflasi IHK hingga Oktober 2021 tercatat 1,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,60% (yoy). Apabila dilihat komponennya, inflasi inti sebesar 1,33% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan September sebesar 1,30% (yoy). Meskipun mengalami peningkatan namun inflasi inti masih tergolong rendah karena pengaruh permintaan domestik yang belum cukup kuat serta deflasi komoditas emas perhiasan yang berlanjut seiring perlambatan inflasi emas global.

Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi yoy (%)



Sumber : BPS, 2021

Kelompok *volatile food* mengalami inflasi 3,16% (yoy) pada Oktober 2021, lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,51% (yoy). Kondisi ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah dan minyak goreng seiring berlalunya musim panen serta berlanjutnya kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) di pasar global. Sementara, kelompok *administered prices* pada Oktober 2021 mencatat inflasi sebesar 1,47% (yoy), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,99% (yoy). Hal ini disebabkan oleh inflasi angkutan udara sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan

mobilitas dan berlanjutnya dampak kenaikan cukai tembakau.

Pada tahun 2022, kebijakan pengendalian inflasi akan difokuskan pada 7 langkah, yakni:

- 1) Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas pangan strategis;
- 2) Optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra produksi pangan atau *food estate*;
- 3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga;
- 4) Penguatan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk kelancaran distribusi;
- 5) Percepatan penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir;
- 6) Peningkatan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian; serta
- 7) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam semua aspek (pasokan, distribusi, dan komunikasi kebijakan inflasi).

Melalui implementasi berbagai langkah tersebut, maka diharapkan inflasi akan tetap stabil pada rentang 2,0-4,0% untuk mendukung pemulihan perekonomian pasca pandemi.

KONDISI MONETER

Kebijakan moneter Indonesia hingga pertengahan Oktober 2021 tetap diarahkan pada kebijakan yang akomodatif di tengah berlanjutnya pelonggaran likuiditas. Pelonggaran ini ditunjukkan melalui BI 7 Days Repo Rate (BI7DRR) yang tetap pada level 3,50%, suku bunga Deposit Facility



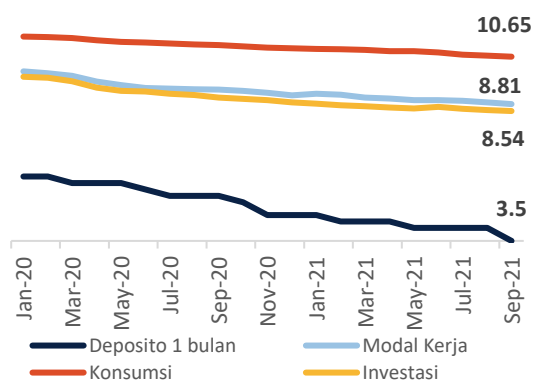
sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Tabel 2.1 Perkembangan BI7DRR

Tanggal		BI7DRR (%)
2019	18 Juli	5.75
	22 Agustus	5.50
	19 September	5.25
	24 Oktober	5.00
2020	20 Februari	4.75
	19 Maret	4.50
	18 Juni	4.25
	16 Juli	4.00
	19 November	3.75
2021	18 Februari	3.50

Sumber : Bank Indonesia, 2021

Grafik 2.7. Suku Bunga Kredit Perbankan



Sumber : Bank Indonesia dan CEIC, 2021

Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun walaupun masih terbatas. Per September 2021, suku bunga deposito 1 bulan telah menurun sebesar 50 basis poin (bps) ke level 3,50%. Sementara penurunan suku bunga kredit masih cenderung terbatas.

Dari sisi jenis penggunaan kredit, suku bunga kredit modal kerja bank umum per September 2021 berada pada level 8,81% turun 6 bps dibandingkan bulan sebelumnya

sebesar 8,92%. Sementara suku bunga kredit investasi pada bank umum pada bulan September 2021 berada pada level 8,54% turun 4 bps dibandingkan periode sebelumnya sebesar 8,58%.

Untuk mendorong kembali roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah kembali melanjutkan skema penjaminan kredit modal kerja untuk pelaku usaha korporasi maupun UMKM. Penjaminan kredit modal kerja korporasi diberikan kepada pelaku usaha di sektor riil maupun sektor keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rp10 miliar dan omzet tahunannya di atas Rp50 miliar yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19.

Sementara, untuk penjaminan kredit modal kerja UMKM, Pemerintah menjamin pelaku usaha baik berbentuk usaha perseorangan, koperasi, dengan plafon pinjaman maksimal Rp10 miliar, namun kemudian Pemerintah kembali merelaksasi dengan meningkatkan plafon pinjaman sebesar Rp10 miliar sehingga total plafon pinjaman yang mendapatkan fasilitas penjaminan adalah maksimal Rp20 miliar.

Skema penjaminan berikut relaksasinya tersebut diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit modal kerja terhadap pelaku usaha UMKM maupun korporasi, sehingga dapat kembali menggerakkan roda perekonomian dari sisi *supply*. Kebijakan moneter bersinergi dengan stimulus fiskal Pemerintah diharapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan UMKM dan korporasi.

Nilai Tukar

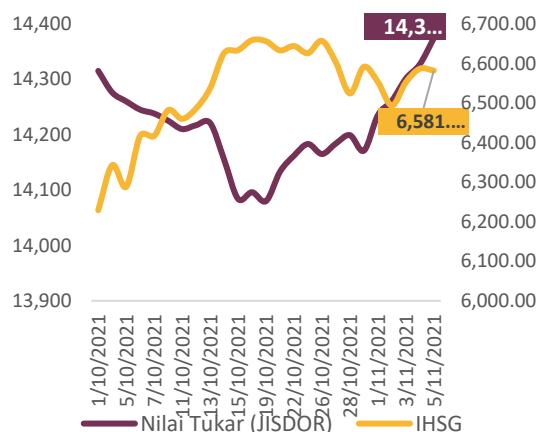
Nilai tukar rupiah pada 5 November 2021 berada pada level Rp14.357 melemah



dibandingkan awal bulan November sebesar Rp14.235. Kondisi ini merupakan respon pasar terhadap keputusan kebijakan terbaru dari The Fed yang akan memulai pengurangan aset atau *tapering off* mulai bulan November ini.

Pada pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 November 2021, melemah terbatas yakni turun 0,15% menuju posisi 6.581. Kondisi ini disebabkan karena perilaku investor yang cenderung *wait and see* atas kebijakan *tapering off* oleh The Fed. Namun demikian, penanganan pandemi COVID-19 yang terkendali serta akselerasi vaksinasi dalam negeri akan mampu menjaga optimisme investor terhadap kondisi perekonomian domestik.

Grafik 2.8 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan IHSG



Sumber : CEIC, 2021

Kebijakan nilai tukar rupiah tahun 2022 diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan sehingga dapat menjaga stabilitas rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga tingkat inflasi dan stabilitas sistem keuangan.

Strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan dengan melanjutkan

bauran kebijakan, sebagai berikut (1) memperkuat *triple intervention* di pasar valas; (2) memperkuat strategi operasi moneter; (3) menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil; (4) menetapkan tingkat suku bunga BI7DRR yang optimal; (5) mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter; serta (6) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Grafik 2.9 Perkembangan Yield SBN Tenor 10 Tahun



Sumber : Investing, 2021

Terkait *yield* SBN tenor 10 tahun, sejak awal tahun 2021 mulai berada kisaran 6%. Hingga 5 November 2021, *yield* SBN berada pada kisaran 6,21% meningkat dibandingkan pergerakan di akhir Oktober yang berkisar 6,15% hingga 6,17%. Volatilitas *yield* tenor 10 tahun tetap perlu diwaspadai dengan cara menjaga sentimen positif melalui berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Faktor yang menjadi daya tarik SBN Indonesia yakni *real yield* yang menarik di antara negara berkembang lainnya; *spread* antara obligasi bertenor 10 tahun Indonesia dengan AS masih cukup lebar; serta inflasi dan nilai tukar Rupiah yang relatif stabil, disertai *hedging cost* yang stabil di bawah 5%.



KONDISI FISKAL

Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk membatasi mobilitas dan kegiatan perekonomian. Dalam merespon dampak pandemi COVID-19, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical* yang ekspansif melalui berbagai stimulus ekonomi secara komprehensif untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan yang berdampak signifikan terhadap tumbuhnya perekonomian domestik serta mendorong sektor riil dan dunia usaha agar tetap berjalan.

Pada tahun 2021, Pemerintah mengarahkan APBN fokus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. APBN tahun 2021 telah didesain dengan spirit ekspansif untuk mendukung pemulihan dan penanganan pandemi, namun juga mulai konsolidasi untuk menyehatkan kembali APBN. Sejalan dengan hal tersebut, defisit anggaran hingga akhir tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.006,4 triliun atau setara 5,7% dari PDB, menurun dibandingkan realisasi defisit anggaran Tahun 2020 (LKPP Audited) sebesar Rp947,7 triliun atau 6,14% dari PDB.

Dari sisi pendapatan, pemerintah menargetkan pendapatan negara hingga akhir tahun 2021 mencapai Rp1.743,6 triliun. Hingga akhir September 2021, realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp1.354,83 triliun atau 77,70% dari target pada APBN 2021. Pendapatan negara tersebut utamanya diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.033,0 triliun atau sebesar 71,5% dari target APBN sebesar Rp1.444,5 triliun. Realisasi penerimaan Perpajakan tersebut tumbuh sebesar 15,8% (yoy) akibat pemulihan kondisi perekonomian yang menyebabkan meningkatnya kinerja berbagai sektor usaha serta perbaikan konsumsi masyarakat.

Selain itu, peningkatan penerimaan pajak juga disebabkan karena pemerintah lebih selektif dan terukur dalam melanjutkan pemberian insentif perpajakan. Meskipun demikian, dalam rangka mendorong konsumsi rumah tangga, maka pemerintah telah menambah jumlah Klasifikasi Lapangan Usaha yang mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; pembebasan PPh Pasal 22 impor; serta pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Selain itu, dalam rangka mendorong daya beli masyarakat berpenghasilan menengah yang saat ini mendominasi komposisi masyarakat Indonesia, Pemerintah telah mengesahkan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021. Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), nilai Penghasilan Kena Pajak pada lapisan pertama diperlebar menjadi Rp60 juta setahun. Hal ini menyebabkan wajib pajak yang sebelumnya mempunyai Penghasilan Kena Pajak setahun Rp60 juta dikenakan 2 macam tarif (5% dari Rp50 juta dan 15% dari Rp10 juta), kini hanya dikenakan tarif 5%.

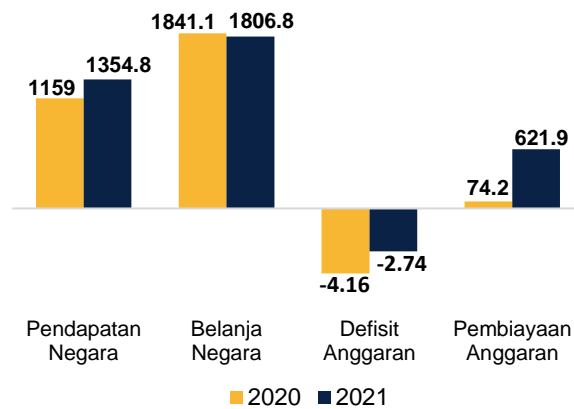
Pada tahun 2021 belanja negara hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp2.750,0 triliun atau 15,6% terhadap PDB. Belanja negara utamanya diarahkan yakni pertama, untuk melanjutkan penanganan kesehatan akibat COVID-19, utamanya peningkatan *supply side* dan akselerasi vaksinasi. Kedua, belanja negara juga diarahkan untuk melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong pemulihan antara lain melalui Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Pra kerja.

Ketiga, Pemerintah juga mengarahkan belanja negara untuk mendukung program/kegiatan pada sektor terdampak serta perluasan akses modal UMKM melalui penjaminan kredit modal kerja dan subsidi



bunga KUR. Hingga akhir September 2021, realisasi belanja negara mencapai Rp1.806,8 triliun (65,7% dari pagu APBN 2021) atau tumbuh negatif 1,9% (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2020, seperti terlihat pada Grafik 2.10.

Grafik 2.10. Realisasi APBN s.d. 30 September, 2020 – 2021 (triliun Rp)



Sumber : Kementerian Keuangan, 2021

Secara rinci, realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.265,33 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp541,47 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan September 2021 tumbuh sebesar 4,43 persen (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan September 2021 tumbuh positif ditopang program penanganan pandemi bidang kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat/dunia usaha, penyelesaian proyek infrastruktur, dan realisasi belanja BLU khususnya Kelapa Sawit.

Dalam rangka mendukung belanja negara di tengah pendapatan negara yang masih belum optimal akibat pandemi COVID-19, Pemerintah menargetkan pembiayaan anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp1.006,4 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp1.177,4 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir September 2021 mencapai Rp621,85 triliun

atau 61,79% dari target APBN yang didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp647,24 triliun (104,08% dari total pembiayaan).

Untuk pembiayaan triwulan IV 2021, Pemerintah akan terus melanjutkan pendalaman SBN untuk pasar domestik. Selain itu, pada tanggal 13 September 2021 pemerintah telah berhasil menerbitkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan tenor 12 tahun sebesar EUR500 juta. Ini merupakan sebuah langkah maju yang penting dalam komitmen Republik Indonesia untuk pencapaian SDGs, dan kemajuan besar untuk keuangan yang berkelanjutan.

KONDISI NERACA PEMBAYARAN

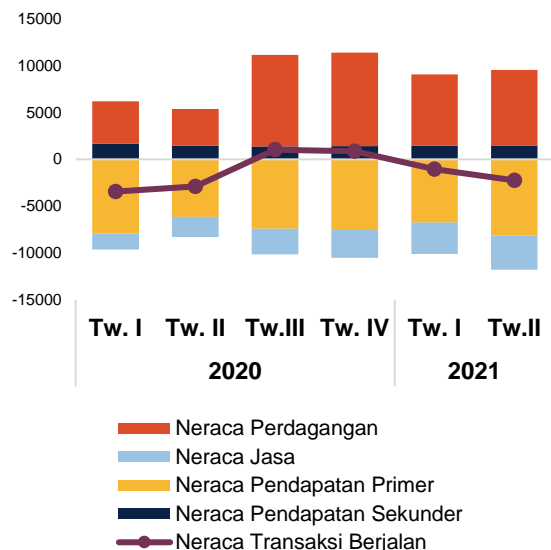
Neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2021 tetap baik ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan yang tetap rendah serta surplus transaksi modal dan finansial. Secara keseluruhan, NPI hanya defisit sebesar USD0,4 miliar pada triwulan II 2021. Pemulihan ekonomi global akibat adanya akselerasi vaksinasi diberbagai negara telah memberikan harapan baru bagi kinerja neraca pembayaran hingga akhir tahun 2021.

Pemerintah memprediksi neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan semakin membaik hingga akhir tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan diproyeksi tetap rendah hingga akhir tahun 2021 sebesar 1,7-2% dari PDB terutama didorong oleh peningkatan ekspor seiring dengan permintaan global yang mulai pulih dan harga komoditas ekspor yang meningkat, sementara di sisi lain kenaikan impor juga diprediksi akan terjadi sebagai akibat permintaan domestik yang meningkat. Hingga triwulan II 2021, neraca transaksi berjalan mencatat defisit sebesar



US\$ 2,2 miliar (0,8% dari PDB), meningkat dari defisit triwulan I 2021 sebesar USD1,1 miliar (lihat Grafik 2.11).

Grafik 2.11 Neraca Transaksi Berjalan



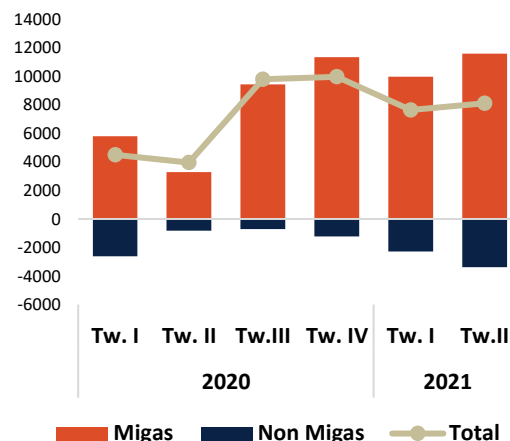
Sumber : Bank Indonesia, 2021

Neraca perdagangan pada triwulan II 2021 diperkirakan akan mencatat surplus sebesar US\$8,1 miliar, lebih tinggi dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar US\$7,6 miliar. Kinerja positif ini disebabkan oleh peningkatan ekspor nonmigas akibat akselerasi pertumbuhan ekspor riil dan peningkatan harga ekspor baik pada produk primer maupun manufaktur. Hingga akhir tahun 2021, kinerja positif ekspor akan terus berlanjut seiring dengan kebangkitan ekonomi global.

Pada tahun 2022, kinerja neraca perdagangan diperkirakan akan tetap positif mencapai US\$ 17,7 – 20,4 miliar, seiring dengan Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik serta semakin terkendalinya penanganan pandemi COVID-19 diberbagai negara. Kekhawatiran akan adanya varian baru virus COVID-19 bisa ditekan dan percepatan vaksinasi perlu terus dilakukan. Sesuai arahan Presiden bahwa target vaksinasi sampai akhir tahun 2021 adalah 70% untuk dosis 1 dan 60% untuk dosis

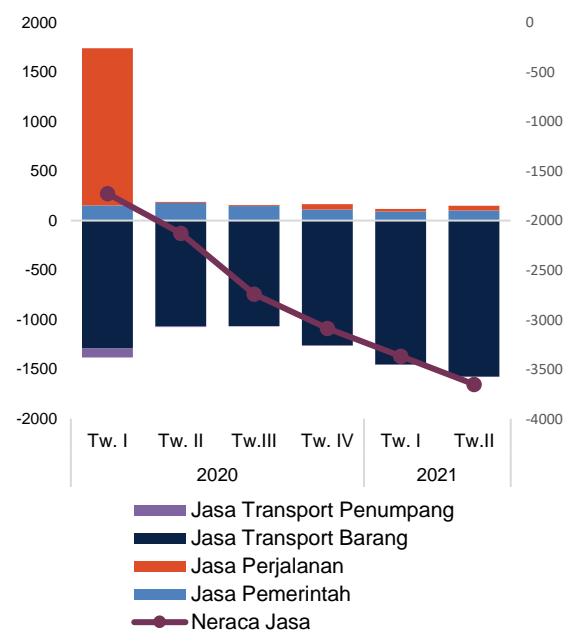
2, sehingga dengan capaian vaksinasi saat ini, diharapkan bisa meningkatkan kinerja neraca perdagangan.

Grafik 2.12 Neraca Perdagangan



Sumber : Bank Indonesia, 2021

Grafik 2.13 Neraca Jasa



Sumber : Bank Indonesia, 2021

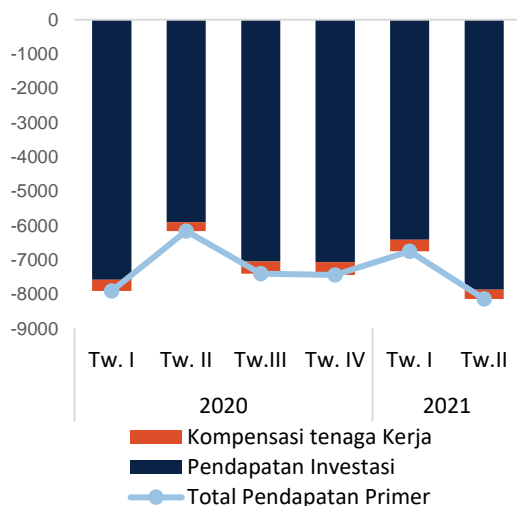
Di sisi lain, kinerja neraca jasa pada triwulan II 2021 tercatat mengalami defisit sebesar US\$3,7 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar US\$3,4 miliar. Defisit terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran jasa *freight* seiring dengan kenaikan impor barang. Selain itu, defisit neraca jasa



telekomunikasi, komputer, dan informasi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan defisit neraca jasa. Hal ini disebabkan tingginya permintaan atas jasa TIK seperti game online maupun jasa streaming berbayar.

Kinerja neraca pendapatan primer pada triwulan II 2021 menunjukkan perbaikan dengan defisit yang tercatat sebesar US\$1,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar US\$6,7 miliar. Kondisi ini disebabkan oleh pembayaran atas hasil investasi investor nonresiden baik investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya yang meningkat sebagaimana pola pembayaran dividen pada tahun – tahun sebelumnya. Positifnya kinerja neraca pendapatan primer diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2021, seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi.

Grafik 2.14 Neraca Pendapatan Primer

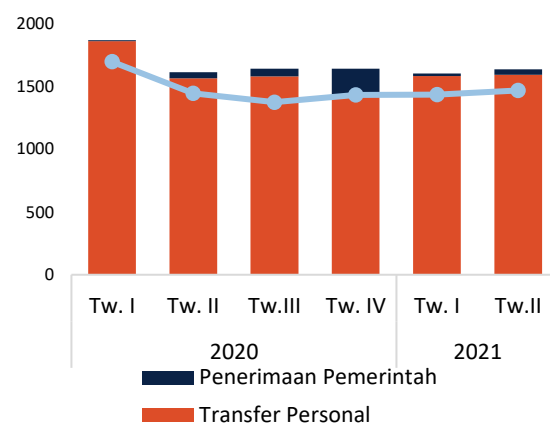


Sumber : Bank Indonesia, 2021

Pada tahun 2022, kinerja neraca pendapatan primer akan tetap positif seiring dengan semakin membaiknya pasar keuangan global, pemulihan ekonomi nasional, serta adanya reformasi regulasi dan kelembagaan yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian dalam negeri.

Neraca pendapatan sekunder pada triwulan II 2021 mencatat surplus sebesar US\$1,5 miliar, menurun dibandingkan surplus pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar US\$1,4 miliar. Kondisi ini disebabkan karena peningkatan *transfer personal* akibat adanya transaksi penerimaan maupun pembayaran. Selain itu faktor lain turut mendukung kenaikan ini adalah adanya tambahan penerimaan dana hibah Pemerintah. Hingga akhir 2021, adanya akselerasi vaksinasi di Indonesia termasuk beberapa negara lainnya diharapkan mampu meningkatkan remitansi pekerja migran Indonesia.

Grafik 2.15 Neraca Pendapatan Sekunder



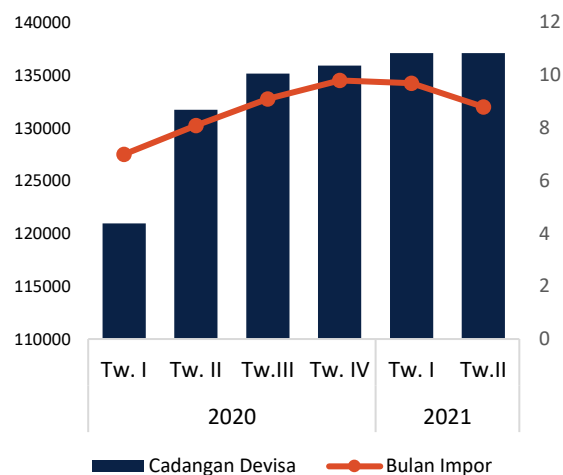
Sumber : Bank Indonesia, 2021

Posisi cadangan devisa hingga triwulan II 2021 tercatat sebesar US\$137 miliar atau setara dengan pembiayaan impor 8,8 atau 9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Cadangan devisa hingga akhir tahun 2021 diproyeksi akan tetap memadai (Grafik 2.16) dengan didukung prospek pemulihan ekonomi serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Di tengah kondisi perekonomian yang mulai menunjukkan perbaikan, Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menjaga cadangan devisa



dengan melakukan perjanjian penyediaan likuiditas perdagangan termasuk melakukan penarikan pinjaman serta mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Grafik 2.16 Posisi Cadangan Devisa



Sumber : Bank Indonesia, 2021

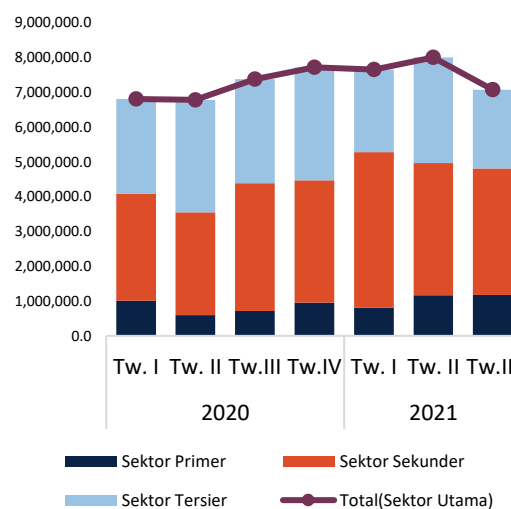
PERKEMBANGAN INVESTASI

Pada tahun 2021, Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp900 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berkomitmen memberikan fasilitas kemudahan berusaha, meningkatkan kepastian hukum, serta membangun pemusatan industri baik dalam bentuk kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri yang diharapkan menarik minat investor untuk berinvestasi pada sektor riil sehingga efek jangka panjangnya adalah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Implementasi reformasi struktural seperti penerbitan aturan turunan UU Cipta Kerja dan pembentukan *Indonesia Investment Authority* (INA) juga turut berpotensi mendorong peningkatan *ease of doing business* yang berdampak pada peningkatan investasi. Reformasi menjadi penting karena merupakan prasyarat dalam upaya peningkatan iklim investasi yang dibutuhkan

untuk memulihkan pertumbuhan, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing (*competitiveness*). Melalui penguatan PEN, percepatan vaksinasi, serta penguatan reform yang dilakukan Pemerintah maka kedepannya diharapkan akan memperkuat stabilitas perekonomian yang merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik investor.

Grafik 2. 17 Perkembangan Investasi Asing di Indonesia Berdasarkan Sektor (Ribu US\$)



Sumber: BKPM, 2021

Namun di sisi lain, perubahan pada kondisi tatanan perekonomian global tentunya dapat berpengaruh terhadap perspektif investor dan sektor prioritas investasi, kecenderungan investor yang menghindari risiko investasi atau bahkan *moderate*, kemudian menginvestasikan dananya pada skema atau instrumen-instrumen investasi yang *safe haven* merupakan isu yang perlu menjadi fokus Pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini. Penguatan fundamental perekonomian utamanya melalui perbaikan kondisi kesehatan serta perekonomian menjadi kunci untuk menghadapi isu – isu dan perubahan perilaku investor dalam berinvestasi.

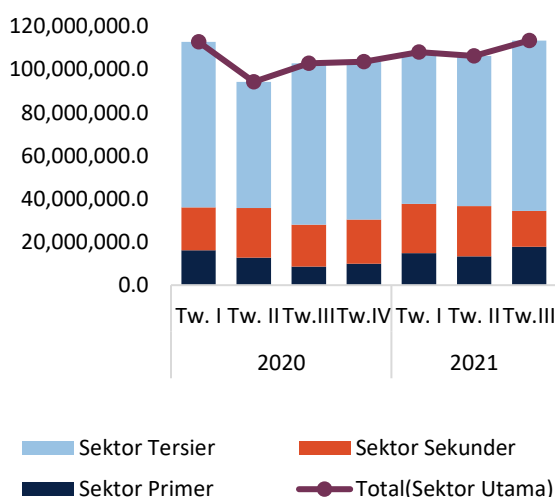
Hingga triwulan III 2021, capaian realisasi investasi adalah sebesar Rp659,4 triliun atau



sebesar 73,3% dari target pada tahun 2021. Apabila dilihat secara lebih rinci, realisasi penanaman modal asing (PMA) hingga triwulan III 2021 adalah sebesar Rp331,7 triliun (50,3% dari total investasi). Dari sisi sektoral, penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia didominasi terutama pada sektor industri logam dasar dan barang logam, listrik, gas dan air; serta transportasi, gudang dan telekomunikasi.

Dilihat dari asal negaranya, realisasi PMA didominasi oleh 5 negara yakni: Singapura, Tiongkok, Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang. Semakin bangkitnya kondisi perekonomian pada negara tersebut tentunya menjadi sebuah sinyal positif bagi peningkatan investasi asing di Indonesia di tahun 2022. Namun demikian, Indonesia yang menjadi salah satu negara tujuan investasi harus terus berupaya untuk menyampaikan sentimen positif kepada investor melalui stabilitas makroekonomi serta akselerasi vaksinasi COVID-19.

Grafik 2.18 Perkembangan Investasi Dalam Negeri Berdasarkan Sektor (juta Rupiah)



Sumber: BKPM, 2021

Sementara untuk investasi dalam bentuk PMDN, realisasinya hingga triwulan III 2021 mencapai Rp327,7 triliun (49,7% dari total investasi). Sektor tertier memberikan

kontribusi terbesar dengan mencapai 68,5% dari keseluruhan investasi dalam bentuk PMDN seperti yang terlihat pada Grafik 2.18. Beberapa sektor yang memiliki porsi terbesar antara lain sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi; konstruksi; dan sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran

Seiring dengan realisasi PMA maupun PMDN, secara keseluruhan dalam periode Januari – September 2021, penyerapan tenaga kerja Indonesia mencapai 912.402 orang, yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 465.286 orang (51,0%) dan proyek PMA sebanyak 447.116 orang (49,0%). Pada tahun 2022, investasi ditargetkan mencapai Rp1.200 triliun. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pencapaian target tersebut yakni dengan melakukan reformasi iklim investasi. Reformasi ini dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selain itu, keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 serta akselerasi vaksinasi juga turut menjadi kunci dalam rangka mencapai target kedepannya.

QRIS

PERCEPATAN DIGITALISASI UMKM DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



Di tengah Pandemi Covid-19, ekonomi digital ternyata mampu tampil sebagai kekuatan baru perekonomian nasional. Pada tahun 2020, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebagai yang terbesar di Asia Tenggara, mencapai USD 44 miliar, tumbuh 11% dari tahun sebelumnya. Tren pertumbuhan positif ekonomi digital juga terjadi akibat adanya pergeseran perilaku masyarakat yang semakin adaptif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan juga terjadinya pergeseran model bisnis. Hal ini terlihat dari (i) meningkatnya aktivitas belanja *online*; (ii) berkembangnya *Telemedicine* dan *e-Learning*; serta (iii) meningkatnya aktivitas layanan keuangan digital.

Data We Are Social dan Hootsuite (2021) mengkonfirmasi bahwa aktivitas belanja *online* terus mengalami kenaikan, dimana 93% pengguna internet di Indonesia melakukan pencarian produk atau layanan yang mereka butuhkan melalui *e-commerce*, dan dari jumlah tersebut 87,1% diantaranya melakukan pembelian secara *on-line*. Di samping itu, survei Katadata pada tahun 2020 juga memperlihatkan dampak positif *e-commerce* terhadap aktivitas perdagangan (termasuk oleh UMKM), antara lain: (i) penjualan yang melonjak sebesar Rp 36 triliun atau 26% dari rata-rata bulanan kuartal II-2019; (ii) transaksi harian naik menjadi 4,8 juta dari rata-rata Triwulan II 2019 (3,1 juta); (iii) konsumen baru yang pertama kali belanja *on-line* selama PSBB mencapai 51%;

(iv) serta volume permintaan yang meningkat 5-10 kali lipat.

Seperti kita ketahui, UMKM merupakan penyangga perekonomian Indonesia, dimana 99% dari jenis usaha di tanah air adalah UMKM dengan jumlah mencapai 64,2 juta unit. Masa pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran bagi kita, dimana adopsi teknologi digital sudah menjadi sebuah keharusan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha. Namun demikian, UMKM yang merupakan sokoguru perekonomian Indonesia, belum secara optimal memanfaatkannya. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2021), terdapat 94% UMKM tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usaha mereka; dan 80% diantaranya belum menggunakan internet. Baru sekitar 15,3 juta UMKM yang memanfaatkan *platform digital/e-commerce* dalam aktivitas bisnisnya.

Namun demikian, UMKM kita masih menghadapi berbagai permasalahan klasik, seperti: (i) Kurangnya inovasi dan penerapan teknologi; (ii) Laporan keuangan dan persyaratan agunan yang belum memadai untuk bisa memperoleh pembiayaan dari perbankan; (iii) Rendahnya produktivitas SDM; (iv) Produk branding dan strategi pemasaran yang harus diperbaiki; (v) Banyak dan rumitnya prosedur perizinan; (vi) Kualitas produk yang belum sesuai standar; serta (v) Minimnya literasi digital. Oleh karena itu, upaya mempercepat adopsi dan



transformasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital diharapkan bisa menjadi solusi yang mampu memperkuat ketahanan dan daya saing UMKM sehingga dapat berpartisipasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Hasil Survei Katadata Insight Center (Mei 2021) menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM memberikan banyak manfaat, antara lain membantu pemasaran produk UMKM dimasa pandemi; mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan UMKM melalui penggunaan *platform* pembayaran digital, serta meningkatkan akses pasar dan pelatihan pengembangan usaha.

Selanjutnya, terkait pembayaran digital, berdasarkan hasil survei OVO bersama CORE Indonesia (2021) diketahui bahwa 84% pelaku UKM yang sudah *go digital* merasa terbantu oleh adanya fasilitas pembayaran digital selama pandemi. Bahkan, 70% diantaranya mengalami peningkatan pendapatan perhari sejak memanfaatkan layanan keuangan digital. Diketahui pula bahwa 71% pelaku UMKM *go digital* kini sudah melek keuangan digital.

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong partisipasi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital (digitalisasi UMKM), melalui 2 pendekatan utama, yaitu:

- a. Penguatan Ekosistem UMKM, meliputi kemudahan perizinan, insentif fiskal (pajak), sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan akses bahan baku; serta
- b. Penguatan Ekosistem E-Commerce, meliputi penciptaan iklim usaha yang sehat (*fair playing field*), pembayaran digital, logistik, perlindungan data pribadi, pengendalian informatika, penyelenggaraan sistem dan

transaksi elektronik (PSTE) dan infrastruktur digital

Kedua pendekatan ini perlu dilakukan dengan koordinasi yang erat antar *stakeholders* terkait. Selain itu, dukungan pemberdayaan dan perluasan akses pasar UMKM juga terus ditingkatkan, diantaranya melalui:

1. Program Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang telah berhasil menambah sekitar 7,2 juta UMKM yang masuk (*onboard*) dalam ekosistem digital;
2. Program Padi UMKM sebagai pasar digital pengadaan barang/jasa oleh BUMN;
3. Platform pinjaman digital oleh HIMBARA dimana UMKM dapat melakukan pengajuan pinjaman secara cepat dan semua dilakukan secara digital;
4. Program QRIS sebagai opsi kanal pembayaran digital (selain ATM, EDC, dan *Mobile banking*) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Pelaku Industri Keuangan;
5. Pada tingkat regional, telah diselenggarakan ASEAN Online Sale Day (8 - 10 Agustus 2021) sebagai wadah promosi, *branding* produk lokal ASEAN, dan untuk meningkatkan ekspor UMKM

Sejumlah K/L memiliki berbagai inisiatif/program bagi pengembangan UMKM, seperti: (1) Penguatan aspek *enabler* oleh Kemenkominfo, (2) Tata kelola *e-commerce* oleh Kemendag, (3) Pembinaan pelaku UMKM oleh Kemenkop UKM, (4) Pembinaan pelaku industri oleh Kemenperin, (5) Tata kelola instrumen dan kebijakan fiskal oleh Kemenkeu, serta (6) Tata kelola sistem dan penyelenggaraan keuangan oleh Bank Indonesia bersama OJK.



Oleh karena itu, penguatan peran UMKM dalam ekosistem digital merupakan upaya yang krusial agar UMKM dapat bertahan, bangkit dan bertumbuh. Melalui digitalisasi UMKM dari hulu ke hilir, diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional.

Kontributor:

Yulya Aryani

(Analisis Kebijakan Ahli Pertama)

3

TANTANGAN DAN PELUANG

**TANTANGAN DAN
PELUANG EKSTERNAL**

**TANTANGAN DAN
PELUANG INTERNAL**

**TOPIK SPESIAL: INTEGRASI
KARTU PRAKERJA-KUR:
MENDORONG INOVASI DAN
UMKM NAIK KELAS**



Vaksinasi sebagai salah satu *game changer* dalam pengendalian pandemi COVID-19 mulai memberikan dampak yang dapat dirasakan baik secara domestik maupun global. Pemulihan ekonomi mulai terlihat dan beberapa sektor juga mulai kembali bangkit. Menuju tahun 2022, Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Tantangan tersebut juga diikuti dengan berbagai peluang yang dapat menjadi potensi apabila dapat dimanfaatkan dengan optimal.

TANTANGAN DAN PELUANG EKSTERNAL

TANTANGAN

1. Ketidakseimbangan Pemulihan Global

Vaksinasi yang sudah dilaksanakan secara global telah memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perekonomian secara global telah mulai pulih kembali, namun pemulihan ini tidak terjadi dengan seimbang. Negara-negara maju sebagian besar sudah mulai pulih dan sudah merencanakan untuk mengubah arah kebijakan dan mengurangi stimulus yang sebelumnya dikeluarkan akibat pandemi.

Negara-negara berkembang sendiri masih harus berjuang untuk pulih secara ekonomi. Beberapa faktor yang menghambat pemulihan pada negara berkembang diantaranya adalah cakupan vaksinasi yang belum merata. Selain itu negara berkembang juga masih perlu mengeluarkan berbagai stimulus fiskal dan moneter untuk menunjang pemulihan tersebut. Prospek ekonomi global yang positif dapat dijadikan momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Koordinasi antar negara untuk peningkatan investasi khususnya di

bidang kesehatan diperlukan untuk mendukung pemulihan global tersebut.

2. Kenaikan harga minyak global

Memasuki kuartal terakhir di tahun 2021, harga minyak dunia menyentuh level tertinggi pada perdagangan di bulan Oktober. Harga minyak mentah berjangka Brent tercatat naik 46 sen menjadi US\$85,99 per barel untuk pengiriman bulan Desember. Penguatan juga terjadi pada harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate di harga US\$83,76 per barel untuk pengiriman bulan Desember. Penguatan harga minyak mentah dunia dipicu oleh terjadinya krisis pasokan energi global yang diikuti oleh peningkatan terhadap permintaan minyak global. Hal ini diperkirakan dapat mendorong harga minyak mentah di atas US\$90 per barel pada akhir tahun 2021.

Berdasarkan data dari The International Energy Agency (IEA), lonjakan harga gas alam akan meningkatkan permintaan minyak sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik. IEA juga memprediksi pertumbuhan permintaan minyak global pada 2022 sebesar 210 ribu barel per hari, dan sekarang memperkirakan total permintaan minyak pada 2022 mencapai 99,6 juta barel per hari. Kenaikan harga minyak global ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia di tengah meningkatnya konsumsi dalam negeri sebagai dampak dari pemulihan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri mayoritas berasal dari hasil impor sehingga hal ini akan memberikan beban pada pemberian subsidi bahan bakar.

PELUANG

1. Potensi Pasar Ekspor yang Terbuka Lebar

Seiring dengan pemulihan ekonomi di negara-negara mitra dagang, permintaan



terhadap komoditas Indonesia kembali meningkat. Berdasarkan data dari BPS, nilai ekspor pada kuartal III mencapai US\$61,42 miliar. Angka tersebut lebih tinggi sebesar 50,9% dibandingkan tahun lalu. Kinerja ekspor ini sekaligus menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pada kuartal III.

Peningkatan permintaan ekspor terjadi pada beberapa komoditas unggulan pertanian seperti CPO, kopi, buah-buahan, dan hasil hutan bukan kayu. Komoditas non migas seperti batubara, nikel dan timah juga mengalami peningkatan harga secara global. Tahun 2022 pemerintah juga akan melakukan reformasi struktural untuk perbaikan efisiensi dan daya saing ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk ekspor dan penguatan industri nasional untuk mendukung potensi munculnya komoditas ekspor unggulan baru.

2. Pemulihan Perekonomian Mitra Dagang

Seiring terjadinya *rebound* perdagangan global di tahun 2021, permintaan barang kembali terjadi dengan lebih cepat. Pemulihan perekonomian yang terjadi di beberapa negara memberikan kontribusi dalam peningkatan perdagangan. Kondisi pasar finansial di negara-negara mengalami perbaikan berkat vaksinasi yang sudah mulai dijalankan sejak akhir Desember 2020.

Salah satu momentum rebound perdagangan juga didukung melalui pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Ministers (AEM), negara-negara ASEAN sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan dan bekerjasama mendorong percepatan program vaksinasi serta menjamin arus rantai pasok obat dan alat-alat kesehatan. ASEAN dan China juga sepakat meluncurkan *joint statement on further enhancing trade and economic cooperation* yang berisi komitmen untuk

terus meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi kedua belah pihak.

3. Penguatan Permintaan Ekspor dan Harga Komoditas

Pemulihan ekonomi yang mulai terjadi di beberapa negara dunia secara bertahap telah memulihkan permintaan terhadap barang ekspor Indonesia. Beberapa komoditas juga mengalami peningkatan harga di pasar dunia diantaranya Indonesian Crude Price (ICP) dan komoditas energi seperti batubara, logam dasar seperti timah dan logam mulia.

Indonesia juga terus meningkatkan nilai tambah manufaktur (*Manufacturing Value Added*) dengan mendorong hilirisasi, substitusi impor dan menjadikan industri di tanah air sebagai bagian rantai pasok global. Peningkatan nilai tambah industri dapat menciptakan *multiplier effect* diantaranya penyerapan tenaga kerja, devisa ekspor, serta kontribusi terhadap pajak dan cukai.

4. Presidensi G20

Tahun 2022 mendatang, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Presidensi G20. Presidensi G20 yang merupakan forum yang diikuti oleh 20 negara yang menjadi representasi perekonomian dunia. Penyelenggaraan Presidensi G20 ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendukung pemulihan ekonomi domestik. Masing-masing jalur pertemuan baik *finance track* maupun *sherpa track* akan diselenggarakan secara marathon di beberapa lokasi di Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat terselenggaranya acara.



Pengembangan infrastruktur terutama pada aspek keuangan merupakan salah satu pembahasan yang akan dibahas dalam forum G20. Pembahasan ini juga mencakup peta jalan infrastruktur sebagai kelas asset yang dapat mendukung banyak pertumbuhan domestik di negara berkembang. Selain itu terdapat juga G20 Energy Access Action Plan yaitu rencana untuk dapat mengejar ketertinggalan di bidang akses energi terutama di negara-negara yang belum memiliki rasio elektrifikasi yang memadai. Rangkaian kegiatan Presidensi G20 diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar dari berbagai aspek.

TANTANGAN DAN PELUANG INTERNAL

TANTANGAN

1. Ketimpangan Pemulihan Daya Beli Masyarakat

Pandemi COVID 19 dan pembatasan-pembatasan aktivitas yang diterapkan oleh pemerintah selama hampir 2 tahun telah berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini dipicu juga oleh ketidakpastian ekonomi yang dihadapi masyarakat sebagai dampak dari pandemi terhadap mata pencaharian mereka. Pelonggaran PPKM yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pada kuartal III memang memicu kenaikan optimisme konsumsi masyarakat, namun kondisi ini lebih cepat direspon oleh masyarakat golongan kelas menengah ke atas.

Pemulihan yang tidak merata pada daya beli masyarakat ini disebabkan masyarakat golongan menengah ke bawah harus menunggu pemulihan dari sisi pendapatan mereka terlebih dahulu, sehingga pemulihan konsumsi akan terjadi lebih lambat. Kondisi

ini menyebabkan stimulus dan bantuan kepada masyarakat masih diperlukan untuk menopang golongan menengah ke bawah. Hal ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2022.

2. Resiko *Shadow Economy*

Digitalisasi ekonomi yang tumbuh secara signifikan pada masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain hal ini juga memberikan tantangan baru yang signifikan pada perpajakan negara. Tren konsumsi berbasis digital yang akan terus berlanjut di tahun 2022 akan berdampak positif terhadap efisiensi perekonomian, namun juga memberikan resiko kehilangan basis pajak.

Shadow economy merupakan usaha yang dilakukan individu, rumahtangga, dan/atau perusahaan dalam menghindari atau tidak melaporkan transaksinya kepada pemerintah. Transaksi *shadow economy* Indonesia diketahui setara dengan 8-19% GDP (Dahlan, 2020). *Shadow economy* yang semakin berkembang akan meningkatkan kerugian negara berupa potensi pajak yang hilang.

Transaksi secara digital berpeluang untuk sulit dideteksi. Hal ini dapat berimbas pada penerimaan negara yang menjadi berkurang. Sebagai salah satu solusi, pemerintah akan melakukan reformasi di bidang perpajakan untuk memfasilitasi negara agar tidak mengalami kerugian di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Reformasi di bidang perpajakan juga sejalan dengan salah satu agenda prioritas dalam pertemuan G20 nanti.



PELUANG

1. Penurunan Level PPKM

Penurunan Level PPKM yang sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia diprediksi dapat berdampak pada aktivitas perekonomian secara bertahap. Penurunan Level ini dilakukan dengan indikator penurunan kasus aktif dan capaian vaksinasi. Penurunan Level PPKM yang dilaksanakan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan dapat menjadi momentum penurunan kasus. Penurunan kasus dapat membuka kembali berbagai kegiatan perekonomian seperti peningkatan kapasitas pasar dan *mall*, tempat wisata, tempat olahraga, dan peningkatan aktivitas perkantoran.

Peningkatan mobilitas yang terjadi karena peningkatan kapasitas di berbagai sektor perekonomian dapat menjadi peluang dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian. Penurunan level PPKM juga diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk bangkit dari keterpurukan pandemi. Diharapkan dapat terjadi *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya seiring dengan dilakukannya pelonggaran PPKM.

2. Perkembangan UMKM melalui Kemudahan Akses

Selama pandemi COVID 19 berlangsung, sektor UMKM menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan untuk UMKM untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, restrukturisasi kredit, akses terhadap perangkat dan layanan digital, serta pendampingan. Hal ini tentunya dapat menjadi momentum sektor UMKM untuk melakukan ekspansi. Perkembangan sektor UMKM juga dapat didukung dengan pemulihan daya beli masyarakat dan digitalisasi yang semakin berkembang.

UMKM sendiri merupakan salah satu sektor yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan UMKM yang diikuti dengan kemudahan akses terhadap pembiayaan dan pendampingan diharapkan dapat menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi dalam masa pemulihan selama masa pandemi COVID-19. UMKM dapat membantu membangkitkan daya beli masyarakat. Melalui akses yang semakin mudah diharapkan masyarakat akan lebih mudah menjangkau produk-produk UMKM sehingga dapat meningkatkan konsumsi.

3. Perkembangan Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia semakin mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan pembatasan aktivitas menjadi salah satu faktor utama terjadinya peningkatan jumlah pengguna internet yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Prospek ekonomi digital Indonesia yang menjanjikan juga membuka peluang masuknya investor dari luar.

Menurut data dari *Startup Ranking*, Indonesia menduduki urutan kelima dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Startup sendiri merupakan potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyaknya jumlah startup di Indonesia juga mempengaruhi aliran pendanaan dari investor, terutama startup di sektor *fintech*, logistik, dan *e-commerce*. Besarnya sumbangsih ekonomi digital ini diprediksi akan tumbuh sebesar delapan kali lipat pada tahun 2030, dengan didominasi sektor *e-commerce*.

Pertumbuhan ekonomi digital ini juga menjadi sebuah momentum bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Selain menyediakan fasilitas internet cepat yang



merata di seluruh daerah, pemerintah juga tengah mempersiapkan SDM berkualitas yang melek teknologi melalui sistem pendidikan, dan juga transformasi di sektor jasa keuangan. Percepatan transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan peningkatan kapasitas internal dan eksternal, mempercepat penerapan *Supervisory Technology and Regulatory Technology* serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan *big-tech* di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas keuangan.

4. Perkembangan Riset dan Inovasi untuk Pengembangan Vaksin Merah Putih

Dalam memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, Pemerintah mengupayakan untuk pengadaan vaksin dari negara-Negara produsen vaksin. Namun dapat kita ketahui bahwa terjadi isu pembatasan hingga larangan ekspor vaksin negara-negara produsen. Tentu saja ini mengkhawatirkan karena dunia akan semakin lama lepas dari pandemi dan akan semakin lama pula pemulihan ekonomi bisa terwujud. Sehingga sesuai arahan Presiden agar dilakukan percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih untuk mengantisipasi berbagai isu global, sehingga ke depan Indonesia bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan sekaligus menjadi tonggak awal kemajuan riset dan inovasi di Indonesia, karena selama ini vaksin yang digunakan

belum ada yang dari awal proses pembuatan dilaksanakan di Indonesia dan oleh peneliti Indonesia.

Vaksin Merah Putih dan vaksin yang diproduksi dalam negeri melalui kerja sama dengan BUMN, perusahaan swasta dan pihak luar negeri berperan krusial dalam rencana pengadaan vaksin untuk program vaksinasi Covid-19 pada 2022.

Terdapat 6 Lembaga Penelitian yang akan mengembangkan Vaksin Merah Putih antara lain: Lembaga Eijkman, LIPI, UI, UGM, Unair, ITB. Dari keenam lembaga ini, Tim UNAIR dengan platform *inactivated virus* dengan mitra PT Biotis telah mencapai kemajuan terdepan, diikuti oleh Tim LBM Eijkman dengan platform *protein recombinant* dengan mitra PT Bio Farma. Tim lain masih terus bekerja dengan berbagai platform (*DNA, mRNA, adeno virus, protein recombinant*). Meski secara faktual basis produksi sudah tersedia di Indonesia untuk platform *inactivated virus* dan *protein recombinant (yeast based)*.

Selain itu, kandidat pengembang terdepan lainnya adalah Vaksin BUMN oleh PT Bio Farma bekerjasama dengan Baylor College Medicine, Amerika Serikat, Vaksin Zifivax yang dikembangkan oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical dan PT. Jbio, dan Vaksin GX-19N yang dikembangkan oleh PT Kalbe Farma dan Genexine, Korea Selatan.



Kartu Prakerja dan Kredit Usaha Rakyat merupakan dua diantara program strategis Pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi masalah pada masyarakat menengah ke bawah, seperti pengangguran, produktivitas SDM, kemiskinan serta peningkatan usaha mikro kecil. Pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing Angkatan Kerja Indonesia agar mampu memenuhi *demand* dari industri yang terus berkembang. Selain itu, program ini juga bertujuan mendorong kewirausahaan, utamanya bagi generasi milenial.

Namun pada perkembangannya, di tahun 2020 untuk menghadapi permasalahan ketenagakerjaan akibat krisis Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional program mengalami refocusing menjadi program Semi-Bansos yang mengemban misi tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak selama masa pandemic COVID-19. Program ini kemudian selain ditujukan bagi pencari kerja, juga diprioritaskan untuk pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, dan pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi.

Penerima manfaat Kartu Prakerja menerima bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta untuk membeli dan mengikuti pelatihan yang tersedia dalam ekosistem Kartu

Prakerja dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp2,4 juta (Rp600 ribu x 4 bulan).

Gambar 3.1. Prakerja Meningkatkan Kompetensi dan Kewirausahaan

Pengalaman Mengikuti Pelatihan bagi Wirausaha

Bagi wirausaha, Pelatihan Kartu Prakerja memberikan pengetahuan/keterampilan untuk:	Bagi wirausaha, Pelatihan Kartu Prakerja membantu keberlanjutan usaha
98% Menjalankan bisnis dengan lebih baik	67% Wirausaha mengalami peningkatan omset
95% Memperluas/memperbesar bisnis	98% Diantaranya mengatakan bahwa peningkatan omset berkaitan dengan Pelatihan Kartu Prakerja
96% Menumbuhkan minat berwirausaha	

Sumber: Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, 2021.

Pada tahun 2021, bulan November, program ini telah membuka 11 batch pendaftaran (12-22) dan telah berhasil disalurkan kepada 5,9 juta penerima manfaat dengan total insentif yang telah disalurkan hingga akhir November 2021 adalah sebesar Rp11,8 triliun. Berdasarkan hasil Survey Evaluasi yang dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, 95% penerima menggunakan insentif untuk membeli bahan pangan. Selain itu, 70% penerima juga menggunakan insentif untuk modal usaha. Hal ini sejalan dengan hasil survei evaluasi yang menyatakan bahwa pelatihan program kartu prakerja mendorong kewirausahaan yaitu sekitar 93%.



Gambar 3.2. Tahapan Graduasi Penerima Program Kartu Prakerja kepada Program Kredit Usaha Rakyat



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021.

Sejalan dengan tingginya semangat berwirausaha dari para penerima Program Kartu Prakerja, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemudian melakukan pengintegrasian antara Program Kartu Prakerja dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sinergi ini bertujuan untuk memfasilitasi para penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan dan berwirausaha untuk mendapatkan akses pembiayaan usaha melalui KUR Mikro dengan besaran hingga Rp10 juta dengan suku bunga efektif 6 persen per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan Maksimal 5 tahun untuk Kredit Investasi (KI).

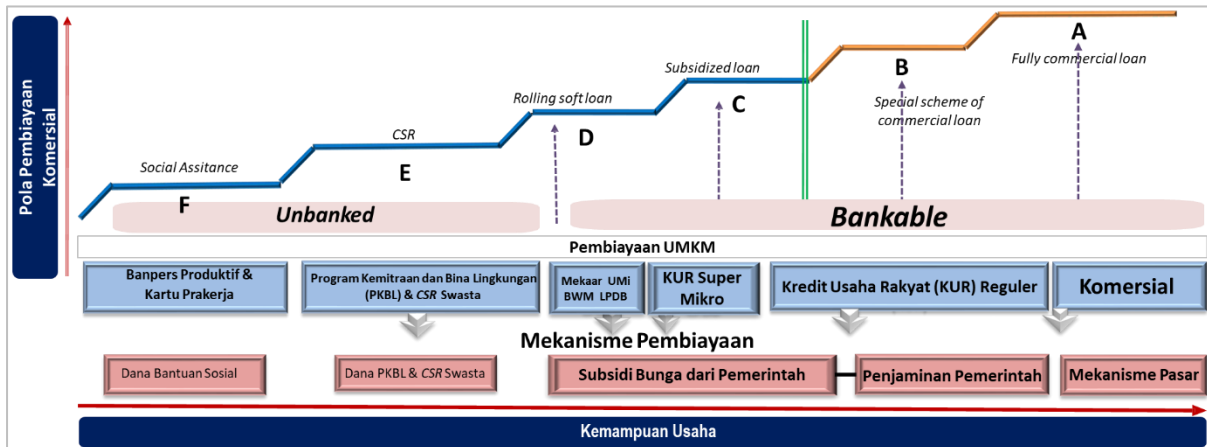
Sinergi kedua program ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi penerima Kartu Prakerja untuk mendapatkan akses pembiayaan tambahan modal dalam menjalankan usaha. Akses pengajuan bantuan juga dapat dilakukan dengan mudah secara daring (online). Selain dokumen administrasi seperti Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan RT/RW, beberapa perbankan juga tidak menerapkan syarat pembatasan minimal waktu pendirian usaha, namun para

Penerima Kartu Prakerja harus memenuhi salah satu syarat berupa mengikuti pendampingan, mengikuti pelatihan kewirausahaan atau lainnya, tergabung dalam kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang mempunyai usaha produktif dan layak. Dengan sinergi antara program Kartu Prakerja dengan KUR, diharapkan usaha-usaha yang dirintis oleh para penerima Kartu Prakerja dapat semakin berkembang dan naik kelas. Jika usaha dari para penerima KUR Super Mikro ini telah naik kelas, maka dapat mengajukan fasilitas KUR pada jenjang selanjutnya.

Sinergi yang dilakukan tidak hanya berhenti di situ saja. Pemerintah telah menerbitkan berbagai fasilitas pembiayaan/kredit seperti Ultra-Mikro (UMi), program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Bank Wakaf Mikro (BWM), dana bergulir dari LPDB, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN atau program CSR dari swasta, dan akan terus disinergikan melalui peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga untuk mengembangkan UMKM.



Gambar 3.3. Integrasi Fasilitas dan Program Pembiayaan/ Kredit dari Pemerintah



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021.

Usaha mikro dan kecil yang unbankable dibina dan dikembangkan dengan CSR, melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Jika sudah naik kelas dengan program Mekaar PT PNM atau BWM atau ultra mikro. Selanjutnya, jika naik kelas lagi dengan KUR Super Mikro, lalu dilanjutkan dengan KUR Reguler dan

terakhir pembiayaan dengan kredit komersial. Seluruh integrasi pembiayaan yang diupayakan tersebut merupakan bentuk perhatian dan prioritas pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas agar dapat terus mendorong pemulihan ekonomi secara lebih berkelanjutan ke depannya.

Gambar 3.4. Capaian dan Evaluasi Kartu Prakerja



Survey persepsi selanjutnya dilakukan oleh CSIS. Sedangkan impact evaluation sedang dilakukan oleh JPAL SEA, Bank Dunia, Presisi, dan CEDS Unpad dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

Kontributor

Suhindarto

(Analisis Kebijakan Ahli Pertama)

4

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2021

**PEREKONOMIAN TAHUN 2021
DARI SISI PENGELUARAN**

**PERTUMBUHAN EKONOMI DARI
SISI LAPANGAN USAHA**

**TOPIK SPESIAL: HOLDING BUMN
FARMASI UNTUK KEMANDIRIAN**



Pelaksanaan program vaksinasi secara masif menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022. Selain itu, implementasi UU Cipta Kerja pada berbagai sektor lapangan usaha dalam bentuk implementasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan investasi di tahun 2021 dan 2022. Secara lebih spesifik, investasi pada sektor Industri Pengolahan bahan tambang diekspektasikan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan. Dari sisi eksternal faktor pendorong utama pertumbuhan adalah penguatan ekspor komoditas dan ekspor manufaktur golongan besi dan baja. Dengan optimisme tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 3,7% - 4,0% (yoy) dan pada tahun 2022 sebesar 5,2% - (yoy).

Secara lebih rinci, dalam Bab ini akan mengulas proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dari 2 (dua) sudut pandang yaitu

pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran dan sisi lapangan usaha (sektoral).

PEREKONOMIAN TAHUN 2022 DARI SISI PENGELUARAN

Ditinjau dari PDB sisi Pengeluaran atau *Demand Side*, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh signifikannya kinerja Ekspor dan Impor seiring dengan pulihnya perekonomian global secara bertahap. Di sisi lain, Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah menjadi motor penggerak perekonomian terutama dalam menjaga Konsumsi RT, Pengeluaran Pemerintah serta Investasi. Program PC-PEN terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dalam pengendalian pandemi maupun memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat serta dunia usaha sehingga aktivitas perekonomian tetap dapat berjalan secara optimal.

Tabel 4.1. Pertumbuhan Perekonomian Berdasarkan Lapangan Usaha (dalam %)

No.	PDB Komponen Pengeluaran (Seri 2010)	2020	2021 ^e	2022 ^p
1	Konsumsi Rumah Tangga	-2,6	2,3 s.d 2,6	5,0
2	Konsumsi LNPRT	-4,3	1,7 s.d 2,0	5,5
3	Pengeluaran Pemerintah	2,0	3,4 s.d 4,2	3,5
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,9	4,4 s.d 4,9	6,3
5	Ekspor Barang dan Jasa	-7,7	17,9 s.d 19,4	6,7
6	Impor Barang dan Jasa	-14,3	17,3 s.d 18,0	7,3
Produk Domestik Bruto Agregat		-2,0	3,7 s.d 4,0	5,3

Sumber: Kemenko Perekonomian, BPS, diolah

KONSUMSI RUMAH TANGGA

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sisi pengeluaran (*demand side*). Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi komponen ini mencapai 56,56% terhadap PDB nasional. Jika dilihat secara seksama, komponen Konsumsi Rumah Tangga mengalami tren meningkat

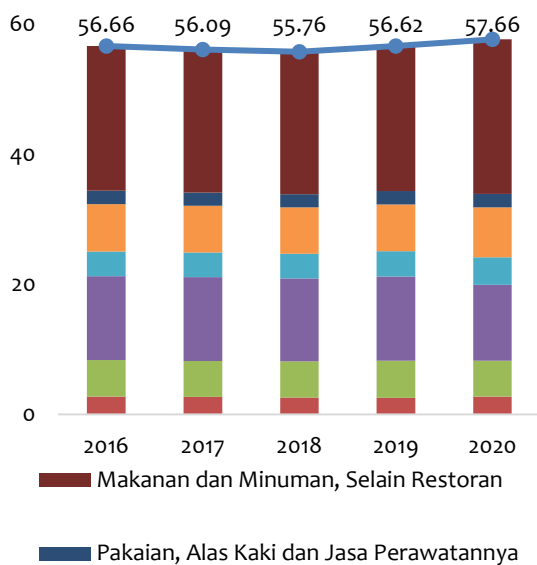
dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Perkembangan distribusi PDB komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dapat dilihat pada Grafik 4.1.

Grafik 4.1. juga menunjukkan perkembangan pertumbuhan PDB komponen Konsumsi RT. Setelah terjadi perlambatan sepanjang tahun 2020 di awal tahun 2021 kinerja komponen ini mulai menunjukkan perbaikan. Namun, dapat dilihat bahwa pertumbuhan di



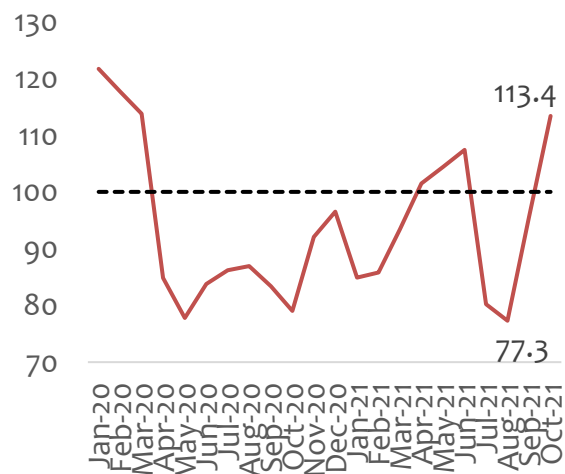
tahun 2021 masih berada di bawah level normal sebelum pandemi yaitu tahun 2019. Hingga triwulan III-2021 hampir seluruh kelompok konsumsi mengalami pertumbuhan positif yang tercermin dari meningkatnya berbagai indikator seperti penjualan eceran, penjualan listrik, wholesale mobil dan sepeda motor, serta meningkatnya penumpang sektor transportasi jika dibandingkan tahun 2020.

Grafik 4.1. Perkembangan Distribusi PDB Komponen Pengeluaran Konsumsi RT (%)



Sumber: BPS, 2021

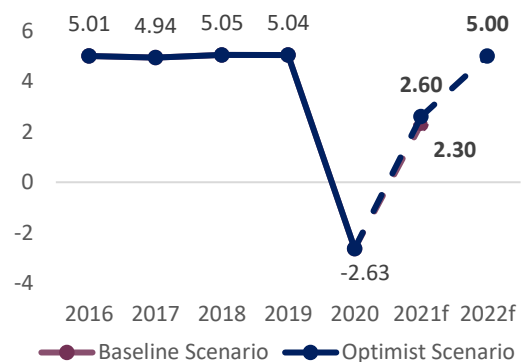
Grafik 4.2. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, 2021

Kemenko Perekonomian memproyeksikan bahwa komponen Konsumsi RT secara keseluruhan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 2,3% hingga 2,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang berada di level kontraksi atau mencapai -2,6% (yoy). Hal tersebut didasarkan pada pengendalian pandemi yang semakin efektif serta vaksinasi yang semakin meluas. Konsumsi RT terus diperkirakan akan terus membaik terutama mulai kembali normalnya mobilitas masyarakat sejalan dengan relaksasi pembatasan mobilitas. Hal tersebut juga diindikasikan dengan meningkatnya indeks keyakinan konsumen dan kembali pada level optimis di bulan Oktober 2021. Di sisi lain bantuan sosial yang diberikan Pemerintah akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat terutama bagi mereka yang berada pada kelompok pendapatan rendah. Perkembangan pertumbuhan PDB komponen Konsumsi RT proyeksinya dapat dilihat pada Grafik 4.3.

Grafik 4.3. Laju Pertumbuhan PDB Komponen Konsumsi RT (% ,yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Memasuki tahun 2022, Kemenko Perekonomian memproyeksikan komponen Konsumsi RT akan mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 5,0% (yoy). Pertumbuhan terjadi seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional terutama mulai tertanganinya pandemi

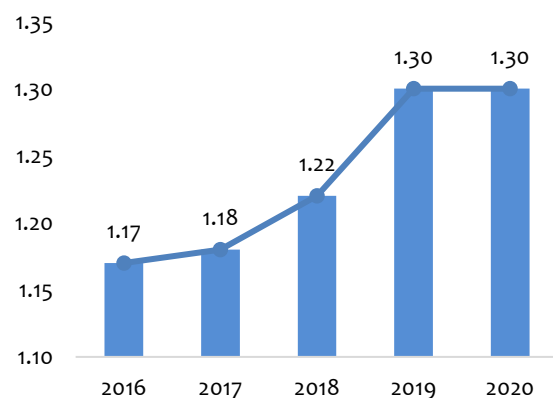


COVID-19. Pertumbuhan juga akan didorong melalui berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong tingkat konsumsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah tentu akan mempersiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat.

KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (LNPRT)

Komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan salah satu komponen PDB sisi pengeluaran yang kontribusinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi komponen ini mencapai 1,23% terhadap PDB. Pada tahun 2020 terdapat perayaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua yang berperan penting dalam mendorong Konsumsi LNPRT.

Grafik 4.4. Perkembangan Distribusi PDB Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%)

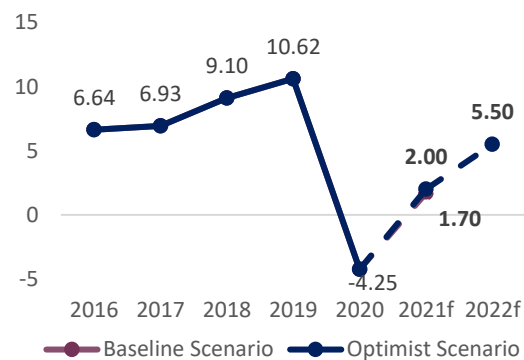


Sumber: BPS, 2021

Konsumsi LNPRT pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh di kisaran 1,7% sampai 2,0%. Kegiatan lembaga dan organisasi maupun kegiatan bantuan kemanusiaan mulai meningkat pasca adanya varian delta, sehingga aktivitas secara perlahan mulai

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tercermin dari aktivitas lembaga non profit seperti partai politik maupun lembaga sosial masyarakat (LSM) yang berpartisipasi aktif dalam penyaluran bantuan penanganan berbagai bencana alam maupun penanganan pandemi Covid-19 seperti penyelenggaraan vaksinasi, pemberian masker dan sebagainya.

Grafik 4.5. Laju Pertumbuhan PDB Komponen Konsumsi LNPRT (% yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Memasuki tahun 2022, Kemenko Perekonomian memproyeksikan komponen Konsumsi LNPRT akan mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 5,5% (yoy). Pertumbuhan tersebut seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional terutama mulai tertanganinya pandemi COVID-19. Pertumbuhan juga akan didorong melalui berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong tingkat konsumsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong aktivitas pada lembaga non profit yang melayani rumah tangga ini.

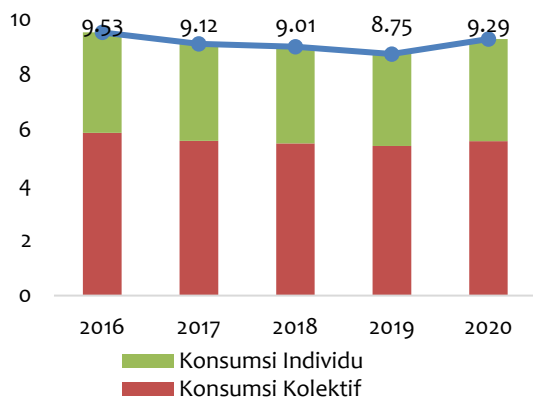
PENGELUARAN PEMERINTAH

Komponen Pengeluaran Pemerintah adalah salah satu komponen yang berperan penting selama masa Pandemi Covid-19 terutama dalam menjaga momentum proses Pemulihan Ekonomi Nasional. Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi



komponen ini mencapai 9,14% terhadap PDB nasional. Komponen ini sebagian besar disumbang oleh konsumsi kolektif dan diikuti oleh konsumsi individu. Perkembangan distribusi PDB komponen Pengeluaran Pemerintah dapat dilihat pada Grafik 4.6.

Grafik 4.6. Perkembangan Distribusi PDB Komponen Pengeluaran Pemerintah (%)



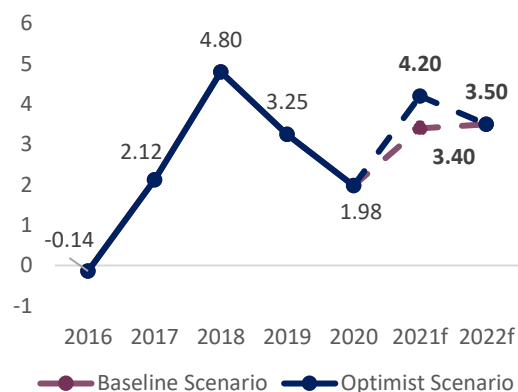
Sumber: BPS, 2021

Grafik 4.6. menunjukkan perkembangan pertumbuhan PDB komponen Pengeluaran Pemerintah. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah ditopang oleh realisasi belanja barang dan jasa yang cukup tinggi terutama dalam mendukung penanganan kesehatan. Di sisi lain, untuk konsumsi kolektif pertumbuhan belanja barang dan jasa didominasi oleh belanja BLU dan belanja pada pemeliharaan pada infrastruktur serta jaringan. Oleh karena itu, pada tahun 2021, komponen ini masih diprediksi tumbuh positif (kisaran 3,4 s.d 4,2%) sama seperti tahun sebelumnya sesuai dengan arah kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical* terutama dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Memasuki tahun 2022, Kemenko Perekonomian memproyeksikan komponen Pengeluaran Pemerintah akan mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 3,5% (yoy), masih lebih rendah jika

dibandingkan dengan tahun 2021. Pertumbuhan terjadi seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional terutama mulai tertanganinya pandemi COVID-19. Stimulus fiskal masih akan menopang berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik namun defisit fiskal APBN mulai sedikit lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 maupun 2021.

Grafik 4.7. Laju Pertumbuhan Komponen PDB Pengeluaran Pemerintah (% , yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

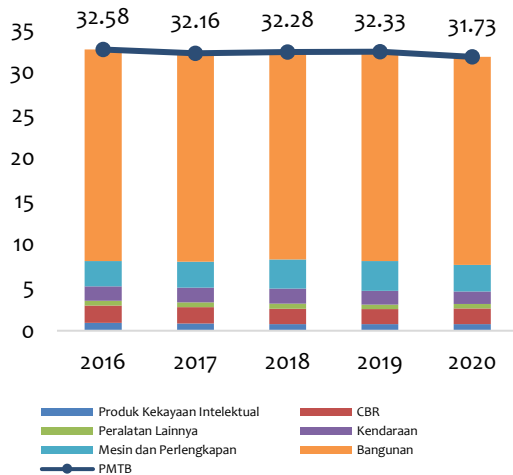
Komponen investasi yang dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDB sisi pengeluaran. Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi komponen ini mencapai 32,22% terhadap PDB nasional. Perkembangan distribusi PDB komponen investasi atau PMTB dapat dilihat pada Grafik 4.8.

Grafik 4.8. menunjukkan perkembangan pertumbuhan PDB komponen Investasi. Setelah terjadi perlambatan sepanjang tahun 2020, di awal tahun 2021 kinerja komponen ini mulai tumbuh signifikan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh hampir seluruh jenis barang modal seperti jenis mesin, peralatan lainnya dan



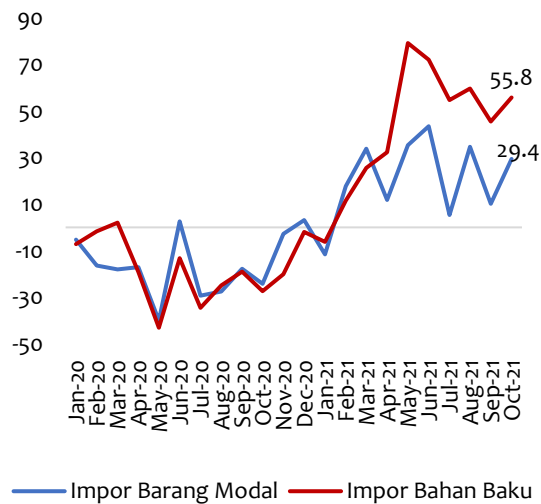
kendaraan. Hal ini sejalan dengan data penjualan mesin konstruksi yang tumbuh signifikan sejak bulan Maret 2021 hingga September 2021.

Grafik 4.8. Perkembangan Distribusi PDB Komponen PMTB (%)



Sumber: BPS, 2021

Grafik 4.9. Perkembangan Impor Barang Modal dan Impor Bahan Baku (% , yoy)

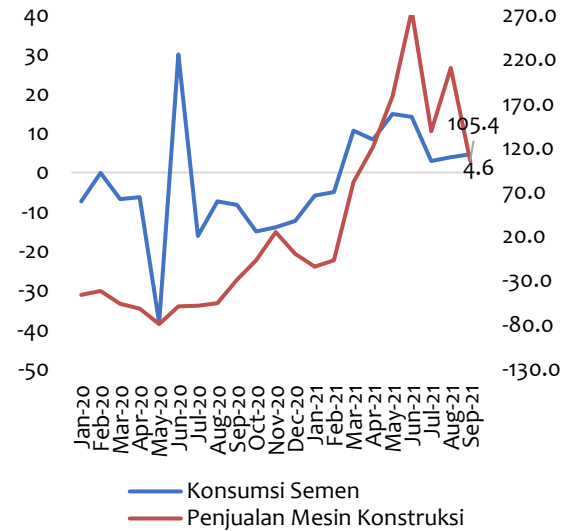


Sumber: BPS, 2021

Selain itu, pertumbuhan investasi berupa bangunan dan konstruksi mengalami peningkatan terutama didorong oleh pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang terus dilakukan oleh pemerintah di berbagai wilayah. Terlihat pada grafik

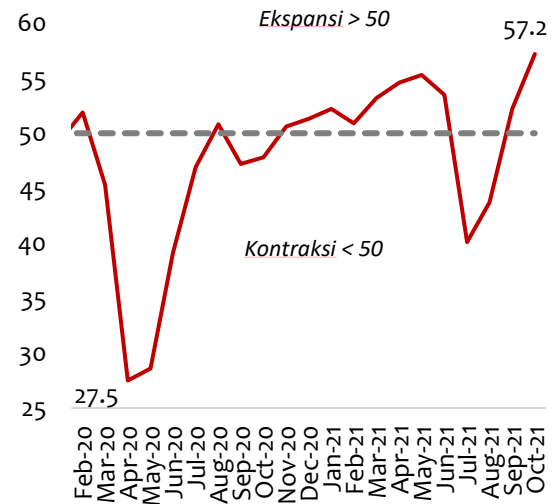
4.10. penjualan konsumsi semen juga masih dalam fase pertumbuhan positif bahkan sejak

Grafik 4.10. Pertumbuhan Konsumsi Semen dan Penjualan Mesin Konstruksi (% , yoy)



Sumber: CEIC, 2021

Grafik 4.11. Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur



Sumber: IHS Markit, 2021

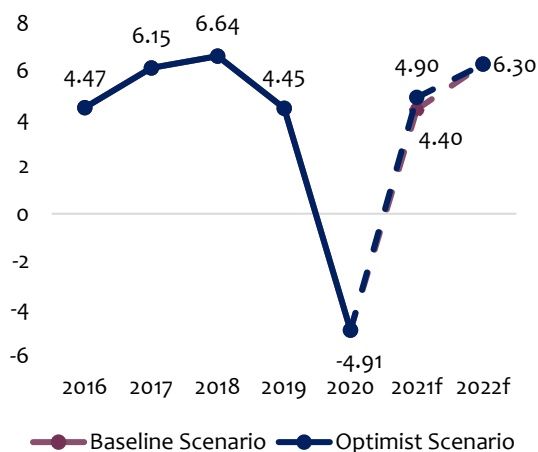
Optimisme tumbuh tingginya investasi pada tahun 2021 tercermin dari meningkatnya indikator PMI hingga bulan Oktober 2021 bahkan mencatatkan rekor tertinggi, diikuti oleh meningkatnya angka impor bahan baku dan impor barang modal sepanjang tahun



2021 yang menunjukkan fase bisnis telah kembali melakukan ekspansi. Hal ini juga sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha yang dilakukan Bank Indonesia yang memprediksi bahwa dunia usaha masih dalam fase ekspansi di kuartal keempat tahun 2021.

Berdasarkan berbagai informasi dari *leading indicator* tersebut, Kemenko Perekonomian memproyeksikan bahwa komponen PMTB pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 4,4% hingga 4,9% (yoy), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang berada di level kontraksi atau mencapai -4,9% (yoy).

Grafik 4.12. Laju Pertumbuhan PDB Komponen PMTB (% ,yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

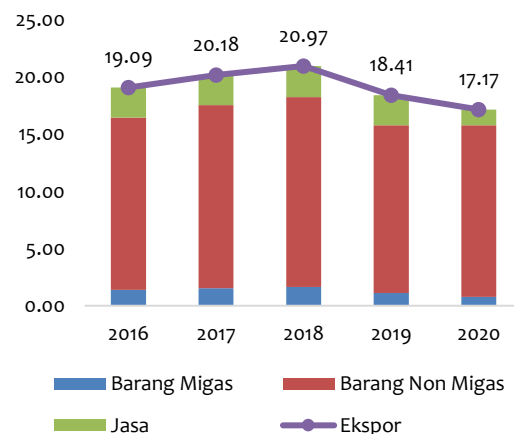
Pada tahun 2022, Kemenko Perekonomian memproyeksikan komponen PMTB akan mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 6,3% (yoy). Pertumbuhan terjadi seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional terutama mulai tertanganinya pandemi COVID-19. Pertumbuhan investasi akan didorong melalui berbagai kebijakan pemerintah seperti implementasi UU Cipta Kerja, berlanjutnya konstruksi proyek infrastruktur pemerintah dan dioptimalkannya LPI dapat mendorong

tingkat investasi dan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha dan investor untuk kembali melakukan ekspansi bisnis.

EKSPOR BARANG DAN JASA

Komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan *driver* utama pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sehingga distribusinya terhadap PDB menjadi 17,17%. Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi komponen ini mencapai 19,16% terhadap PDB nasional. Perkembangan distribusi PDB komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa dapat dilihat pada Grafik 4.13.

Grafik 4.13. Perkembangan Distribusi PDB Komponen Ekspor (%)

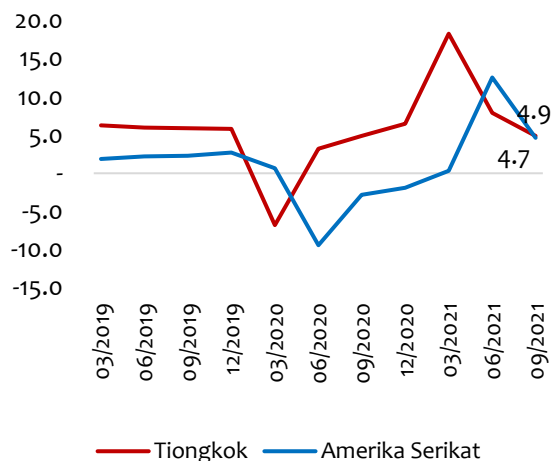


Sumber: BPS, 2021

Sejak awal tahun hingga triwulan III-2021 kinerja komponen ini meningkat signifikan jika dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian global serta pulihnya perekonomian negara mitra dagang Indonesia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok (lihat grafik 4.14). Pada grafik 4.14. dapat dilihat perkembangan dan proyeksi pertumbuhan PDB Pengeluaran pada komponen Ekspor Barang dan Jasa.

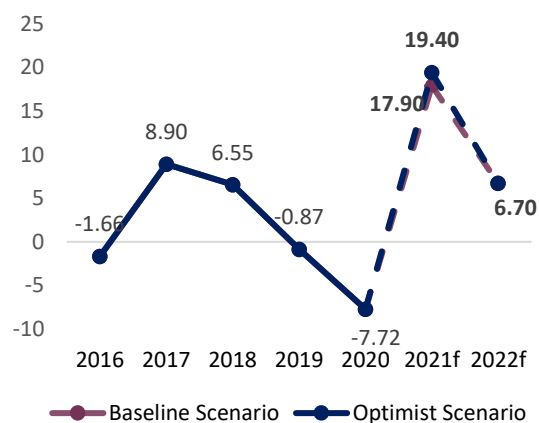


Grafik 4.14. Laju Pertumbuhan PDB Tiongkok dan Amerika Serikat (% , yoy)



Sumber: Bloomberg, 2021

Grafik 4.15. Laju Pertumbuhan PDB Komponen Ekspor (% , yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Kemenko Perekonomian memproyeksikan bahwa komponen Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2021 akan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dengan kisaran nilai sebesar 17,9% hingga 19,4% (yoy), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang berada di level kontraksi atau tumbuh -7,72%. Hal tersebut disebabkan masih tingginya permintaan produk komoditas ekspor Indonesia serta tren harga komoditas yang masih tinggi hingga akhir tahun 2021 seperti Batubara, Nikel, dan CPO.

Pada tahun 2022, Kemenko Perekonomian memproyeksikan komponen Ekspor Barang dan Jasa tetap akan mengalami pertumbuhan namun tidak setinggi tahun sebelumnya dengan kisaran nilai sebesar 6,7% (yoy). Pertumbuhan yang terbatas tersebut dikarenakan adanya *downside risk* terutama sentimen eksternal dimana terdapat indikasi perlambatan perekonomian Tiongkok dan negara mitra dagang Indonesia lainnya yang tengah mengalami krisis energi dan dapat memicu disrupsi *supply* global. Namun demikian, pemerintah tetap akan melanjutkan berbagai kebijakan mendorong kinerja ekspor terutama melalui fasilitasi perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi yang efektif dan pemanfaatan berbagai perjanjian dagang seperti PTA/FTA/CEPA.

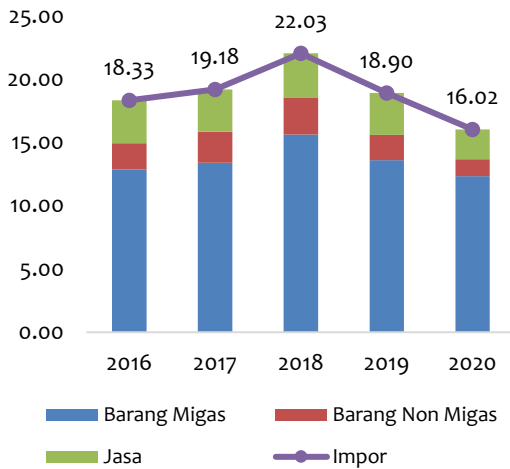
IMPOR BARANG DAN JASA

Komponen Impor Barang dan Jasa adalah salah satu komponen penting dalam pembentukan PDB sisi Pengeluaran. Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi komponen ini mencapai 18,89% terhadap PDB nasional. Namun akibat adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 share komponen ini mengalami penurunan yang cukup dalam hingga mencapai 16,02% dari total PDB Pengeluaran. Perkembangan distribusi PDB komponen Impor Barang dan Jasa dapat dilihat pada Grafik 4.16.

Grafik 4.17 menunjukkan perkembangan pertumbuhan PDB komponen Impor Barang dan Jasa. Setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020, di awal tahun 2021 kinerja komponen ini mulai menunjukkan perbaikan. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan di tahun 2021 tumbuh sangat tinggi bahkan di atas level pra-pandemi.

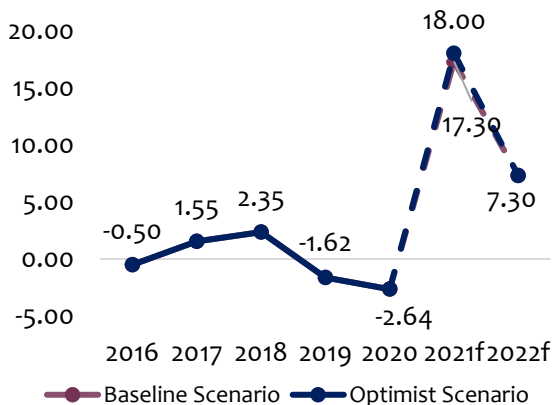


Grafik 4.16. Perkembangan Distribusi PDB Komponen Impor (%)



Sumber: BPS, 2021

Grafik 4.17. Laju Pertumbuhan PDB Komponen Impor (% yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Kemenko Perekonomian memproyeksikan bahwa komponen Impor Barang dan Jasa pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 17,30% hingga 18,00% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang berada di level kontraksi atau mencapai -2,64% (yoy).

Pada tahun 2022 Kemenko Perekonomian memprediksi bahwa Impor Barang dan Jasa tetap tumbuh namun melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya atau di

kisaran 7,3%. Pemerintah tetap akan menjalankan strategi kebijakan optimalisasi impor diantaranya melalui impor barang prioritas untuk pemenuhan kebutuhan proyek infrastruktur serta peningkatan pemanfaatan bahan baku impor yang lebih diarahkan pada kebutuhan kegiatan ekspor dan strategi *Global Value Chain*.

Kendati demikian, terdapat *downside risk* yang juga tetap perlu diperhatikan agar momentum pertumbuhan impor dapat tetap dijaga seperti adanya disrupsi *supply global* yang dapat memicu pelemahan pada produksi domestik dimana para pelaku industri yang masih bergantung terhadap bahan baku maupun barang modal impor.

PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI LAPANGAN USAHA

Pada tahun 2021 pemulihan ekonomi diperkirakan terjadi pada semua lapangan usaha. Tidak hanya sektor yang erat kaitannya dengan penanganan COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru seperti sektor Informasi dan Komunikasi serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, namun juga sektor kontributor utama PDB seperti Industri Pengolahan, Perdagangan,

Pertambangan dan Konstruksi. Hal ini tidak terlepas dari capaian dan target vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* yang kemudian meningkatkan mobilitas masyarakat. Sektor yang melibatkan interaksi fisik seperti akomodasi, makanan dan minuman serta sektor transportasi juga diproyeksikan akan pulih secara perlahan. Selain itu, pemulihan ekonomi global yang juga diproyeksikan terus berlanjut akan meningkatkan kinerja ekspor komoditas dan hasil manufaktur.



Tabel 4.2. Pertumbuhan Perekonomian Berdasarkan Lapangan Usaha (dalam %)

No.	PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	2020	2021 ^e	2022 ^P
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,7	1,6 s.d 2,0	2,1
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,9	4,2 s.d 4,4	3,7
3	Industri Pengolahan	-2,9	2,9 s.d 3,1	3,3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,3	4,4 s.d 4,8	5,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,9	4,5 s.d 4,7	4,9
6	Konstruksi	-3,3	3,0 s.d 3,5	4,2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,7	4,8 s.d 4,9	5,9
8	Transportasi dan Pergudangan	-15,0	1,5 s.d 2,5	4,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,2	3,1 s.d 3,6	5,8
10	Informasi dan Komunikasi	10,6	6,8 s.d 7,3	7,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,2	3,5 s.d 3,8	6,2
12	Real Estate	2,3	3,1 s.d 3,2	4,0
13	Jasa Perusahaan	-5,4	2,5 s.d 2,6	8,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,0	1,5 s.d 1,7	12,0
15	Jasa Pendidikan	2,6	-0,9 s.d -0,4	5,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,6	10,7 s.d 11,5	9,1
17	Jasa lainnya	-4,1	3,6 s.d 3,9	11,7
Produk Domestik Bruto Agregat		-2,0	3,7 s.d 4,0	5,2

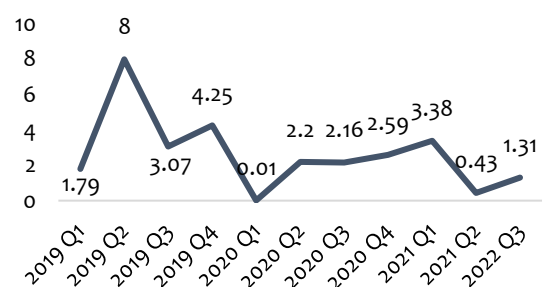
Sumber: Kemenko Perekonomian, BPS, diolah

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor penopang pertumbuhan nasional. Pada tahun 2020 kontribusi sektor ini tercatat sebesar 13,70%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 12,71%. Capaian tersebut menjadikan sektor ini berada di posisi kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan. Meskipun demikian, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2020 mengalami perlambatan akibat guncangan pandemi COVID-19. BPS mencatat pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2020 hanya mencapai 1,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,61% (yoy). Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, serta perikanan.

Grafik 4.18. menunjukkan perkembangan pertumbuhan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara triwulanan. Setelah terjadi perlambatan sepanjang tahun 2020, di awal tahun 2021 kinerja sektor ini mulai menunjukkan perbaikan. Namun, dapat dilihat bahwa pertumbuhan di tahun 2021 masih berada di bawah level normal sebelum pandemi.

Grafik 4.18 Pertumbuhan Triwulanan PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (% , yoy)



Sumber: BPS dan Kemenko Perekonomian, 2021 (diolah)



BPS mencatat pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan I 2021 mencapai 3,38% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja sub sektor tanaman pangan yang tumbuh hingga 10,32% karena adanya peningkatan luas panen tanaman padi serta cuaca yang mendukung panen raya padi. Subsektor tanaman hortikultura dan peternakan juga tumbuh masing-masing sebesar 3,02% (yoy) dan 2,48% (yoy) karena faktor cuaca yang lebih kondusif serta adanya optimalisasi produksi. Di sisi lain, subsektor kehutanan dan penebangan kayu mengalami kontraksi hingga 8,93% (yoy) akibat penurunan permintaan bahan baku kayu bulat untuk industri kayu.

Pada triwulan II 2021, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan yang cukup tajam, dimana hanya tumbuh sebesar 0,43% (yoy). Hal ini disebabkan oleh sub sektor tanaman pangan yang terkontraksi hingga 8,16% karena telah melewati musim panen padi. Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu juga mengalami kontraksi mencapai 4,40% (yoy) akibat penurunan produksi kayu gelondongan pada hutan tanaman industri. Namun demikian, beberapa sub sektor masih menjadi faktor pendorong seperti sub sektor perikanan dan peternakan yang tumbuh masing-masing sebesar 9,69% (yoy) dan 7,07% (yoy) karena adanya peningkatan produksi dan permintaan seiring pelonggaran pembatasan sosial.

Selanjutnya, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan III 2021 mengalami peningkatan dimana tumbuh sebesar 1,31% (yoy). Hal ini didorong oleh sub sektor tanaman perkebunan yang tumbuh 8,34% karena adanya peningkatan produksi seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan tebu. Sub sektor perikanan juga tumbuh mencapai 4,55% (yoy) karena adanya

peningkatan produksi baik budidaya maupun perikanan tangkap. Sementara itu, subsektor tanaman pangan dan hortikultura mengalami kontraksi masing-masing sebesar 5,80% (yoy) dan 5,23% (yoy) karena adanya penurunan produksi.

Pada triwulan IV 2021, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun tertahan. Survei Kegiatan Dunia Usaha oleh Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi penurunan kegiatan usaha pada sektor ini di triwulan IV sejalan dengan faktor musiman khususnya pada sub sektor tanaman pangan.

Berdasarkan indikator lain, perbaikan kinerja sektor ini ditunjukkan melalui kenaikan ekspor sektor pertanian pada Januari-September 2021 sebesar 6,37% (yoy) terutama pada ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah. Selain itu, harga rata-rata komoditas dunia menunjukkan perbaikan sepanjang tahun 2021. Harga minyak kelapa sawit mentah pada September 2021 tercatat sebesar US\$1.181,38/mt, naik hingga 48,37% (yoy). Di periode yang sama, harga karet TSR20 tercatat sebesar US\$1,63/kg atau naik sebesar 18,61% (yoy). Untuk komoditas perikanan, harga udang tercatat sebesar US\$14,67/kg atau naik 23,76% (yoy).

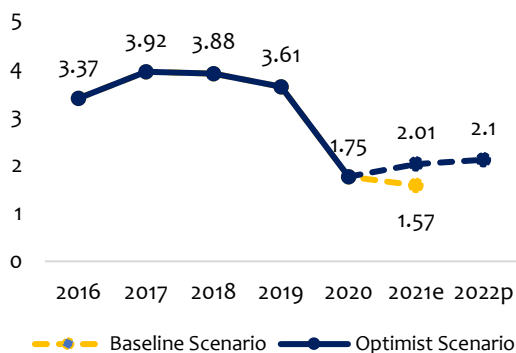
Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2021 secara keseluruhan didorong oleh pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi diperkirakan mampu meningkatkan permintaan bahan pangan yang sebelumnya mengalami gangguan dari sisi logistik serta daya beli masyarakat. Sementara itu, pemulihan ekonomi global diperkirakan mampu meningkatkan permintaan ekspor komoditas unggulan nasional seperti tanaman perkebunan dan perikanan. Namun demikian, faktor cuaca



masih menjadi risiko dalam pertumbuhan sektor ini. Cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi dan angin kencang masih perlu diwaspadai agar tidak mengganggu produksi hasil pertanian.

Kemenko Perekonomian memproyeksikan pada tahun 2021 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 1,57% hingga 2,01% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 1,75% (yoy). Sementara itu, pada tahun 2022 diproyeksikan kembali mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 2,14% (yoy). Perkembangan pertumbuhan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta proyeksinya ditunjukkan pada Grafik 4.19.

Grafik 4.19. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (% yoy)



Sumber: BPS dan Kemenko Perekonomian, 2021 (diolah)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk menghadapi risiko dan tantangan di tahun 2021. Terkait risiko cuaca ekstrem, pemerintah terus mendorong penyamaan validasi cuaca dengan BMKG. Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan strategis.

Untuk menangkap peluang perkembangan tanaman hortikultura, Kemenko Perekonomian tengah melakukan pengembangan hortikultura orientasi ekspor serta pengembangan kemitraan *closed loop* hortikultura. Kebijakan terkait tanaman perkebunan dilakukan melalui pengembangan peremajaan sawit rakyat dan peremajaan karet rakyat. Selanjutnya, kebijakan terkait peternakan dilakukan melalui pengembangan usaha peternakan terintegrasi. Sementara untuk perikanan dilakukan melalui pengembangan industri rumput laut.

Bantuan pemerintah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih terus berlangsung. Kemenko Perekonomian melakukan koordinasi program padat karya infrastruktur pertanian yang meliputi pengembangan jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung pertanian, serta optimasi lahan. Selain itu, Kemenko Perekonomian juga melakukan koordinasi penyediaan dan pelaksanaan kartu tani untuk pupuk bersubsidi.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 diperkirakan akan tetap tumbuh positif. Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2022, arah kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan tahun 2022 diimplementasikan dalam beberapa rencana strategis pemerintah, antara lain: 1) peningkatan efektivitas program *food estate*, 2) penggunaan Kartu Tani untuk subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran, 3) peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, 4) perbaikan kebijakan importasi produk pangan strategis, serta 5) pembangunan infrastruktur dukungan.

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan, Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun 2022 mencapai Rp76,90 triliun. Sebagian



besar anggaran dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat baik belanja K/L maupun non-K/L, serta TKDD. Melalui berbagai agenda kebijakan serta dukungan pendanaan, diyakini pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat terus tumbuh dan menjadi penopang pertumbuhan nasional.

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

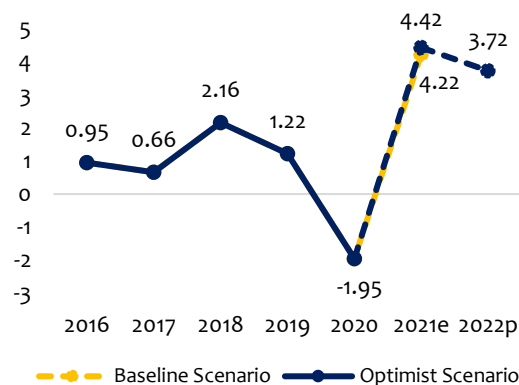
Kinerja sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2021 masih dipengaruhi oleh perkembangan kasus COVID-19 secara nasional dan global serta respon kebijakan yang dikeluarkan dalam mendorong keseimbangan produksi dan stabilitas harga komoditasnya.

Pada triwulan II 2021, kinerja sektor pertambangan dan penggalian mengalami eskalasi pertumbuhan sebesar 5,22% (yoy). Berdasarkan data BPS (2021), kinerja sektor ini paling besar didukung oleh peningkatan produksi pada subsektor pertambangan bijih logam dan subsektor pertambangan batubara dan lignit. Pertumbuhan bijih logam tumbuh sebesar 18,08% (yoy) yang didorong oleh meningkatnya produksi tembaga dan emas di Papua. Selanjutnya, untuk subsektor pertambangan batubara dan lignit dapat tumbuh sebesar 13,27% (yoy). Selain itu, subsektor pertambangan dan penggalian lainnya tumbuh 1,82% (yoy) seiring dengan meningkatnya ekspor barang penggalian seperti kerikil, tanah liat, batu hias, dan batu bangunan.

Walaupun beberapa subsektor tercatat mengalami pertumbuhan, namun tidak terjadi dengan subsektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi yang ternyata mengalami kontraksi sebesar 5,06% (yoy). Hal tersebut disebabkan adanya penurunan hasil produksi secara alamiah. Namun demikian, pada periode Januari hingga

Oktober 2021 tercatat realisasi lifting minyak bumi sudah mencapai 661 ribu BOPD, atau sebesar 94% dari target APBN 2021 (705 ribu BOPD) dan gas 5.481 MMSCFD atau sebesar 97% dari target APBN 2021 sebesar 5.638 MMSCFD. Sementara itu, Investasi hulu migas per 30 September 2021 tercatat USD 7,87 Miliar.

Grafik 4.20 Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian (% , yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021 (diolah)

Pada triwulan III 2021, kinerja sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami eskalasi pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 7,78% (yoy). Hal ini didukung oleh peningkatan produksi pada beberapa komoditas. Pertambangan bijih logam tumbuh sebesar 24,73% (yoy) yang didorong oleh peningkatan produksi tembaga dan emas di distrik mineral Grasberg, Papua. Selanjutnya pertambangan batu bara dan lignit juga tumbuh 14,95% (yoy) yang didorong oleh peningkatan ekspor batu bara sebesar 27,96%. Di sisi lain, pertambangan dan penggalian juga mampu tumbuh sebesar 2,49% yang didorong oleh peningkatan ekspor komoditas penggalian seperti kerikil, tanah liat, batu mulia, kapur dan dolomit. Namun demikian, subsektor pertambangan migas dan panas bumi mengalami perlambatan (kontraksi)



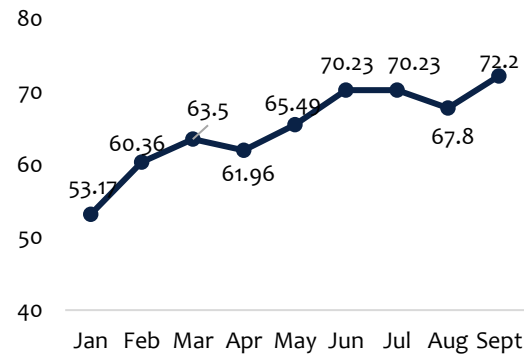
pertumbuhan sebesar 2,23% akibat penurunan produktivitas sumur yang terjadi secara alamiah.

Pada subsektor migas, SKK Migas memberitakan bahwa pada akhir triwulan III 2021 tercatat capaian *Reserve Replacement Ratio* (RRR) telah memberikan tambahan cadangan migas sebesar 521 MMBOE atau setara dengan 83,3% dari keseluruhan target tahun 2021 sebesar 625 MMBOE. Prognosa capaian RRR pada bulan November 2021 akan mencapai sekitar 134%. Penambahan cadangan migas secara signifikan diperkirakan akan terjadi di bulan November dan Desember 2021. SKK Migas memperkirakan setidaknya capaian RRR di akhir tahun adalah sebesar 186%. Selanjutnya, sampai pada triwulan III 2021 realisasi lifting migas sudah mencapai 1.640 (BOEPD) atau sebesar 96% dari target APBN 2021. Pencapaian target lifting tersebut tentunya tidak terlepas dari kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang didorong mampu mencapai target lifting migas di atas 100%. Untuk minyak, terdapat 7 KKKS yang mencapai di atas 100% target lifting. Adapun untuk gas, terdapat 9 KKKS yang berhasil mencapai lifting gas di atas 100%.

Dari sisi harga, harga minyak mentah Indonesia (ICP) perkembangannya mengikuti arah harga minyak mentah dunia. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia bulan Oktober 2021 tercatat 81.80 USD per barel. Sejak akhir triwulan II (bulan Juni) diketahui bahwa terjadi penguatan fundamental pasar minyak mentah yang ditandai dengan peningkatan permintaan minyak mentah di AS, Tiongkok dan Eropa, serta perbaikan aktivitas ekonomi dunia yang sejalan dengan percepatan program vaksinasi COVID-19. Di AS juga terjadi peningkatan penggunaan kendaraan bermotor saat *summer driving season* seiring

pelonggaran pembatasan aktivitas dan tingkat vaksinasi yang terus meningkat.

Grafik 4.21 Perkembangan ICP pada tahun 2021 (US\$ per barel)



Sumber: KemenESDM, diolah (2021)

Selanjutnya, pada rentang waktu triwulan III, OPEC melalui publikasi di bulan Agustus 2021 menaikkan proyeksi tingkat produksi tahun 2021 sebesar 24 ribu barel per hari menjadi 64 juta barel per hari. OPEC juga melaporkan proyeksi inventory minyak dunia pada triwulan III 2021 lebih tinggi sebesar 160 ribu barel per hari dibandingkan dengan publikasi bulan sebelumnya. Untuk tahun 2021 dilakukan revisi naik sebesar 240 ribu barel per hari. Selanjutnya dalam publikasi tersebut digambarkan bahwa permintaan minyak triwulan III 2021 tetap pada 98,23 juta barel per hari dan untuk proyeksi *full year* tahun 2021 yaitu sebesar 96,6 juta barel per hari.

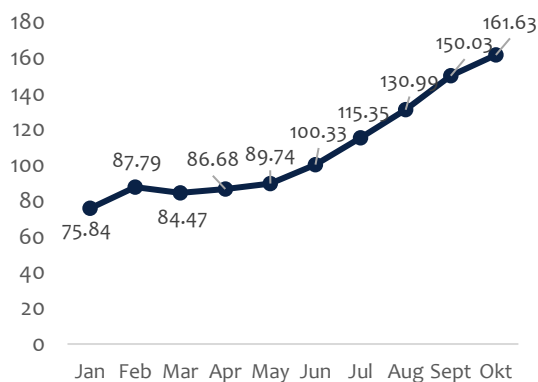
Pada subsektor batubara, Kementerian ESDM mencatat bahwa hingga kuartal III 2021, produksi batubara nasional mencapai 450 juta ton atau sekitar 72% dari target tahun ini. Hingga akhir tahun, Kementerian ESDM memproyeksikan produksi batubara akan mencapai 610 juta ton, atau lebih rendah dari target produksi yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 625 juta ton. Hal tersebut dipengaruhi utamanya oleh curah hujan yang tinggi sehingga tempat-tempat sumber produksi utama seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mengalami



gangguan operasional. Pada tahun 2021, Kementerian ESDM menargetkan kebutuhan DMO sebesar 137,5 juta ton. Hingga triwulan III 2021 realisasi telah mencapai 98 juta ton atau sebesar 71,3%.

Dari sisi harga, perkembangan Harga Batubara Acuan (HBA) juga terus mengalami perbaikan. Tren kenaikan harga batubara ini utamanya didorong oleh peningkatan permintaan dari Tiongkok akibat periode musim hujan di negara tersebut, serta semakin tingginya harga domestik batubara setempat. Kenaikan permintaan (Tiongkok) untuk keperluan pembangkit listrik yang melampaui kapasitas pasokan batubara domestik. Berikut perkembangan HBA sejak Januari s.d Oktober 2021:

Grafik 4.22 Perkembangan HBA pada tahun 2021 (US\$ per ton)



Sumber: KemenESDM, diolah (2021)

Mengacu pada kondisi triwulan sebelumnya yang menggambarkan perbaikan pada sisi harga dan pemenuhan target produksi, maka pada triwulan IV 2021 sektor pertambangan dan penggalan diproyeksikan tetap mengalami eskalasi pertumbuhan sebesar antara 6,01 s.d 6,81% (yoy) sehingga secara *full year* sektor ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,22 s.d 4,42% (yoy).

Walaupun pertumbuhan diproyeksikan tetap terjadi namun terdapat *downside risk* yang dihadapi. Pada tahun 2021 ini, tren

penurunan lifting migas terjadi dikarenakan penurunan produksi ilmiah yang lebih cepat pada beberapa wilayah kerja KKKS. Begitu juga beberapa dari proyek migas yang semula diperkirakan *on stream* pada tahun ini diperkirakan mengalami keterlambatan, seperti Pasir Petroleum, Pacific Oil & Gas, SGE, Eni East Sepinggan, PEPC (Lapangan Jambaran Tiung Biru/JTB), dan Tangguh Train-3.

Pada tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalan diproyeksikan sebesar 3,72% (yoy) yang diharapkan menuju kondisi pemulihan seiring dengan perbaikan pada kondisi perekonomian dalam negeri dan global. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang semakin masif dilakukan dan penanganan kasus COVID-19 yang semakin terkendali menjadi faktor pendorong utama dalam menumbuhkan optimisme pasar sehingga akan mampu memperbaiki permintaan komoditas pertambangan.

Pada tahun 2022, berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat *on stream*, diantaranya adalah proyek JTB, lapangan MDA dan MDH pada blok Madura Strait, serta Tangguh Train-3.

Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran dalam *Work Program & Budget* (WP&B), serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting agar tidak mengalami penurunan. Selanjutnya, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi RAPBN 2022 ditetapkan harga minyak 63 US\$/bareil, lifting



minyak sebesar 703 rbph, dan lifting sebesar gas 1.036 rbsmph.

Dalam jangka menengah, upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai kebijakan sejalan dengan arah transformasi target produksi sektor hulu migas sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030. Pemerintah akan berupaya meningkatkan produksi migas melalui pelaksanaan program-program utama seperti pengeboran rutin, percepatan *plan of development*, peningkatan *recovery factor* lapangan eksisting dengan *Enhanced Oil Recovery*, maupun dengan melakukan perbaikan daya tarik investasi secara berkelanjutan dalam rangka mendorong aktivitas eksplorasi baru yang masif.

Beberapa potensi proyek pengembangan lapangan migas besar (*giant field*) yang diharapkan dapat menjadi sumber produksi baru di masa depan, di antaranya Blok Indonesian Deep Water (IDD) diperaian Sulawesi, Blok Masela di Maluku, serta Sakakemang di wilayah Sumatera. Dengan melihat kondisi eksisting, potensi dan tantangan, serta upaya reformasi kebijakan dan tata kelola hulu migas, lifting minyak dan gas bumi dalam jangka menengah diprediksi masing-masing berada pada kisaran 575 – 808 ribu bph dan 1.047 – 1.365 ribu bsmph.

INDUSTRI PENGOLAHAN

Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB nasional. Dalam setidaknya 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PDB Industri Pengolahan berada pada kisaran 20,0% dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 20,5% kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2020 mencapai 19,88%. Kontribusi sektor Industri Pengolahan khususnya pada

sub sektor non migas didominasi oleh industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri farmasi, industri elektronik dan industri alat angkutan. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan pada tahun 2016 hingga 2018 berada pada kisaran 4,3% (yoy). Pada tahun 2019, pertumbuhan PDB Industri Pengolahan melambat pada 3,80% (yoy) sebagai dampak dari perang dagang antara AS dan Tiongkok. Pada tahun 2020, pertumbuhan PDB industri pengolahan mengalami kontraksi pada -2,93%(yoy) sebagai akibat dari pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi.

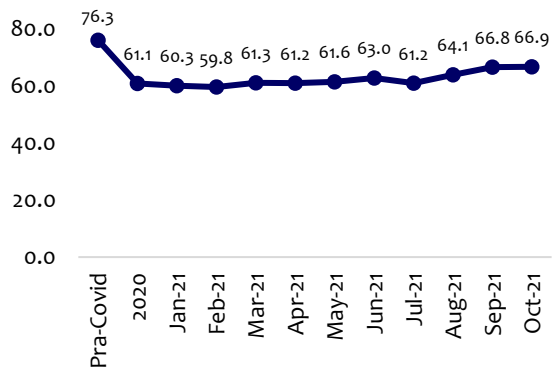
Sektor Industri Pengolahan masih konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor selama Januari-Oktober 2021 yaitu sebesar USD 186,32 Miliar (77,16%). Sub sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai ekspor non-migas yaitu: industri makanan dan minuman (lemak dan minyak hewan/nabati) sebesar 15,48%; industri bahan kimia (bahan bakar mineral) sebesar 14,42%; dan industri logam dasar (besi dan baja) sebesar 9,42%. Pemerintah tetap fokus untuk meningkatkan kinerja industri berorientasi ekspor yang memiliki keunggulan komparatif dan keberlanjutan. Kebijakan Industri pengolahan berorientasi ekspor difokuskan pada 5 sub sektor prioritas yang selaras dengan kebijakan Making Indonesia 4.0. Capaian pertumbuhan PDB (yoy) dari 5 sub sektor prioritas tersebut pada Triwulan-III 2021 yaitu: industri kimia (9,71%), industri tekstil dan produk tekstil (-3,34%), industri makanan dan minuman (3,49%), industri elektronik (-8,06%), dan industri otomotif (27,84%).

Sejak awal 2021, utilisasi industri telah menunjukkan tren peningkatan. Pada Maret 2021 nilai utilisasi industri mencapai 61,30% dengan tiga sektor industri yang telah mencapai nilai di atas 70,0% yaitu: industri



minuman, industri kimia dan barang kimia, serta industri tekstil. Hingga Oktober 2021, utilisasi industri terus mengalami peningkatan hingga mencapai nilai 66,90%.

Grafik 4.23. Perkembangan Utilisasi Industri Pengolahan (%)



Sumber: Kementerian Perindustrian, 2021

Setelah mengalami perbaikan kinerja pertumbuhan pada triwulan I dan II-2021, PDB Industri Pengolahan kembali tertekan akibat gelombang peningkatan kasus varian delta pada bulan Juni-Juli di Indonesia. Sebagaimana telah terjadi di tahun 2020, terdapat hubungan antara peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 dengan nilai PDB yang dihasilkan pada periode tersebut. Peningkatan kasus yang menyebabkan diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat berakibat pada berkurangnya transaksi ekonomi. Kondisi serupa diduga akan berulang pada hari raya besar di mana terjadi peningkatan mobilitas masyarakat.

Dalam rangka menciptakan kestabilan kondisi perekonomian dan kesehatan masyarakat, pemerintah berupaya untuk mencapai target *herd immunity* dengan pelaksanaan vaksinasi secara agresif. Hingga tanggal 25 Oktober 2021, jumlah vaksinasi di Indonesia telah mencapai 54,90% untuk dosis pertama dan 33,18% untuk dosis kedua terhadap total target penduduk. Hal ini merupakan sinyal yang baik terhadap prospek perekonomian Indonesia,

mengingat profil risiko investasi suatu negara salah satunya dinilai berdasarkan capaian jumlah vaksinasi terhadap total penduduk. Diharapkan dengan pelaksanaan program vaksinasi yang terus berlanjut dan penerapan protokol kesehatan secara ketat, maka tingkat penularan dan tingkat keparahan COVID-19 dapat ditekan sehingga mobilitas masyarakat dapat meningkat.

Sebagai upaya peningkatan produktivitas di sektor manufaktur, Pemerintah melanjutkan kebijakan penerbitan IOMKI (Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri), yang mengatur pelaksanaan aktivitas industri dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Hingga 13 November 2021 pemerintah telah menerbitkan 17.397 IOMKI, meskipun demikian 5.423 diantaranya telah dicabut karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan data *google mobility index*, mobilitas masyarakat untuk kegiatan ritel dan rekreasi pada bulan Oktober mencapai nilai tertinggi sepanjang tahun 2021. Hal ini memberikan sinyal pemulihan ekonomi yang secara konsisten terus berlanjut. Hal ini juga didukung dengan *Manufacture Purchasing Managers Index* Indonesia yang mencapai level ekspansif sejak September 2021, dan mencapai nilai 57,2 pada Oktober 2021. Selain itu nilai *Prompt Manufacturing Index* pada triwulan IV-2021 juga diproyeksikan meningkat pada level ekspansif yaitu 51.17%. Nilai SKDU sektor industri pengolahan pada triwulan IV-2021 juga diproyeksikan membaik menjadi 1,13 SBT. Dari sisi permintaan, indeks pembelian *durable goods* mengalami peningkatan pada September 2021. Hal ini diharapkan akan terus berlanjut mengingat juga terjadi peningkatan pada indeks ketersediaan lapangan kerja di periode yang sama.

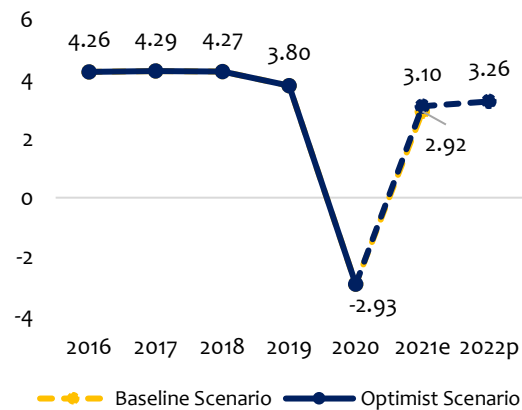


Dari sisi eksternal, penguatan ekspor hasil manufaktur besi dan baja diekspektasikan akan berlanjut hingga tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai negara mitra ekspor utama untuk produk besi dan baja. Selain itu, perkembangan investasi pada sektor Industri Pengolahan bahan tambang juga diekspektasikan akan berlanjut seiring dengan implementasi kebijakan hilirisasi tambang dan meningkatnya kebutuhan produk olahan tambang, salah satunya produk nikel dan turunannya. Dengan optimisme tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor eksternal cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB Industri Pengolahan. Risiko varian-varian baru COVID-19 tetap menjadi pertimbangan pemerintah, mengingat periode vaksinasi dan efikasi vaksin yang berbeda-beda.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan berupaya untuk meningkatkan permintaan dan menjaga penawaran dari sektor Industri Pengolahan. Salah satunya adalah kebijakan relaksasi PPnBM untuk sektor otomotif yang ditetapkan melalui PMK No. 31 Tahun 2021 dan Kepmenperin No. 839 Tahun 2021.. Kebijakan tersebut turut meningkatkan perdagangan dan penjualan mobil yang mengalami kontraksi pada awal pandemi. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk memperkuat struktur industri dalam negeri melalui program substitusi impor 35% di tahun 2022. Melalui program ini, pemerintah juga menetapkan kewajiban untuk berbelanja produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimum yang dipersyaratkan. Langkah strategis ini ditempuh untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah juga terus mengoptimalkan *National Logistics Ecosystem* guna meningkatkan efisiensi rantai pasok industri dalam negeri. Dengan berbagai kebijakan

tersebut, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan PDB Industri Pengolahan berada pada kisaran 2,92% - 3,10% (yoy) pada tahun 2021, dan 3,26% (yoy) pada tahun 2022.

Grafik 4.24. Perkembangan Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)



Sumber: BPS dan Kemenko Perekonomian, 2021

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

Sektor pengadaan listrik dan gas di tahun 2020 yang lalu mencatatkan pertumbuhan sebesar -2,34% akibat pandemi COVID-19 yang juga memberikan dampak pada sektor ini. Konsumsi listrik yang menurun pada pelanggan industri dan bisnis serta penyaluran gas di tiga provinsi seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang juga mengalami penurunan turut menarik sektor ini pada area kontraksi.

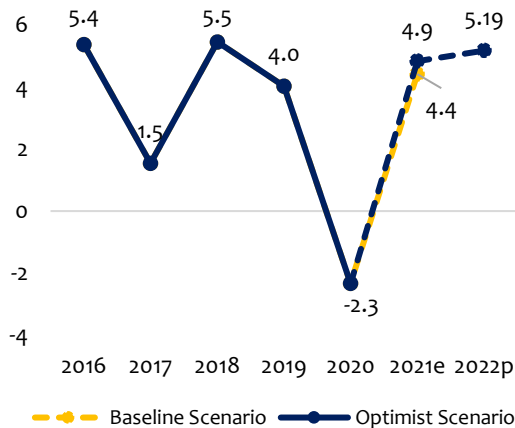
Sejak awal tahun 2021 hingga triwulan III, sektor pengadaan listrik dan gas kembali bangkit dan berada pada tren yang positif. Pada triwulan I, sektor ini dapat tumbuh 1,68% (yoy), kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan yang sangat tinggi di triwulan II yang mencapai 9,09% (yoy) dan dapat bertahan di area positif di triwulan III dengan capaian pertumbuhan 3,85% (yoy).

Di tahun 2021, Kemenko Perekonomian memproyeksikan pertumbuhan pada sektor pengadaan listrik dan gas akan berada di



wilayah positif, yaitu berada pada rentang 4,4% s.d 4,9% (yoy). Sementara di tahun 2022, pertumbuhan sektor Pengadaan Listrik dan Gas akan tumbuh 5,2% (yoy).

Grafik 4.25. Pertumbuhan PDB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (%)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Selain karena dipengaruhi *baseline effect*, optimisme tersebut didasarkan pada peningkatan konsumsi listrik nasional hingga Q3-2021 meningkat 4,4 persen (yoy) menjadi 189,7 tWh. Peningkatan konsumsi listrik nasional ini terjadi akibat meningkatnya jumlah pelanggan sejak awal tahun hingga September 2021 yang mencapai 2,6 juta pelanggan, sehingga jumlah pelanggan listrik nasional saat ini mencapai 81,6 juta pelanggan.

Seiring dengan masifnya vaksinasi dan kondisi pandemi yang mulai terkendali di Indonesia, beberapa sektor kegiatan ekonomi seperti rumah tangga, industri, dan bisnis retail turut kembali terakselerasi. Pada sektor bisnis, konsumsi listrik tumbuh 3,6%, sementara pertumbuhan konsumsi listrik di sektor industri bahkan mencapai 11,5%. Bisnis retail memiliki karakteristik yang lebih sensitive terhadap COVID-19 karena berkaitan dengan kegiatan perdagangan, sehingga pertumbuhannya relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor industri yang relatif tetap pertumbuhannya. Sementara

dari sektor rumah tangga, konsumsi listrik mengalami pertumbuhan 3,9%.

Masih dari sisi konsumsi, pemerintah telah meneruskan subsidi diskon tarif listrik hingga Desember 2021 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional. Tercatat hingga 22 Oktober 2021, realiasi dari Program Diskon Listrik ini telah mencapai Rp5,63 Triliun (59,3% dari pagu Rp9,49 Triliun). Program tersebut telah berhasil disalurkan kepada 32,6 juta penerima.

Program peningkatan rasio elektrifikasi oleh Pemerintah hingga akhir September 2021 telah terealisasi mencapai 99,4%. Di tahun 2022, Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi dapat mencapai 100%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan program bantuan pasang baru listrik melalui anggaran APBN dengan target berjumlah 80 ribu sambungan di tahun 2022. Perhatian khusus akan diberikan pada beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Jika target tersebut tercapai maka penyaluran listrik pun akan meningkat.

Realisasi penambahan pembangkit sejak awal tahun hingga September 2021 mencapai 936,62 MW (15% dari 6.187,91 MW yang dicanangkan di tahun 2021). Dengan penambahan tersebut, total kapasitas pembangkit terpasang per September 2021 mencapai 73.688 MW, dengan rincian PLTU sebanyak 36.975 MW, PLTGU 12.412 MW, PLTG/MG 8.679 MW, PLTD 4.968 MW, PLTP 2.188 MW, PLTA 6.400 MW, dan PLT EBT lainnya 2.066 MW.

Di tahun 2021, Pemerintah telah menargetkan investasi di sektor listrik sebesar USD9,9 Miliar. Hingga bulan September 2021, realiasi dari target tersebut telah mencapai USD4,22 miliar (42,6% dari target). Nilai investasi USD4,22 miliar tersebut meliputi investasi



pembangkit oleh PLN sebesar USD0,99 miliar oleh PLN dan USD1,46 miliar oleh IPP, investasi terintegrasi USD0,04 miliar oleh PPU, investasi transmisi USD0,61 miliar oleh PLN, investasi gardu induk USD0,36 miliar oleh PLN, dan investasi distribusi USD0,76 miliar oleh PLN.

Investasi penambahan transmisi hingga September 2021 telah terealisasi sebesar 1.910,06 kms (40,1% dari target 4.765,90 kms). Investasi penambahan jaringan distribusi telah teralisasi 9.915,63 kms (23,2% dari target 42,714 kms), dan investasi penambahan gardu distribusi sebesar 1.002,63 MVA (33,2% dari target 3.022 MVA). Disamping berbagai realisasi tersebut, juga terdapat penambahan gardu induk mencapai 4.521 MVA (53,4% target 8.460 MVA).

Disamping berbagai investasi tersebut, Perusahaan Listrik Negara (PLN) di tahun 2021 ini juga telah mendapatkan Penyertaan Modal Negara yang mencapai Rp5 Triliun untuk pembangunan transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik masuk desa. Di tahun 2022, disebutkan juga bahwa terdapat lima BUMN yang akan diberikan PMN tunai dengan total mencapai Rp42,9 Triliun, dimana salah satunya adalah PLN dengan nilai Rp5 Triliun untuk program dan kegiatan yang sama.

Selanjutnya, dari subsektor pengadaan gas, terjadi peningkatan distribusi gas kota yang cukup signifikan pada provinsi dengan penggunaan gas kota terbesar seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur, dengan peningkatan masing-masing 16,33%, 21,15%, dan 11%. Disamping itu, hingga triwulan III-2021, terjadi penambahan pelanggan retail dan industri umum yang tersebar di wilayah operasional Perusahaan Gas Negara (PGN).

Hingga Q3-2021, terjadi peningkatan permintaan dan pemanfaatan gas domestic

yang cukup baik. Tercatat, pemanfaatan gas domestik mencapai 65,91%, sedikit diatas target yang telah ditetapkan (65%). Lifting gas bumi hingga Q3-2021 telah mencapai 1.003 MBOEPD. Peningkatan lifting migas akan terus diupayakan melalui produksi pada lapangan eksisting, percepatan transformasi *resources* menjadi produksi dengan mempercepat POD lapangan baru dan rencana pengembangan lapangan-lapangan yang tertunda, optimalisasi pemberian insentif, dan monetisasi *undeveloped discovery*.

Selanjutnya kebijakan pendorong yang akan mendorong subsektor gas untuk terus tumbuh positif pada tahun 2021 dan 2022 diantaranya adalah realisasi pembangunan fisik jaringan gas hingga Q3-2021 telah mencapai 86,95%. Dari proyek-proyek strategis nasional, terdapat Proyek Jambaran-Tiung Biru yang sudah persiapan *onstream*, dimana realisasi pembangunannya hingga Q3-2021 sudah mencapai 94,26%. Proyek yang memiliki estimasi produksi sebesar 190 MMSCFD dengan nilai investasi USD1,53 miliar ini diperkirakan akan dapat *onstream* pada Q4-2021. Proyek lainnya adalah Proyek Tangguh Train III yang hingga Q3-2021 progresnya telah mencapai 91,2% untuk proyek *onshore* dan 99,2% untuk *offshore*. Saat *onstream* di Q2-2022, diharapkan proyek dengan nilai investasi USD8,9 miliar ini dapat memberikan kontribusi sebesar 700 MMSCFD dan 3.000 BCPD. Dengan adanya proyek-proyek gas yang akan mulai menyalurkan gas-nya di tahun 2021 ini, maka akan meningkatkan PDB di sektor Listrik dan Gas.

Selanjutnya di tahun 2022, Perusahaan Gas Negara menargetkan untuk dapat memenuhi pasokan gas di 41 kota dan kabupaten dengan layanan virtual pipeline. Target pembangunan jaringan pipa gas



rumah tangga di tahun 2022 adalah sebanyak 469.699 sambungan rumah tangga dengan total kebutuhan mencapai 7,59 BBTUD.

Prediksi Kemenko Perekonomian di awal tahun lalu yang menyebutkan bahwa kebutuhan gas untuk ketenagalistrikan, industri, transportasi, serta rumah tangga akan terus meningkat sejalan dengan aktivitas perekonomian yang mulai meningkat, terbukti. Guna mendukung pertumbuhan sektor industri tertentu, pemerintah telah memberikan insentif harga gas menjadi sebesar USD6 per mmbtu melalui pengurangan bagian negara di hulu serta efisiensi di hilir. Diharapkan melalui kebijakan ini, perekonomian khususnya pada sektor listrik dan gas dapat tumbuh dengan lebih tinggi lagi.

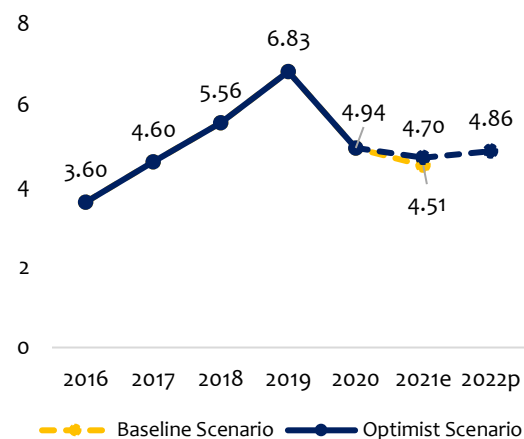
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan salah satu di antara beberapa sektor yang tetap bertumbuh selama pandemi. Peningkatan kebutuhan air untuk disinfeksi dan pengolahan limbah Rumah Sakit merupakan faktor pendorong pertumbuhan tersebut. Meskipun demikian pertumbuhan sektor ini melambat dari pertumbuhan sebelum pandemi. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan untuk kegiatan pengolahan limbah dan sampah industri. Hal ini tercermin pada pertumbuhan PDB di tahun 2020 yang tercatat sebesar 4,94%, melambat dari pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 6,83% (yoy).

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada semester I-2021, meskipun terjadi gelombang baru kasus COVID-19 pada bulan Juni-Juli, namun diyakini bahwa perekonomian secara

keseluruhan akan membaik pada semester II-2021. Oleh karena itu, dengan optimisme membaiknya kinerja sektor pengguna jasa pengolahan air, limbah, sampah dan daur ulang seperti industri pengolahan, maka pertumbuhan sektor ini diproyeksikan akan terus berlanjut dan mengalami peningkatan.

Grafik 4.26. Perkembangan Pertumbuhan PDB Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang (% yoy)



Sumber: BPS dan Kemenko Perekonomian, 2021

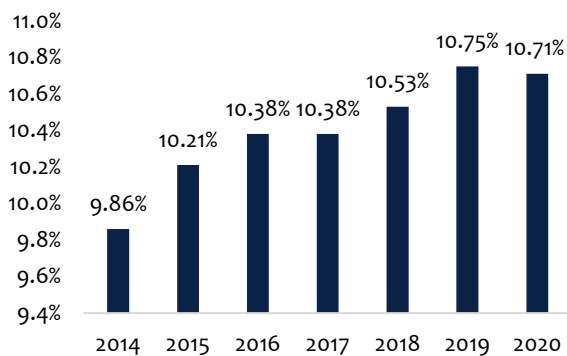
Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan pelaksanaan program pembangunan dan rehabilitasi 13 unit bendungan multiguna, revitalisasi 7 unit tampungan alami, dan modernisasi 398.123 ha daerah irigasi premium. Dengan berbagai program pemerintah dan optimisme pemulihan aktivitas industri tersebut, maka PDB pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2021 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran 4,51% - 4,70% (yoy). Sementara itu pada tahun 2022, diharapkan pelaksanaan vaksinasi telah mencapai 100% dari target untuk mencapai *herd immunity*. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor diproyeksikan akan meningkat. Sebagai akibatnya permintaan terhadap jasa Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang juga akan meningkat yang diproyeksikan sebesar 4,86% (yoy).



KONSTRUKSI

Sektor konstruksi pada tahun 2020 lalu secara kumulatif mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -3,26% (yoy). Hal ini diakibatkan oleh diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta menurunnya kinerja perekonomian terutama pada realisasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur meskipun belanja modal pemerintah mengalami peningkatan.

Grafik 4.27. Kontribusi PDB Sektor Konstruksi terhadap PDB Nasional (%)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Pada tahun 2021, hingga triwulan III pertumbuhan dari sektor konstruksi telah berhasil kembali kepada tren yang positif, dimana secara *year-on-year* pertumbuhan sektor konstruksi yang awalnya mencatatkan pertumbuhan -0,79% di triwulan I, mulai mengalami peningkatan dengan tumbuh 4,42% dan 3,84% di triwulan II dan III. Secara kumulatif hingga triwulan ketiga, sektor ini telah mencatatkan pertumbuhan 2,43%.

Pulihnya sektor Konstruksi di tahun 2021 didorong oleh beberapa hal, yaitu terjadi peningkatan realisasi belanja modal pemerintah untuk bangunan sebesar 42,20%. Di samping itu, terjadi pula peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur sejalan dengan meningkatnya impor bahan baku untuk aktivitas konstruksi. Hal ini tercermin dari realisasi pembangunan Proyek Strategis

Nasional (PSN) yang hingga triwulan III dapat menyelesaikan 12 proyek dengan nilai investasi Rp29,9 Triliun. Selain itu, terdapat 26 Proyek yang telah beroperasi sebagian.

Realisasi proyek PSN yang relatif sama dibanding tahun lalu ini dipengaruhi oleh penerapan protokol kesehatan yang masih ketat diberlakukan untuk sektor konstruksi dan sempat diterapkannya PPKM Darurat pada pertengahan tahun 2021 ini. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap pelaksanaan konstruksi PSN sehingga berdampak kepada perlambatan penyelesaian PSN.

Refokusng anggaran infrastruktur di tahun 2021 akibat kasus COVID-19 yang sempat meningkat juga berperan dalam perlambatan penyelesaian proyek-proyek ini. Pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan dan bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi.

Realisasi konsumsi semen domestik di triwulan III meningkat 26,93% (q-to-q) dan secara kumulatif di tahun 2021 hingga September juga telah mencatatkan pertumbuhan 4,6% (yoy). Diperkirakan, hingga akhir tahun ini realisasi konsumsi semen akan dapat tumbuh pada kisaran angka 6% (yoy).

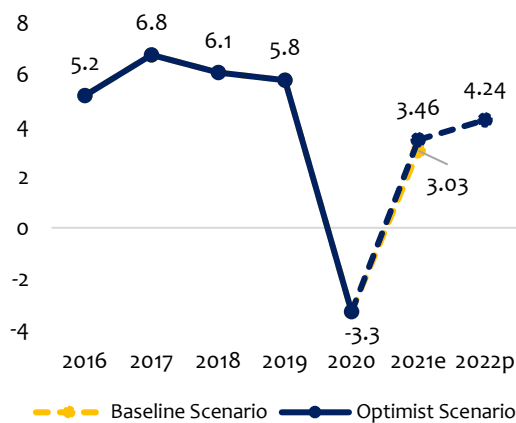
Di tahun 2021, Kemenko Perekonomian memproyeksikan sektor konstruksi akan mampu tumbuh sebesar 3,0 s.d 3,5% (yoy). Sedangkan di tahun 2022, diperkirakan sektor ini akan terus mengalami perbaikan dan dapat mencatatkan pertumbuhan pada rentang 4,2%. Optimisme tersebut didasarkan pada indikator konsumsi semen yang diproyeksikan dapat tumbuh sekitar 6% di tahun 2021. Sementara di tahun 2022, konsumsi semen diperkirakan akan tumbuh sebesar 5%.

Selain itu, optimisme proyeksi tersebut juga didasari oleh perkiraan bahwa terdapat 15



Proyek Strategis Nasional yang akan selesai sampai Desember 2021. Adapun 15 proyek tersebut diantaranya adalah 3 Proyek Jalan, 1 Proyek Kereta Api Bandara, 2 Kawasan Industri, 1 Perumahan, 7 Bendungan, dan 1 Lapangan Unitisasi Gas. Total nilai investasi pada 15 PSN tersebut berjumlah Rp190,8 triliun.

Grafik 4.28. Pertumbuhan PDB Sektor Konstruksi (%)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Dari sisi APBN, belanja modal pemerintah pada tahun 2021 hingga bulan September mengalami pertumbuhan 62,2% (yoy) atau telah terealisasi Rp118,7 triliun. Belanja modal tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengadaan peralatan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur di tahun 2022 mencapai sebesar Rp384,8 triliun. Jumlah tersebut merupakan 14,2% dari total belanja pemerintah, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi anggaran infrastruktur turun 7,8% dari tahun lalu yang mencapai Rp413,8 triliun. Meskipun demikian, jumlah anggaran tersebut masih terbilang cukup tinggi dan memberikan gambaran bahwa pemerintah masih akan melanjutkan rencana pembangunan infrastruktur guna mendukung peningkatan produktivitas dan konektivitas Indonesia.

Anggaran infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun akan dimanfaatkan untuk mendukung ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar dalam bentuk pembangunan rumah khusus 2.250 unit, pembangunan rumah susun 3.501 unit, sistem penyediaan air minum 222.425 SR, dan sistem pengolahan air limbah 7.904 KK. Sementara untuk penyediaan infrastruktur energi dan pangan, akan dilakukan pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 10.000 SR dan 105 ribu jaringan irigasi. Di samping itu, untuk konektivitas dan mobilitas, akan dibangun 205 km jalan baru, 8.244 m jembatan baru, jalan tol Trans Sumatera, 6.624 km' sp jalur Kereta Api, dan 6 Bandara baru. Infrastruktur dan akses TIK juga akan ditingkatkan melalui penyediaan 2.344 BTS di daerah 3T dan penyediaan kapasitas jaringan internet 25 GBPS melalui satelit.

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Pada tahun 2021 kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sangat dipengaruhi oleh perkembangan kasus COVID-19 yang berdampak pada pemberlakuan kebijakan Pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat (PSBB dan PPKM Mikro).

Pada triwulan II 2021, kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 9,44% (yoy). Berdasarkan data BPS (2021) perbaikan kinerja sektor ini disebabkan pertumbuhan positif pada subsektor pendukungnya terutama pada sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya yang tumbuh 37,88% (yoy). Subsektor perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor tumbuh positif 4,77% (yoy) setelah kuartal



sebelumnya masih mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 0,24%.

Perbaikan kinerja Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor didorong oleh (i) adanya program relaksasi PPnBM menyebabkan peningkatan penjualan mobil; dan (ii) meningkatnya belanja masyarakat seiring dengan pelonggaran jam operasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Pada triwulan III 2021, kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami perlambatan sejalan dengan diberlakukannya kembali kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun demikian, pada Triwulan III 2021 sektor ini masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,06% (yoy), Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan penjualan mobil sebagai dampak dari adanya program relaksasi PPnBM dan meningkatnya suplai barang impor. Di samping itu juga terjadi peningkatan beberapa produk penjualan ritel akibat meningkatnya produksi barang domestik khususnya produk industri makanan dan minuman serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) pada September 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan. Indeks Penjualan Riil September 2021 tercatat sebesar 189,5 terakselerasi dari bulan sebelumnya sebesar 2,1% (mtm). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh permintaan masyarakat yang masih terbatas. Sementara itu, kelompok bahan bakar kendaraan bermotor tercatat meningkat sejalan dengan membaiknya mobilitas seiring pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai wilayah.

Secara tahunan, kinerja penjualan eceran pada September 2021 mengalami -2.2% (yoy),

tidak jauh berbeda dari pertumbuhan -2.1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Beberapa kelompok yang tercatat menurun antara lain kelompok Suku Cadang dan Aksesori dan Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, sementara kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan. Namun demikian, penjualan bulan oktober meningkat baik secara bulanan maupun tahunan. Hal ini tercermin dari IPR Oktober 2021 sebesar 193,0 atau tumbuh 1.8% (mtm). Peningkatan akan terjadi pada kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, kelompok suku cadang dan aksesori, serta makanan, serta minuman dan tembakau.

Selanjutnya, berdasarkan data Bank Indonesia (2021) perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) optimis akan mencapai target. Nilai transaksi e-commerce di tahun 2021 diperkirakan akan mencapai Rp 395 triliun, atau tumbuh 48,4% (yoy), seiring dengan meningkatkan adopsi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional.

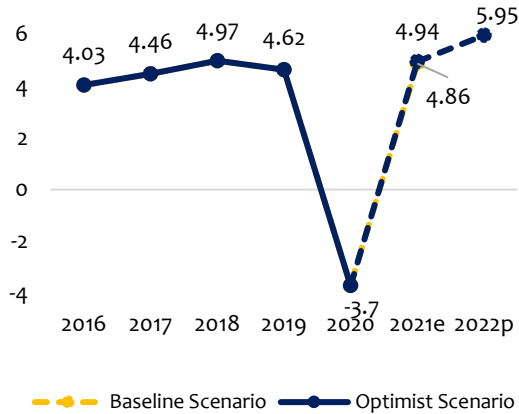
Mengacu pada kondisi triwulan sebelumnya yang menggambarkan bahwa optimisme konsumen masih terjaga, maka pada triwulan IV 2021 sektor kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap tumbuh positif pada rentang 6,41 s.d 6,74% (yoy) sehingga secara *full year* sektor ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,86 s.d 4,94% (yoy).

Optimisme tersebut sejalan dengan ekspektasi pemulihan dari sisi permintaan domestik yang juga ditunjukkan oleh peningkatan aktivitas produksi nasional. Indikator sektor riil sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di sejumlah daerah. Walaupun pertumbuhan diproyeksikan tetap terjadi namun terdapat *downside risk* yang dihadapi



yaitu perlambatan mobilitas di tengah kebijakan pembatasan mobilitas.

Grafik 4.29. Laju Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan (persen)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Pada tahun 2022, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diproyeksikan sebesar 5,95% (yoy). Upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2022 yaitu Kemenko Perekonomian mengeluarkan berbagai kebijakan terutama yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai faktor penting dalam pemulihan ekonomi.

Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui penguatan program bantuan sosial. Stimulus tersebut melalui pemberian program Bantuan Produktif, Bantuan subsidi gaji, Pra Kerja, dan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan sembako.

Dukungan terhadap dunia usaha ditunjukkan melalui kebijakan PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor dan PPN DPT Perumahan. Disamping itu, dukungan bagi pelaku UMKM melalui subsidi bunga UMKM, BPUM, Subsidi IJP, PMN BUMN, LPEI dan LPI, Penempatan Dana.

Secara rinci, insentif PPnBM ditujukan untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas. Program ini dirujukan untuk jenis mobil di bawah 1.500 cc dengan tipe mobil sedan dan gardan tunggal 4x2. Dimana segmen mobil sedan yang saat ini dikenakan PPnBM 30% maka pada Maret-Mei 2021 dibebaskan dari pungutan PPnBM, alias 0%. Kemudian, Juni-Agustus 2021 tarif PPnBM menjadi 15%. Lalu, pada September-Desember 2021 PPnBM yang dipungut sebesar 22,5%.

Sementara untuk segmen mobil *hatchback*, *multi purpose vehicle* (MPV), dan *sporty utility vehicle* (SUV) saat ini tarif PPnBM sebesar 10%. Dengan berlakunya insentif tersebut, sehingga pada periode pertama tarif PPnBM yang dikenakan sebesar 0%. Periode kedua, tarif PPnBM hanya 5%. Periode ketiga, pungutan PPnBM naik menjadi 7,5%.

Selanjutnya, Kemenko Perekonomian juga mendorong percepatan kebijakan penyederhanaan aturan yang menghambat kinerja ekspor, diantaranya penyederhanaan persyaratan dokumen (FTA), percepatan layanan secara *online*, dan pembebasan BM, serta meningkatkan layanan ekspor impor melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE).

Selain itu, negoisasi kemitraan dalam perjanjian dengan negara lain juga terus ditingkatkan, juga dalam rangka memperluas pasar-pasar untuk komoditi ekspor. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2021. Selain itu, dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja, diharapkan daya saing Indonesia juga terus meningkat.

Namun demikian, kecepatan pemulihan kinerja sektor perdagangan akan banyak dipengaruhi oleh efektivitas program vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam



penerapan protokol COVID-19 sehingga pemberlakuan kebijakan pembatas sosial perlahan mulai dilonggarkan.

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Sektor transportasi dan pergudangan yang merupakan sektor paling terdampak pandemi COVID-19, mulai perlahan mengalami perbaikan ke arah yang lebih positif di tahun 2021. Pada tahun 2021, di triwulan 1 kinerja sektor transportasi dan pergudangan masih mencatatkan kontraksi sebesar -13,12% (yoy) akibat pembatasan pergerakan masyarakat oleh Pemerintah guna mencegah penularan COVID-19 lebih jauh melalui kebijakan PPKM Mikro. Hal ini kemudian menyebabkan menurunnya jumlah perjalanan moda transportasi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, dimana sektor transportasi dan pergudangan masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif.

Namun demikian pada Q2-2021, sektor transportasi pergudangan mampu meraih pertumbuhan positif dan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi dengan besaran pertumbuhan 25,10% (yoy). Selain karena adanya *baseline effect* yang cukup rendah pada Q2-2020 lalu, peningkatan pergerakan penumpang di semua moda transportasi umum juga turut mendorong sektor ini untuk tumbuh seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas pergerakan di Q2-2021. Selain itu, faktor lain yang turut mendorong sektor ini juga adalah terjadinya peningkatan bongkar muat ekspor dan impor Indonesia seiring dengan mulai meningkatnya aktivitas perdagangan internasional akibat mulai pulihnya negara-negara mitra dagang Indonesia. Subsektor dengan pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Angkutan Udara (137,74% yoy), diikuti oleh Angkutan Rel (67,19% yoy), serta

Pergudangan dan jasa penunjang angkutan (33,62% yoy).

Pada triwulan III, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan kembali mengalami kontraksi sebesar -0,72% (yoy). Meningkatnya kasus COVID-19 pada awal Q3-2021 membuat pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sempat berakibat pada kembali menurunnya aktivitas masyarakat dan membuat sektor ini terkontraksi.

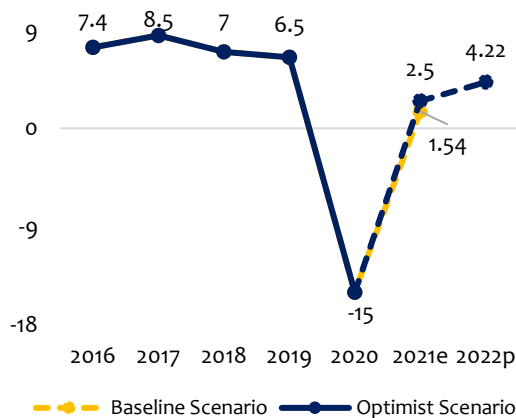
Namun demikian, pasca kasus COVID-19 yang mulai berangsur menurun dan kebijakan PPKM berdasarkan level asesmen diterapkan, aktivitas kegiatan masyarakat pun mulai berangsur meningkat. Menurut data Google Mobility Index per tanggal 25 Oktober 2021, secara rata-rata mobilitas masyarakat mencatatkan nilai indeks +2,7 atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan dasar pengukuran sebelum pandemi (nilai median periode 3 Januari hingga 6 Februari 2020). Namun demikian, mobilitas masyarakat pada stasiun transportasi masih mengalami penurunan sebesar -15%, sementara pada daerah perumahan mengalami peningkatan dengan berada pada angka +5%, lebih rendah dibandingkan dengan saat awal tahun yang berada pada level 19%. Dengan mobilitas masyarakat yang telah mulai berangsur meningkat, hal ini kemudian diperkirakan akan membawa dampak pada meningkatnya pertumbuhan di sektor transportasi dan pergudangan secara perlahan-lahan.

Beberapa *leading indicator* lainnya juga menunjukkan hal yang sejalan dengan mulai meningkatnya kegiatan masyarakat. Setelah pada tahun 2020 lalu jumlah penumpang pesawat menurun sebesar -62,9%. Di tahun 2021 hingga bulan Agustus, jumlah penumpang pesawat masih mengalami kontraksi namun telah mulai membaik, yaitu



mengalami pertumbuhan -31,09%. Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan mengalami peningkatan signifikan akibat membaiknya transaksi perdagangan internasional Indonesia dengan negara rekan dagang. Tercatat sejak Januari hingga Agustus 2021 secara kumulatif aktivitas bongkar muat di pelabuhan telah meningkat sebesar 48,12%. Penjualan kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan di tahun 2021 hingga triwulan III sebesar 32,82%.

Grafik 4.30. Pertumbuhan PDB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Dengan berbagai *leading indicator* yang semakin membaik, di tahun 2021 Kemenko Perekonomian memproyeksikan sektor transportasi dan pergudangan akan mengalami perbaikan pertumbuhan pada rentang 1,5% s.d 2,5% (yoy), sementara di tahun 2022 sektor ini akan dapat tumbuh pada 4,2% (yoy). Proyeksi tersebut didorong oleh berbagai faktor seperti *baseline effect* yang terjadi karena kontraksi pertumbuhan sektor ini yang cukup dalam di tahun sebelumnya dan juga perbaikan aktivitas di sektor transportasi pergudangan sebagaimana yang dicerminkan oleh *leading indicator* sebelumnya.

Kondisi sektor transportasi dan pergudangan ke depan diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan

peningkatan aktivitas masyarakat dan perekonomian yang meningkat akibat meningkatnya cakupan vaksinasi nasional dan mulai dilakukannya berbagai pelonggaran pembatasan dari pemerintah. Kebijakan sebelumnya yang mengharuskan orang yang ingin bepergian harus melakukan tes PCR sudah direlaksasi oleh pemerintah. Walaupun demikian, sektor ini tetap menghadapi *downside risk*, di mana pemerintah juga telah menghapus cuti bersama akhir tahun untuk mencegah penularan virus lebih jauh akibat peningkatan pergerakan masyarakat.

Meskipun demikian, guna mendorong sektor transportasi dan pergudangan dapat tumbuh lebih lanjut, Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang dapat menjadi pengungkit pertumbuhan pada sektor ini. Dari sisi infrastruktur bidang transportasi, hingga September 2021 terdapat 4 proyek jalan tol (Balikpapan-Samarinda; Medan-Binjai; Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, dan Sunter-Pulo Gebang) dan pengembangan Pelabuhan Kupang. Di samping itu, diperkirakan terdapat 3 jalan tol (Manado – Bitung, Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Serpong – Cinere), 1 fly over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong, dan 1 kereta api akses bandara baru Yogyakarta yang berpotensi selesai hingga Desember 2021. Berbagai proyek tersebut akan mulai beroperasi dan diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan di sektor transportasi dan pergudangan ke depan.

Dari sisi insentif yang diberikan oleh Pemerintah, insentif relaksasi PPnBM bagi pembelian kendaraan bermotor roda 4 yang telah diperpanjang hingga akhir tahun telah terealisasi cukup baik dan memberikan dampak yang signifikan. Insentif yang awalnya hanya berlaku untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc, kemudian diperluas dengan



menambahkan mobil yang berkapasitas mesin antara 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Kebijakan tersebut telah memberikan dampak peningkatan penjualan mobil sebesar 30,76% (c-to-c Januari-September). Diperkirakan, tren perbaikan pada meningkatnya permintaan atas kendaraan ini akan terus berlangsung hingga akhir tahun.

Di sisi angkutan udara, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dalam INACA White Papers memperkirakan bahwa pemulihan dari subsektor penerbangan diprediksi mulai membaik di awal 2022 untuk penerbangan domestik dan akan mencapai tingkat optimalnya pada 2024. Di tahun 2021, penumpang pesawat diperkirakan akan berada pada kisaran 43,76 juta hingga 49,5 juta penumpang. Sementara di tahun 2022, diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat kembali dan berada pada kisaran 48,68 juta hingga 55,07 juta penumpang. Vaksinasi merupakan *game changer* dari pulihnya sektor penerbangan ini.

Dari sisi angkutan laut, meningkatnya aktivitas perdagangan di dunia akan terus menjadi faktor pendorong pertumbuhan di subsektor ini. WTO memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 10,8% di tahun 2021. Proyeksi ini lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya mencapai 8%. Di tahun 2022, volume perdagangan barang diproyeksikan juga akan tetap tumbuh sebesar 4,7% (lebih tinggi daripada proyeksi sebelumnya yang hanya berada di 4%). Dengan meningkatnya arus barang, maka akan berdampak pula pada peningkatan aktivitas logistik dan pergudangan.

Transaksi *e-commerce* dan transportasi *online* yang meningkat pesat sepanjang pandemi juga diperkirakan akan terus melanjutkan tren baiknya, terutama untuk pemesanan dan pengiriman barang. Laporan

Lembaga Demografi FEB UI menyebutkan bahwa Gojek yang merupakan salah satu *unicorn* dalam bidang transportasi sepanjang tahun 2020 berkontribusi pada Rp249 Triliun atau 1,6% PDB Indonesia. Di tahun 2021 dan 2022, dengan adanya merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo, diperkirakan hal ini akan semakin mendorong transportasi *online* tumbuh dan mendorong pertumbuhan sektor transportasi secara keseluruhan.

Dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, diperkirakan masih akan mengalami pemulihan yang lambat. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2021 merevisi target kunjungan wisatawan mancanegara dari 4 hingga 7 juta kunjungan menjadi 1,5 hingga 2,1 juta kunjungan. Kemudian di tahun 2022, target wisatawan yang termuat dalam RKP 2022 adalah sebesar 1,8 hingga 3,6 juta orang. Meskipun demikian, status Pandemi Indonesia yang telah memasuki level 1 di mata internasional diharapkan dapat menjadi sentiment positif dan mendorong capaian kunjungan wisatawan mancanegara tersebut.

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Setelah mengalami kontraksi yang sangat dalam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan perbaikan di tahun 2021. Pada tahun 2020 BPS mencatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 10,22%. Kontraksi terdalam terjadi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar 21,97% ketika kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia sehingga mengharuskan pemerintah menerapkan pembatasan sosial di sejumlah wilayah.



Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu sektor yang terdampak paling besar mengingat sektor ini berkaitan erat dengan ruangan publik yang dibatasi selama pandemi COVID-19. Pada triwulan I 2021, kinerja sektor ini sudah menunjukkan perbaikan meskipun masih terkontraksi sebesar 7,26%. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan mobilitas masyarakat dan tutupnya sejumlah hotel dan restoran.

Penurunan mobilitas masyarakat terlihat dari menurunnya jumlah penumpang angkutan umum domestik. Pada Januari-Maret 2021, BPS mencatat penumpang angkutan udara, angkutan laut, dan kereta api mengalami penurunan masing-masing sebesar 58,68%, 38,90%, dan 58,08%. Pada periode yang sama, jumlah kunjungan wisman tercatat mengalami penurunan sebesar 85,45% (yoy). Penurunan yang tajam disebabkan oleh kondisi tahun sebelumnya yang masih normal serta kebijakan pembatasan oleh pemerintah.

Untuk tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang, pada Maret 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,83 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dan sebesar 3,67 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan TPK hotel didorong oleh pergerakan pariwisata dalam negeri dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan.

Pada triwulan II 2021, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pemulihan dimana pertumbuhannya mencapai 21,58%. Hal ini didorong oleh pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Peningkatan mobilitas masyarakat terlihat dari naiknya penumpang angkutan udara dan kereta api lebih dari dua kali lipat, bahkan angkutan udara lebih dari lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah kunjungan wisman pada April-Juni 2021 tercatat masih mengalami penurunan sebesar 12,18% (yoy) mengingat masih dibatasinya kunjungan wisman. Namun, TPK hotel pada Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar 18,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dan sebesar 6,58 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada triwulan III 2021, kinerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi sebesar 0,13% (yoy) karena diberlakukannya kebijakan PPKM Darurat akibat peningkatan kembali kasus COVID-19. Mobilitas masyarakat kembali mengalami penurunan khususnya pada penumpang angkutan udara dan kereta api. Jumlah kunjungan wisman pada Juli-September 2021 tercatat masih mengalami penurunan sebesar 17,06% (yoy). Namun, TPK hotel pada September 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,52 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dan sebesar 11,57 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada triwulan IV 2021, kinerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun tertahan karena adanya kebijakan pembatasan untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19. Pertumbuhan tetap didorong oleh mobilitas masyarakat serta faktor hari libur akhir tahun.

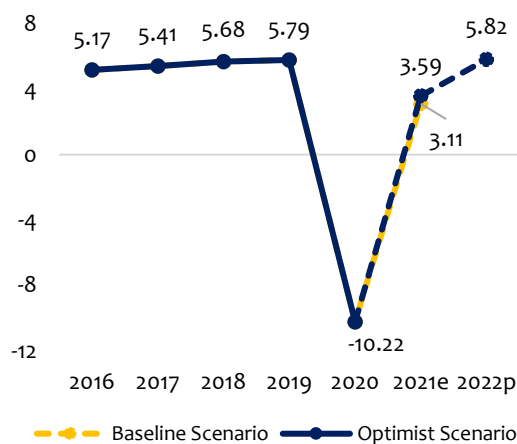
Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2021 secara keseluruhan didorong oleh penurunan kasus COVID-19 sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional diperkirakan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas sehingga permintaan terhadap penyediaan akomodasi dan makan minum dapat kembali pulih.

Pada tahun 2021, Kemenko Perekonomian memproyeksikan sektor penyediaan



akomodasi dan makan minum tumbuh dengan kisaran nilai sebesar 3,11% hingga 3,59% (yoy). Sementara itu, untuk tahun 2022 diproyeksikan kembali tumbuh dengan kisaran nilai sebesar 5,82% (yoy). Perkembangan pertumbuhan PDB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta proyeksinya dapat dilihat pada Grafik 4.30.

Grafik 4.31. Pertumbuhan PDB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (% , yoy)



Sumber: BPS dan Kemenko Perekonomian, 2021 (diolah)

Sepanjang tahun 2021, masih terdapat banyak faktor yang menahan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, terutama fluktuasi kasus COVID-19. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan melalui berbagai kebijakan. Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Kemenko Perekonomian melakukan koordinasi dengan K/L dan *stakeholders* terkait dalam penyediaan vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19 diyakini dapat memperbaiki kinerja sektoral dan kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas.

Selanjutnya, pemerintah memberikan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah juga memberikan relaksasi kebijakan KUR pada

masa pandemi covid-19, berupa tambahan subsidi bunga KUR bagi debitur terdampak COVID-19, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR bagi debitur terdampak COVID-19, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi pengajuan KUR. Untuk sektor pariwisata, pemerintah mengimplementasikan sejumlah kebijakan pemulihan seperti: 1) hibah pariwisata; 2) sertifikasi *cleanliness, health, safety, environment* (CHSE) pariwisata; 3) stimulus reaktivasi pariwisata; serta 4) fasilitasi hotel untuk isolasi mandiri.

Memasuki tahun 2022, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan pulih sejalan dengan penurunan kasus COVID-19 dan tercapainya *herd immunity*. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, penguatan di bidang pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran bidang pariwisata pada tahun 2022 sebesar Rp9,23 triliun.

Strategi kebijakan di bidang pariwisata pada tahun 2022 dilakukan antara lain melalui: 1) pemulihan pasar wisatawan, 2) pemulihan lapangan kerja, 3) pemulihan industri pariwisata, dan 4) pemulihan pariwisata destinasi unggulan. Melalui strategi kebijakan tersebut, diyakini pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dapat kembali pulih dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu *winner sector* di tengah tekanan pandemi COVID-19. Di tahun 2020 pertumbuhan sektor ini mencapai 10,58% (yoy) yang didorong oleh meningkatnya aktivitas *online* seiring diberlakukannya



pembatasan mobilitas masyarakat. Capaian ini menjadikan sektor informasi dan komunikasi sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Di awal tahun 2021, sektor informasi dan komunikasi masih menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini didorong oleh peningkatan jumlah pengguna internet sebesar 16% (yoy) menjadi 202,6 juta orang pada Januari 2021. Publikasi *We Are Social* (2021) juga menunjukkan penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% pada periode tersebut.

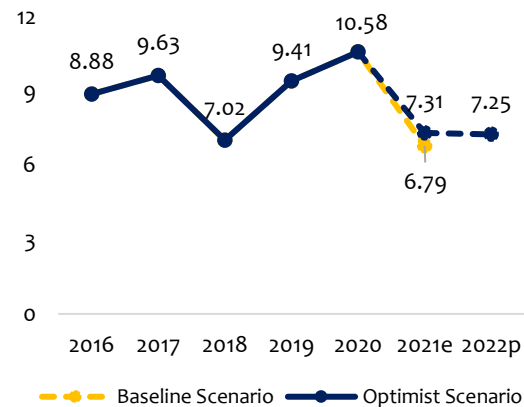
BPS mencatat pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di awal tahun 2021 masih tinggi namun mengalami perlambatan. Pada triwulan I sektor ini tumbuh mencapai 8,71% (yoy), namun melambat pada triwulan II dengan tumbuh masing-masing sebesar 6,90% dan 5,51% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan II ini merupakan titik terendah sejak tahun 2018. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh mulai berjalannya aktivitas *offline*. Meskipun demikian, perubahan pola perilaku masyarakat ke arah digitalisasi diyakini masih akan terus berlanjut. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah pengguna layanan digital selama pandemi mencapai 21 juta orang. Hal ini turut mendorong terjadinya pergeseran basis periklanan menjadi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memprediksi peningkatan anggaran belanja periklanan digital mencapai 54% dengan nilai US\$500 juta pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, Kemenko Perekonomian memproyeksikan sektor informasi dan komunikasi tumbuh dengan kisaran nilai sebesar 6,79% hingga 7,31% (yoy). Sementara

itu, untuk tahun 2022 diproyeksikan kembali tumbuh dengan kisaran nilai sebesar 7,25% (yoy). Perkembangan pertumbuhan PDB sektor informasi dan komunikasi serta proyeksinya dapat dilihat pada Grafik 4.31.

Grafik 4.32. Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi (% yoy)



Sumber: BPS dan Kemenko Perekonomian, 2021 (diolah)

Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi, Kemenko Perekonomian telah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Dari sisi internal, Kemenko Perekonomian mulai mengimplementasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya, Kemenko Perekonomian melakukan koordinasi pengembangan desa digital dan UMKM digital. Selain itu juga melakukan koordinasi penyiapan konsep strategi nasional transformasi digital untuk mendukung percepatan transformasi digital yang mencakup ekonomi, infrastruktur, pemerintah, hingga masyarakat.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah memperluas akses internet nasional melalui peluncuran PSN satelit multifungsi yang akan memberikan akses internet di 150.000 titik secara nasional. Konstruksi satelit telah mencapai 33% per Agustus 2021, direncanakan satelit ini dapat selesai dan beroperasi pada tahun 2023.



Memasuki tahun 2022, sektor informasi dan komunikasi diperkirakan akan terus tumbuh meskipun tidak setinggi tahun awal munculnya COVID-19 yang mendorong perubahan pola perilaku masyarakat ke arah digitalisasi. Kebutuhan terhadap aktivitas atau layanan berbasis teknologi dan informasi masih akan terus bertambah, seperti *work from home* atau *flexible working space*, pembelajaran *online*, perdagangan *online*, pelayanan administrasi publik berbasis digital, hingga *telemedicine*.

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) pada tahun 2022 adalah mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional. Hal ini dilakukan antara lain melalui: 1) membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK, 2) mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, 3) membangun pusat data nasional dan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), serta 4) meningkatkan pengembangan SDM dalam industri TIK.

Untuk mendukung implementasi kebijakan di atas, pemerintah mengalokasikan anggaran di bidang TIK pada tahun 2022 sebesar Rp23,99 triliun. Melalui berbagai agenda kebijakan serta dukungan pendanaan, diyakini sektor informasi dan komunikasi dapat terus tumbuh untuk mendorong tercapainya transformasi digital.

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

Pada tahun 2021 kinerja Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terus mencatatkan perbaikan. Pada triwulan II 2021 Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 8,35% (yoy) setelah pada triwulan I 2021 masih mencatatkan pertumbuhan yang negatif sebesar 2,99% (yoy).

Perbaikan kinerja tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan yang signifikan dari kegiatan jasa perantara keuangan (intermediasi) pada triwulan II 2021 sebesar 14,63% (yoy) setelah pada triwulan I 2021 masih tumbuh negatif 3,76% (yoy). Peningkatan jasa intermediasi perbankan seiring dengan kenaikan penyaluran kredit dan dana pihak ketiga serta meningkatnya *spread* antara suku bunga referensi dengan suku bunga kredit;

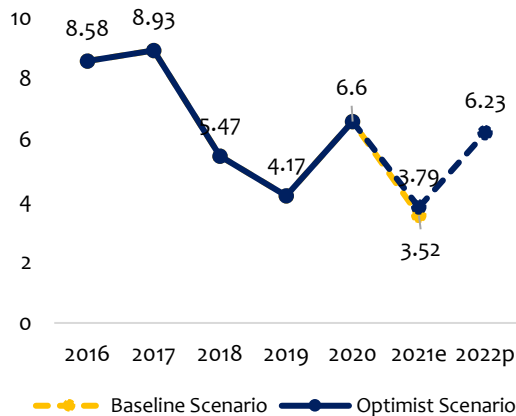
Adapun faktor lain penyebab perbaikan kinerja sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu (i) Peningkatan jasa provisi/ komisi, terutama *fee* atas layanan *cash management*; (ii) Kenaikan pendapatan sekunder perbankan, terutama dari transaksi valas dan surat berharga; dan (iii) Peningkatan volume perdagangan saham.

Pada triwulan III, sektor ini dapat tumbuh sebesar 4,29% (yoy) didukung oleh peningkatan kredit yang disalurkan dan pendapatan sekunder industri perbankan. Secara tahunan (yoy) pertumbuhan positif tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan bank, baik yang berbasis bunga neto (*net interest income*) maupun yang berbasis *fee* (*feebased income*). Peningkatan pendapatan Asuransi Umum & Reasuransi Konvensional dan Asuransi Sosial. Peningkatan pendapatan Pembiayaan, Modal Ventura, dan Pembiayaan Infrastruktur. Peningkatan transaksi efek dan valuta asing.

Mengacu pada kondisi triwulan sebelumnya yang menggambarkan mulai terjadinya perbaikan dari sisi permintaan konsumen dan penyaluran kredit perbankan, maka pada triwulan IV 2021 kinerja Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tetap tumbuh positif pada rentang 5,03 s.d 6,06% (yoy) sehingga secara *full year* sektor ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,52 s.d 3,79% (yoy).



Grafik 4.33. Laju Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Keuangan (% , yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Pada tahun 2022, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi diproyeksikan tumbuh sebesar 6,23% (yoy). Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait yaitu sebagai berikut. Peningkatan program digitalisasi sistem pembayaran, seperti perluasan QRIS, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dan reformasi regulasi, serta rencana implementasi BI-FAST, terus diakselerasi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh terus seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking*. Nilai transaksi Uang Elektronik (UE) sampai dengan triwulan III 2021 meningkat 45,05% (yoy) menjadi Rp209,81 triliun, dan diproyeksikan meningkat 38,75% (yoy) hingga mencapai Rp284 triliun untuk keseluruhan tahun 2021.

Demikian pula, nilai transaksi *digital banking* sampai dengan triwulan III 2021 meningkat 46,72% (yoy) menjadi Rp28.685,48 triliun, dan diproyeksikan tumbuh 43,04% (yoy) mencapai Rp 39.130 triliun untuk keseluruhan tahun 2021. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dengan pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan

sosial (bansos) serta optimalisasi dan percepatan penyaluran bansos. Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada September 2021 tumbuh 10,44% (yoy) mencapai Rp 841,73 triliun. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang di seluruh wilayah Indonesia, dengan penguatan strategi distribusi uang dan pembukaan kembali layanan kas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di masing-masing daerah.

Melanjutkan pelonggaran rasio *Loan to Value/ Financing to Value (LTV/FTV)* Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Melanjutkan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

Selain itu, Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mengalami penyesuaian dimana berdasarkan keputusan komite kebijakan tahun 2019, target Plafon KUR pada tahun 2021 sebesar Rp220 triliun meningkat menjadi Rp253 triliun berdasarkan permintaan penyalur KUR, kemudian dikarenakan permintaan penambahan plafon dari penyalur KUR maka plafon KUR tahun 2021 meningkat lagi menjadi Rp285 triliun. Setelah penetapan perpanjangan



tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi penyaluran KUR terus meningkat. Pada periode bulan Januari s.d. 25 Oktober 2021, realisasi KUR mencapai Rp224,24 triliun (78,68%) dari target tahun 2021.

Di sisi digitalisasi sektor keuangan, Pemerintah dan otoritas terkait terus melakukan transformasi untuk meningkatkan transaksi keuangan digital antara lain melalui inisiatif transformasi di berbagai area, seperti pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), digitalisasi perbankan, dan perluasan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan. Selain itu, dukungan kolaborasi antara perbankan dan *fintech* juga terus ditingkatkan.

Selain itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 telah dibentuk Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). P2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama untuk:

- mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Dalam rangka penguatan koordinasi antara Pusat dan Daerah, di tingkat daerah juga dibentuk TP2DD, baik untuk tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang diketuai oleh Kepala Daerah. Jumlah TP2DD yang telah

terbentuk sebanyak 135 baik di tingkat Provinsi maupun Kotamadya/Kabupaten di seluruh Indonesia.

REAL ESTAT

Sektor Real Estat merupakan sektor yang tetap bertumbuh positif selama pandemi. Pada tahun 2020 PDB Real Estat tercatat sebesar 2,32% (yoy). Meskipun demikian pertumbuhan sektor ini terus melambat karena selesainya sewa gedung untuk perkantoran, pusat perbelanjaan maupun jasa pemeliharaan untuk hotel dan kawasan pariwisata.

Namun demikian pemerintah melihat peluang pertumbuhan pada sub sektor penyediaan rumah tinggal kelas menengah ke bawah karena masih tingginya permintaan untuk rumah pertama bagi pekerja milenial. Oleh karena itu pemerintah menerapkan program PPn 0% untuk pembelian rumah baru siap huni pada triwulan I-2021 yang telah diperpanjang hingga Desember 2021.

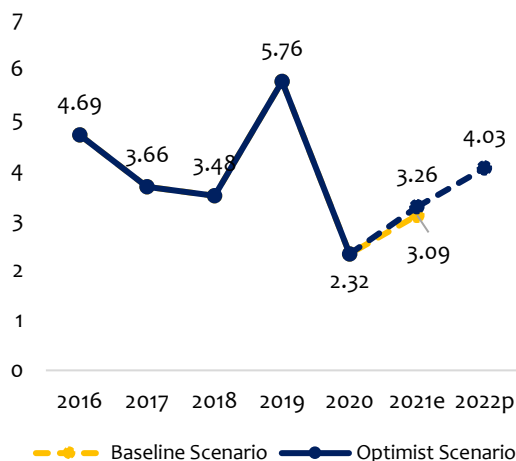
Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha juga menunjukkan bahwa sektor Real Estat akan mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,10% SBT. Faktor pendorong pertumbuhan di triwulan IV-2021 adalah peningkatan mobilitas masyarakat pada hari libur natal dan tahun baru.

Selain itu, sejak bulan September 2021 *google mobility index* untuk kegiatan ritel dan rekreasi terus mengalami peningkatan hingga Oktober 2021. Diharapkan hal ini akan terus berlanjut sehingga dapat meningkatkan permintaan untuk sewa gedung pusat perbelanjaan dan kawasan pariwisata, serta jasa pemeliharaan untuk properti tersebut. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB Real Estat pada tahun



2021 diproyeksikan sebesar 3,09% - 3,26% (yoy).

Grafik 4.34. Perkembangan Pertumbuhan PDB Real Estate (% , yoy)



Sumber: BPS dan Kemenko Perekonomian, 2021

Sementara itu dengan pelaksanaan program vaksinasi yang masif, diharapkan pelaksanaan vaksinasi dapat mencapai 100% dari target pada tahun 2022. Dengan demikian mobilitas masyarakat dapat meningkat secara signifikan, dan terjadi peningkatan pada kegiatan di pusat perbelanjaan, kawasan industri dan kawasan pariwisata. Oleh karena itu pertumbuhan PDB Real Estat pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 4,03% (yoy).

Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yang berkontribusi pada sektor Real Estat berupa pemberian program subsidi perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terdiri atas: (i) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); (ii) Subsidi Selisih Bunga (SSB); (iii) Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM); (iv) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT); (v) Subsidi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 50%; (vi) *Payment Holiday*: Pembebasan pembayaran angsuran pokok dan bunga (KPR max. Rp 500 juta), baik dari SSB atau pun BP2B; (vii) Pembebasan PPh Pengalihan

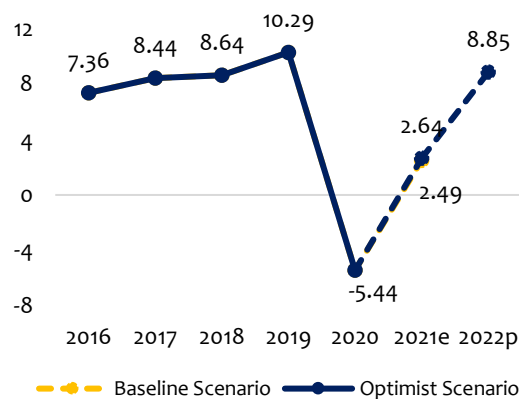
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa RS dan RSS; (viii) Subsidi Bunga Kredit Konstruksi; (ix) Penggunaan lahan pemerintah untuk pembangunan rumah MBR; dan (x) Penerapan ketentuan hunian berimbang.

JASA PERUSAHAAN

Pada tahun 2021, kinerja sektor Jasa Perusahaan akan tetap dipengaruhi oleh perkembangan COVID-19 dan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam PPKM yang mengatur pembatasan aktivitas perusahaan-perusahaan baik yang bergerak sektor kritis, esensial maupun non esensial.

Pada triwulan II 2021, sektor ini mampu mengalami eskalasi pertumbuhan sebesar 9,94% (yoy) yang disebabkan oleh beberapa indikator pertumbuhan utama seperti meningkatnya aktivitas pertemuan (MICE) seiring peningkatan penyelenggaraan kegiatan dan pameran secara langsung maupun virtual. Selanjutnya juga terjadi kenaikan aktivitas di berbagai kegiatan bisnis yang mampu meningkatkan permintaan jasa penyewaan dan penunjang usaha. Selain itu, kenaikan pendapatan agen/biro perjalanan wisata dan penyewaan kendaraan juga terjadi dibandingkan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 4.35. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Perusahaan (% , yoy)





Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021 (diolah)

Pada triwulan III 2021, sektor ini mengalami kontraksi sebesar 0,59% (yoy). Terdapat beberapa *downside risk* yang menjadi faktor penghambat dari pertumbuhan sektor jasa perusahaan pada triwulan ini, utamanya penerapan PPKM secara berlevel yang dimulai sejak bulan Juli sebagai upaya mengendalikan laju penularan COVID-19.

Salah satu kebijakan yang menjadi *downside risk* adalah penerapan PPKM level 4 pada sejumlah wilayah seperti Jawa dan Bali sehingga pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% kebijakan WFH. Adanya kebijakan PPKM ini mempengaruhi penurunan pendapatan Sebagian besar usaha yang melayani perusahaan sebagai dampak dari pemberlakuan PPKM Darurat di berbagai wilayah. Hal ini berdampak pada penurunan usaha event organizer (EO) dan MICE serta penurunan pendapatan usaha agen/biro perjalanan wisata.

Pada pembatasan aktivitas yang terjadi, perusahaan yang bergerak pada sektor kritical dan esensial masih diizinkan untuk beroperasi dengan sejumlah pembatasan tertentu. Adapun sektor kritical terdiri atas sektor (i) kesehatan; (ii) energi; (iii) logistik, transportasi, dan distribusi kebutuhan pokok; (iv) makanan dan minuman penunjang termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; (v) petrokimia; (vi) semen dan bahan bangunan; (vii) objek vital nasional; (viii) Proyek Strategis Nasional; (ix) konstruksi; (x) utilitas dasar; serta (xi) keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan untuk sektor esensial terdiri atas sektor (i) keuangan dan perbankan; (ii) pasar modal; (iii) teknologi informasi dan komunikasi; (iv) perhotelan non penanganan karantina; dan (v) industri orientasi ekspor.

Pada triwulan IV 2021 ini, sektor jasa perusahaan ini diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 7,78 s.d 8,38% (yoy) yang didukung oleh penurunan level PPKM hingga level 3 dan 2. Hal tersebut mendorong peningkatan aktivitas perekonomian khususnya perusahaan-perusahaan non esensial yang sebelumnya menjalankan kebijakan 100% WFH kini mulai menjalankan kebijakan WFO dengan kapasitas tertentu.

Selain itu pergerakan manusia juga mengalami kenaikan seiring peningkatan kapasitas penumpang yang diperbolehkan pada berbagai jenis moda transportasi umum. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas rekreasi dan hiburan sehingga meningkatkan kenaikan pendapatan agen/biro perjalanan wisata. Pada PPKM level 2 yang telah diterapkan pada wilayah Jawa dan Bali, pelaksanaan resepsi pernikahan akan meningkatkan aktivitas *event organizer* dengan diperbolehkan izin penyelenggaraan acara secara terbatas.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta diperbolehkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol Kesehatan secara lebih ketat. Hal ini mampu mendorong perusahaan-perusahaan arsitektur dan sipil dalam mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan Pemerintah. Pada tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 98 PSN masuk pada tahap konstruksi. Dengan demikian maka pada tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhan sektor jasa perusahaan sebesar 2,49 s.d 2,64 % (yoy).

Pada tahun 2022, sektor jasa perusahaan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 8,85% (yoy) yang didukung oleh perekonomian yang semakin pulih seiring kondisi COVID-19 yang semakin terkendali serta pemberian vaksin COVID-19 yang semakin masif.



Dengan terkendalinya COVID-19 maka diharapkan pelonggaran PPKM dapat dilakukan sehingga perusahaan-perusahaan di sektor non-esensial juga dapat beroperasi secara penuh. Begitu juga halnya dengan pelonggaran aktivitas mampu mendorong peningkatan aktivitas rekreasi di masyarakat sehingga aktivitas pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur, dan reservasi juga diharapkan dapat meningkat pada tahun 2022.

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Kinerja sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada tahun 2021 masih tetap dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut mempengaruhi realisasi belanja sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran utama dalam percepatan pemulihan ekonomi saat ini.

Pada triwulan II 2021, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan sebesar 9,49% (yoy). Pada triwulan ini, realisasi belanja pegawai (APBN) mampu tumbuh sebesar 19,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 10,64% (yoy). Begitu juga halnya daya serap belanja pegawai pada triwulan II 2021 sebesar 29,74% (yoy) yang juga lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2021 mencapai Rp449,56 triliun (43,56% terhadap pagunya), atau tumbuh sebesar 28,30% (yoy). Selanjutnya untuk postur

anggaran Belanja Pegawai, hingga 30 Juni 2021 sudah terealisasi sebesar Rp123,64 triliun atau 46,14% dari pagunya. Realisasi tersebut digunakan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk pembayaran THR, gaji ke-13, dan pensiunan ASN. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut mendorong tingkat pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,49% pada semester I tahun 2021.

Pada triwulan III 2021, sektor ini terkontraksi sebesar 9,96% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,82%. Kontraksi ini dipengaruhi salah satunya oleh pencairan THR dan gaji ke-13 ASN yang telah dilakukan pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya realisasi belanja pegawai melalui APBN pada periode ini terkontraksi sebesar 12,62% (yoy). Daya serap belanja pegawai juga hanya sebesar 22,01% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 26,27% (yoy).

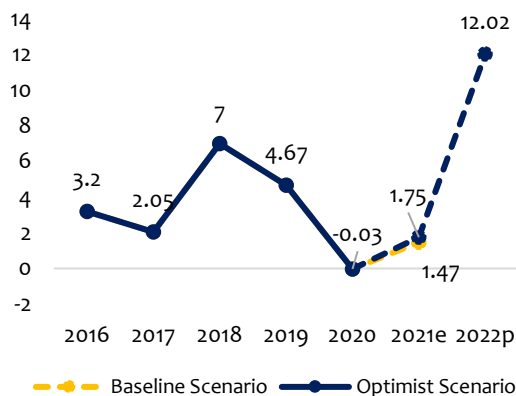
Pada triwulan IV 2021, Pemerintah terus mengakselerasi realisasi belanja K/L sehingga sektor ini diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 8,81 s.d 9,84% (yoy). Pada periode ini, pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 secara nasional baik untuk K/L pusat maupun di daerah juga menjadi salah satu pendorong kegiatan administrasi Pemerintah dalam bidang kepegawaian.

Jika melihat pada perkembangan triwulan di atas, maka pada tahun 2021 sektor ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 1,47 s.d 1,75% (yoy). Pada tahun ini Pemerintah berfokus pada percepatan vaksinasi untuk mencapai target *herd immunity*. Pemerintah pun melakukan penyesuaian belanja negara dengan menjalankan kebijakan refocusing dengan realokasi anggaran yang dilakukan secara bertahap. Pada tahap I dilakukan refocusing belanja K/L sebesar Rp59.059,8



miliar dan refocusing TKDD sebesar Rp15.000,0 miliar. Pada tahap II dilakukan refocusing pada tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13 PNS/TNI/Polri sebesar Rp12.392,0 miliar. Selanjutnya dilakukan kembali refocusing tahap III pada belanja K/L sebesar Rp26.207 miliar dan TKDD sebesar Rp6.000 miliar yang kemudian dilanjutkan refocusing ke IV pada belanja K/L sebesar Rp.26.255,5 miliar.

Grafik 4.36. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (% , yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021 (diolah)

Pada tahun 2022, Kemenko Perekonomian memproyeksikan sektor ini dapat tumbuh sebesar 12,02% (yoy). APBN 2022 diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2022 menjadi tahun terakhir relaksasi pelebaran deficit dan ketentuan batas deficit APBN akan dikoordinasikan ulang mulai tahun ini. Adapun kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RAPBN 2022 terkait belanja negara sebagai berikut:

- (1) Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang difokuskan pada reformasi SDM unggul (Kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi)

- (2) Penciptaan *spending better* yang difokuskan pada (i) belanja prioritas dan berorientasi hasil; (ii) efisiensi belanja non-prioritas di pusat dan daerah yang berupa penajaman belanja barang melalui efisiensi belanja operasional, perjalanan dinas, paket meeting dan honor serta penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) penerapan program perlindungan sosial yang adaptif; serta (iv) efektivitas bantuan sosial dan subsidi.
- (3) TKDD yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas kinerja daerah.

Berdasarkan Nota Keuangan 2022, Kebijakan yang diarahkan dalam penyusunan belanja K/L 2022 yaitu (i) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; (ii) mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan SDM khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; (iii) menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas; serta (iv) mendukung reformasi birokrasi dalam rangka pelayanan publik.

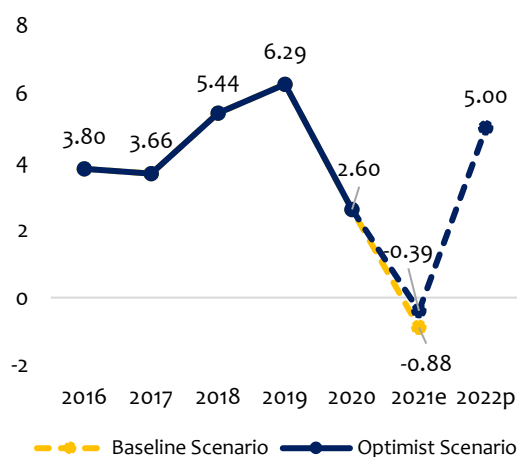
JASA PENDIDIKAN

Pada tahun 2021 Sektor Jasa Pendidikan berperan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional dengan turut berperan dalam adaptasi perilaku pada era kenormalan baru. Kinerja Sektor Jasa Pendidikan pada triwulan II 2021 yaitu tumbuh sebesar 5,72% (yoy) meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh pada zona negative 1,71% (yoy).



Perbaikan kinerja pada triwulan II 2021 disebabkan oleh pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN di institusi pendidikan serta tunjangan untuk tenaga pendidik non ASN. Namun demikian, secara keseluruhan sepanjang tahun 2021 dukungan kinerja Sektor Jasa Pendidikan melalui Pembelajaran Jarak Jauh yang umumnya dilakukan secara daring, mencakup program belajar dari rumah yang tayang di stasiun televisi, menghadirkan radio edukasi, serta mengadakan berbagai modul sederhana. Penerapan kurikulum dalam masa darurat yang dimulai sejak bulan Agustus; juga bantuan kuota dana internet untuk siswa, mahasiswa, guru dan dosen dengan total anggaran senilai Rp7,2 triliun. Namun demikian, pada triwulan III 2021 Jasa Pendidikan berkontraksi sebesar 4.42% hal ini dikarenakan terjadinya penurunan belanja pegawai tenaga pendidik karena pencairan THR dan gaji ke-13 sudah dilakukan pada triwulan II 2021.

Grafik 4.37. Laju Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Pendidikan (% yoy)



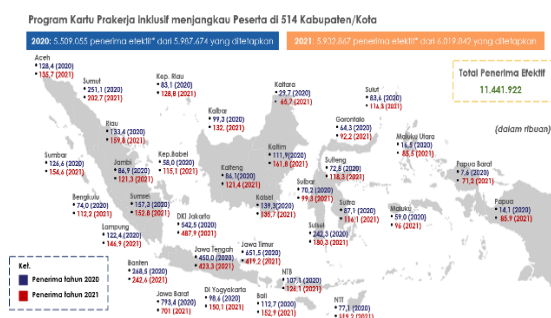
Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Hingga akhir tahun 2021, Kemenko Perekonomian optimis sektor Jasa Pendidikan dapat terus tumbuh positif pada rentang -0,8 s.d -0,39%. Optimisme pertumbuhan ini seiring dengan aktivitas Pendidikan yang terus beradaptasi dengan

kenormalan baru dan juga ditopang oleh pengeluaran swasta untuk pendidikan yang terus meningkat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Sepanjang tahun 2021, Kartu Prakerja telah disalurkan kepada 5.932.867 orang penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 524 kab/kota di seluruh Indonesia. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan target semula tahun 2021 yaitu sebesar 2,7 juta penerima. Pelatihan yang diberikan oleh Kartu Prakerja meliputi pelatihan yang bersifat *skilling*, *reskilling*, *upskilling*, dan pelatihan kewirausahaan. Capaian tahun 2021 ini jauh lebih besar dibandingkan target jumlah lulusan pelatihan vokasi melalui pelaksanaan Kartu Prakerja yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 2,7 juta penerima Kartu Prakerja.

Gambar 4.1: Sebaran Penerima Program Kartu Prakerja



Sumber: Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, 2021.

Kegiatan prioritas pendidikan tahun 2021 akan terus berlanjut yaitu antara lain (i) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP yang diampu Sekretaris Jenderal, (ii) Leksikografi sebanyak 25.000 kata dan istilah baru, (iii) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) literasi yang diampu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (iv) Penyediaan peralatan teknologi informasi dan



komunikasi (TIK) serta pendampingan daerah dan penguatan tata kelola yang diampu Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen). (v) Sekolah penggerak/revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), penguatan sumber daya manusia (SDM) bidang vokasi, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Vokasi yang diampu Ditjen Pendidikan Vokasi. (vi) Guru Penggerak, Organisasi Penggerak, dan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang diampu Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. (vii) BOPTN Satuan Kerja dan PTN Badan Hukum dan Kerja sama/magang industri (Kampus Merdeka) yang diampu Ditjen Pendidikan Tinggi. (viii) Pengembangan AKM dan pengembangan perbukuan nasional yang diampu Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbang dan Perbukuan).

Di samping itu, Pemerintah juga sedang melakukan upaya revitalisasi sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Upaya ini dilakukan melalui kerangka Proyek Kerja Sama Teknis Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, atau TVET System Reform (TSR). Hasil dari Proyek TSR tersebut salah satunya adalah Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Roadmap implementasinya sebagai pedoman perbaikan tata kelola TVET secara komprehensif. Langkah selanjutnya, Pemerintah saat ini sedang dalam proses penyusunan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Revitalisasi dilakukan untuk seluruh lembaga vokasi antara lain SMK, Politeknik, BLK dan lembaga pelatihan lainnya.

Untuk mendorong partisipasi sektor industri dalam kegiatan vokasi, Pemerintah juga telah memberikan *Super Tax Deduction* kepada industri yang melakukan kegiatan

pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu. Insentif pajak ini merupakan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari total biaya yang dikeluarkan oleh industri untuk melaksanakan kegiatan vokasi.

Pada tahun 2022, Sektor Jasa Pendidikan diproyeksikan tumbuh sebesar 5,00% (yoy). Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu reformasi pendidikan dengan arah kebijakan secara umum difokuskan untuk mendukung:

- a. peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar kementerian/Lembaga terutama sinergi kegiatan prioritas, standarisasi komponen belanja Pendidikan, dan integrasi sistem monitoring dan evaluasi.
- b. Penguatan penyelenggaraan PAUD, antara lain melalui penguatan dukungan anggaran BOP PAUD dan Dana Desa.
- c. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dengan mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana antara lain melalui kementerian PUPR dan pengembangan platform pembelajaran berbasis TIK
- d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, antara lain melalui program sertifikasi kompetensi, mendorong penerapan remunerasi dan jenjang karir berbasis kinerja, dan penguatan program Merdeka Belajar
- e. Penguatan Pendidikan vokasi antara lain melalui perbaikan kurikulum dengan memperbanyak muatan teknis, standarisasi mutu melalui



pengajaran hybrid, pengembangan riset dan inovasi dengan kerja sama industri, serta penguatan dukungan operasional Pendidikan vokasi.

- f. Penguatan investasi pemerintah di bidang Pendidikan antara lain untuk mendukung perluasan beasiswa, pengembangan inovasi dan adopsi teknologi TIK, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi kelas dunia.

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Pada triwulan II 2021 Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh pesat yaitu 11,62% (yoy) meningkat tajam dari periode sebelumnya yaitu 3,32% (yoy). Faktor pendorong perbaikan kinerja sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yaitu (i) Kenaikan pendapatan rumah sakit dan klinik atau laboratorium seiring peningkatan jumlah pemeriksaan spesimen COVID-19 dan (ii) Pembayaran insentif tenaga Kesehatan terkait perawatan pasien positif dan vaksinasi COVID-19. Kemudian pada Triwulan III 2021 Sektor ini mengalami ekspansi pertumbuhan 14.06% yang didorong oleh peningkatan aktivitas jasa laboratorium Kesehatan untuk pemeriksaan specimen Covid-19 akibat lonjakan kasus pada periode tersebut. Selain itu juga didorong oleh peningkatan insentif tenaga Kesehatan.

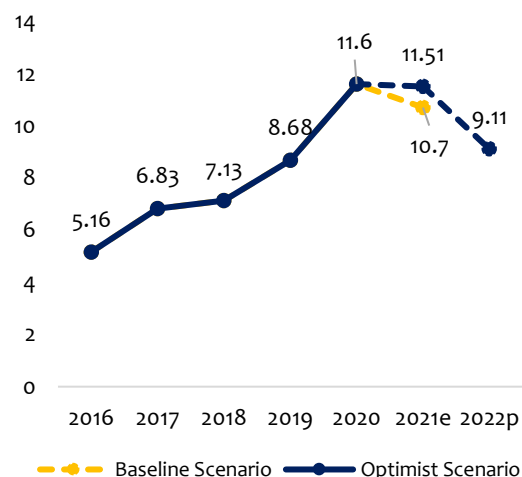
Pada tahun 2021, Pemerintah meningkatkan anggaran penanganan dampak COVID-19 dari sisi kesehatan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp176,30 triliun atau meningkat 178% dibandingkan anggaran tahun 2020. Alokasi dana tersebut digunakan antara lain untuk Diagnostik untuk testing dan tracing (Rp 9,91 triliun), Therapeutic (Rp 61,94 triliun), Program Vaksinasi (Rp 58,18 triliun), Insentif Pajak

Kesehatan (Rp 18,61 triliun), dan Penanganan lainnya (Rp 27,67 triliun).

Selanjutnya, Pemerintah berkomitmen dalam menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga, di samping terus memperkuat *testing, tracing* dan *treatment* (3T) dan meningkatkan disiplin 3M memberikan harapan perbaikan ekonomi. Data KPCPEN (2021) menunjukkan hingga Agustus 2021 Total Vaksinasi mencapai 71,26 juta dosis (Vaksinasi-1: 49,00 juta Dosis, Vaksinasi-2: 22,24 juta Dosis).

Adapun Penduduk yang telah menerima vaksin Covid-19 secara lengkap): 22,24 Juta Penduduk. Pada 4 Agustus 2021, vaksin yang disuntikkan sebanyak 461.144 dosis. Selain itu, *Update* Vaksin Gotong Royong: Vaksinasi-1 : 494.562 dosis (3,30%) Vaksinasi-2 : 225.852 dosis (1,51%). Vaksin Dosis ke-3 (booster Nakes) per 4 Agustus 2021 telah disuntikkan ke 17.421 SDM Kesehatan (0,01%). Kecepatan rata-rata mingguan penyuntikan vaksin hingga 4 Agustus 2021 pukul 18.00 menurun di angka 703.954 dosis.

Grafik 4.38. Laju Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Kesehatan dan Sosial Lainnya (% , yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Hingga akhir tahun 2021, Kemenko Perekonomian optimis sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dapat terus



tumbuh positif pada rentang 10,7% s.d 11,51% (yoy). Selanjutnya pada tahun 2022, sektor ini tetap tumbuh positif pada 9.11% (yoy). Optimisme pertumbuhan ini seiring dengan penggunaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 sebagai *emergency use* pada 2021.

Pemerintah Pusat terus meningkatkan koordinasi dengan beberapa Pemerintah daerah. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan antara lain dengan peningkatan kapasitas ruang perawatan, penambahan rumah sakit rujukan baru, penambahan tenaga kesehatan, dan penguatan kembali implementasi protokol tatalaksana COVID-19 di berbagai layanan fasilitas kesehatan. Pelaksanaan vaksin secara meluas ini akan menjadi prasyarat penting untuk pemulihan kegiatan perekonomian pasca pandemi COVID-19.

Pada tahun 2022, reformasi sistem Kesehatan nasional akan terus dilanjutkan yang mencakup penguatan Puskesmas melalui promosi fungsi preventif dan penyediaan sarana dan prasarana, dan peningkatan rumah sakit terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPKT) dilakukan dengan meningkatkan rasio tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk pada wilayah tersebut.

Selain itu, kesenjangan tenaga Kesehatan antara perkotaan dan pedesaan diminimalisasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan melalui pembukaan program diploma tenaga Kesehatan yang langka dan redistribusi tenaga Kesehatan khususnya di DTPKT.

Selanjutnya, dilakukan penguatan *healt security* untuk mengantisipasi adanya krisis Kesehatan masyarakat dimasa mendatang. Peningkatan pemantauan penyakit terpadu berbasis laboratorium dan *real time* dapat

mempercepat penanganan isu Kesehatan masyarakat. Penguatan jejaring mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium diperlukan untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Peningkatan pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi tidak hanya dilakukan untuk usia balita, tetapi juga termasuk imunisasi untuk penyakit menular dan tidak menular seperti imunisasi Pneumonia (PCV) atau Covid-19. Pemerintah mendukung peningkatan kemandirian farmasi dan alat Kesehatan dalam negeri antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi alat Kesehatan, bahan baku obat dalam negeri, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium pengujian alat Kesehatan.

Kemudian teknologi informasi dalam layanan Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat seperti *telemedicine*, revitalisasi dan digitalisasi rumah sakit, puskesmas, dan posyandu sangat perlu untuk terus dikembangkan agar mempercepat arus informasi dan pelayanan masyarakat. Implikasi covid-19 memperlihatkan pesatnya peningkatan pelayanan *telemedicine* dan penurunan substansial pelayanan Kesehatan selain covid-19. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penularan covid-19 di rumah sakit. Selain itu perbaikan sistem pembiayaan Kesehatan akan dilakukan dengan penguatan fungsi pembiayaan berbasis kinerja antara lain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berbasis kinerja dan sistem kapitasi berbasis kinerja.

JASA LAINNYA

Kinerja sektor jasa lainnya pada tahun 2021 masih tetap dipengaruhi oleh perkembangan upaya pengendalian COVID-19. Pelaksanaan pembatasan kegiatan untuk



mendukung penurunan pertumbuhan kasus COVID-19 mendorong penurunan kinerja dari aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam jasa lainnya di bidang hiburan, kesenian, dan kreativitas.

Pada triwulan II 2021, sektor jasa lainnya mampu mengalami pertumbuhan sebesar 11,97% (yoy) seiring dengan peningkatan mobilitas yang terjadi dibanding triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pada triwulan ini terjadi peningkatan mobilitas ke tempat rekreasi dengan adanya pelonggaran aktivitas masyarakat dan juga perayaan hari besar Idulfitri. Pada triwulan ini juga terjadi peningkatan aktivitas pada lembaga/organisasi baik nasional maupun internasional serta aktivitas partai politik.

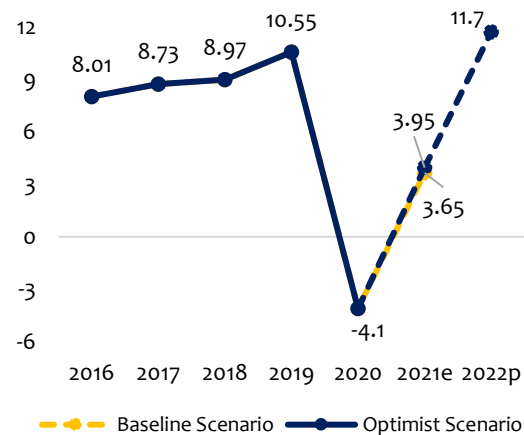
Pada triwulan III 2021, sektor ini berkontraksi sebesar 0,30% (yoy). Hal ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas hiburan dan rekreasi. Pada triwulan ini, terdapat beberapa *downside risk* yang menjadi faktor penghambat, utamanya penerapan PPKM secara berlevel yang dimulai sejak bulan Juli sebagai upaya mengendalikan laju penularan COVID-19. Pada penerapan PPKM level 4 seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali, pelaksanaan kegiatan non esensial diberlakukan 100% WFH. Selanjutnya juga untuk fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara. Begitu juga halnya untuk kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian serta kerumunan) ditutup sementara.

Pada triwulan IV 2021, Pemerintah melakukan pelonggaran aktivitas seiring dengan kasus COVID-19 yang semakin terkendali. Pada pelonggaran ini Pemerintah menerapkan kebijakan berupa penerapan ketentuan 50% WFO untuk sektor non esensial, pembukaan bioskop, penerapan

ketentuan pembukaan fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dengan kapasitas maksimal pengunjung sebesar 25%, serta kegiatan seni budaya dan olahraga (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dengan adanya pelonggaran aktivitas ini maka pada triwulan ini sektor jasa lainnya diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 9,31 s.d 10,50% (yoy). Dengan demikian maka pada tahun 2021 sektor jasa lainnya ini diproyeksikan full year sebesar 3,65% s.d 3,95% (yoy). Kemudian pada tahun 2022, Kemenko Perekonomian memproyeksikan kinerja sektor ini dapat tumbuh sebesar 11,70% (yoy).

Grafik 4.39. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Lainnya (% ,yoy)



Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2021

Pada tahun 2022 kebijakan penanganan COVID-19 diarahkan mampu lebih komprehensif dan masif melalui pelaksanaan PPKM yang disertai dengan percepatan program vaksinasi. Dengan terkendalinya kasus COVID-19 diharapkan mampu meningkatkan kegiatan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas di bidang hiburan, kesenian, dan kreativitas. Dengan



semakin terkendalinya kasus COVID-19 di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan aktivitas lembaga/organisasi baik nasional

maupun internasional serta aktivitas partai baik secara *online* maupun *offline*.

A photograph of a hand reaching for a box of medicine on a pharmacy shelf. The shelf is filled with various boxes of medicine, and the hand is wearing a colorful bracelet. The image is framed by a white rounded rectangle.

HOLDING BUMN FARMASI UNTUK KEMANDIRIAN

Latar Belakang Pembentukan Holding BUMN Farmasi

Seiring berjalannya waktu kesadaran orang-orang di dunia akan pentingnya kesehatan semakin tinggi. Produk farmasi dan alat kesehatan akan menjadi kebutuhan dengan permintaan yang tinggi pula. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2016. Selain itu juga Pemerintah telah memasukkan sektor peralatan medis dan farmasi sebagai bagian dari sektor prioritas.

Sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai, BUMN yang bergerak di Industri Farmasi (BUMN Farmasi) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk membantu Pemerintah menghadapi tantangan sektor kesehatan pada umumnya dan Industri Farmasi pada khususnya. Guna mendukung hal tersebut, BUMN Farmasi memiliki peran untuk (1) melakukan penguatan portofolio bisnis demi memastikan penyediaan layanan kesehatan dan farmasi secara *end-to-end*, (2) peningkatan skala bisnis demi meningkatkan kemudahan akses, (3) optimisasi biaya dan laba, (4) pengurangan ketergantungan impor, (5) peningkatan kapabilitas melalui inovasi untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas, serta (6) mengembangkan bisnis dan bersinergi

dengan ekosistem sektor kesehatan nasional.

Selain itu BUMN Industri Farmasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri farmasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan peran tersebut, Kementerian BUMN mencanangkan program strategis demi meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dan kemandirian dengan (1) mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat, (2) meningkatkan produksi obat asli Indonesia, (3) pengembangan pusat riset bioteknologi, dan (4) kemandirian vaksin dan produk *life sciences* melalui penguatan struktur Industri Farmasi BUMN.

Pada 31 Januari 2020 Pemerintah resmi membentuk *Holding* BUMN farmasi yang dipimpin oleh PT Biofarma serta PT Kimia Farma dan PT Indofarma sebagai anggota. Pembentukan *holding* ini diharapkan dapat menciptakan ketahanan, ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan kesinambungan dalam industri farmasi.

Sinergi dari tiga BUMN yang tergabung dalam *holding* farmasi ini, bertujuan agar Indonesia dapat menurunkan impor bahan baku farmasi atau Active Pharmaceutical Ingredients (API) dari 90% menjadi 75%. Kemudian dengan adanya *holding* ini, diharapkan juga produk farmasi dapat tersebar secara merata ke seluruh pelosok negeri, dan dapat menciptakan semangat untuk berinovasi dari anggota *holding*



farmasi untuk menciptakan suatu produk baru.

Tujuan lain dari pembentukan *holding* ini adalah untuk menciptakan efisiensi bahan baku, sehingga akan dihasilkan harga obat yang terjangkau, yang akan meningkatkan skala bisnis dan yang terpenting dari pembentukan *holding* BUMN farmasi, akan menjadi menjadi *milestone* dalam rangka pembentukan *Holding Healthcare* di Indonesia, sehingga dari hulu ke hilirnya dapat dikelola semua dengan baik.

Pasca *Holding* BUMN Farmasi

Beberapa bulan setelah *Holding* Farmasi resmi dibentuk, Pemerintah mengumumkan bahwa COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Permintaan terhadap suplemen Kesehatan dan obat-obatan meningkat kian tinggi. Pemerintah menambahkan sektor alat Kesehatan dan farmasi ke dalam sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0. dan berupaya mendorong daya saing industri farmasi dan alat Kesehatan melalui transformasi teknologi digital.

Untuk mencapai cita-cita kemandirian industri farmasi Indonesia, PT Biofarma sebagai induk *holding* berfokus pada penguasaan platform teknologi vaksin baru dan pengembangan ekosistem *digital healthcare*. Kimia Farma berfokus pada pengembangan fasilitas industri bahan baku obat (BBO) sedangkan Indofarma berfokus pada pengembangan alat Kesehatan dan produk herbal.

Sejak terbentuk *holding*, Biofarma-Kimia Farma-Indofarma bertransformasi menjadi perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, yang memiliki 13 pabrik, 78 jaringan distribusi, 1.300 jaringan apotek dan 560 laboratorium klinik.

Dalam rangka memperkuat peran *holding* BUMN Farmasi sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai guna menjawab tantangan dan menangkap peluang di Industri Farmasi Tanah Air, saat ini Pemerintah sedang menyelesaikan konsep regulasi untuk memasukkan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau INUKI ke dalam *Holding* BUMN Farmasi sebagai upaya pengintegrasian.

INUKI merupakan BUMN yang fokus pada pengembangan industri nuklir untuk dunia kedokteran. Portofolio yang dihasilkan dari industri kedokteran nuklir INUKI antara lain berupa produk elemen bakar nuklir, radioisotop dan radiofarmaka, instrumentasi nuklir, jasa rekayasa nuklir, dan aplikasi teknologi nuklir di berbagai bidang seperti alat *diagnostic PET-CT Scan* dan *Cyclotron*.

Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, untuk alat kesehatan berteknologi tinggi seperti *CT-Scan*, *MRI*, dan *Cyclotron* 100% masih impor. Hal itu menyebabkan akses masyarakat Indonesia atas alat kesehatan masih jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

INUKI sebagai satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang kedokteran nuklir di Tanah Air berpeluang besar memenuhi kebutuhan bidang kedokteran nuklir rumah sakit-rumah sakit atau klinik-klinik. Melalui integrasi INUKI ke *Holding* BUMN Farmasi, portofolio tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih luas sehingga bisa menunjukkan kontribusi BUMN Farmasi yang signifikan terhadap Industri Farmasi di Indonesia.

Kinerja

Dengan adanya penugasan dari pemerintah untuk penanganan COVID-19 seperti



penyediaan vaksin COVID-19, obat-obatan, multivitamin, serta alat kesehatan, kinerja keuangan *Holding* BUMN Farmasi pada semester I-2021 melonjak 164% (yoy). pendapatan naik dari sebelumnya Rp5,78 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 15,26 triliun pada tahun 2021. Penjualan Biofarma meningkat 119,2% yoy, Kimia Farma 18,6% yoy dan Indofarma 89,9% yoy.

Sejak Januari-Oktober 2021, Biofarma sudah berhasil mendistribusikan sebanyak 186.382.232 dosis vaksin Sinovac ke seluruh Provinsi Indonesia. Dengan jumlah keseluruhan vaksin yang tersedia sebanyak 226.601.558 dosis vaksin. Setelah hasil uji efikasi dan keamanan vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun oleh BPOM, Biofarma akan mendatangkan kembali sebanyak 40 juta dosis vaksin dalam bentuk *finish product* yang kemudian akan dialokasikan untuk anak 6-11 tahun, segera setelah program vaksinasi ini disahkan Pemerintah.

Inovasi

Selain membantu Pemerintah menyediakan masker medis dan non-medis di bawah harga pasar *holding* BUMN farmasi juga turut memastikan ketersediaan obat terapi COVID-19 seperti azithromycin, oseltamivir, chloroquine, dan remdesivir. Biofarma juga berhasil menciptakan inovasi berupa RT-PCR kit diagnostik COVID-19 yang dihasilkan dari hasil kolaborasi bersama startup dan sudah memenuhi *gold standard* RT-PCR kit. Produk ini juga dilengkapi dengan media *Viral Transport Media* (VTM) yang dibuat dan diproduksi secara mandiri oleh Biofarma. Selain meluncurkan produk *RT-PCR Kit* , *Biofarma* kembali meluncurkan inovasi terbaru yaitu *Bio Saliva* atau alat uji untuk mendeteksi COVID-19 dengan metode kumur (gargling). *Bio Saliva* ini merupakan

pelengkap dari produk sebelumnya yaitu *mBioCov19* .

Selain sebagai percepatan transformasi kemandirian dan kekuatan industri farmasi, Pembentukan *holding* BUMN merupakan salah satu titik tolak pembentukan *holding healthcare* di Indonesia. Saat ini *holding* farmasi tengah mempersiapkan langkah transformasi untuk mewujudkan *Global Scale Health Company* . Melalui transformasi ini, diharapkan Indonesia dapat melepaskan ketergantungan untuk bahan baku obat, menerobos tantangan distribusi dan logistik, dan memastikan masyarakat mendapatkan kualitas layanan Kesehatan dan obat-obatan yang baik.

Selama ini ketergantungan bahan baku obat impor Indonesia sangat tinggi mencapai lebih dari 90%. Biofarma berupaya mengurangi impor bahan baku secara bertahap, sejak tahun 2017 telah memproduksi 10 bahan baku obat secara mandiri. Kapasitas produksi akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2024 ditargetkan dapat menurunkan ketergantungan impor bahan baku hingga 20,52%. Pada tahun 2021 diharapkan penurunan ketergantungan sebanyak 7,94%, tahun 2022 9,32%, tahun 2023 sebanyak 12,67% dan 2024 3,33%.

Kontributor

Prasetyaningtyas Ekarini
Analisis Kebijakan Ahli Pertama

5

PROGRAM STRATEGIS PENANGANAN COVID DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

**TOPIK SPESIAL: PENGEMBANGAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(KEK) DI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS (KPBPB)
BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN**





Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang direncanakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun hingga saat ini dinilai telah menunjukkan hasil yang baik. PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2021 mencapai angka 7,07% yoy bahkan melebihi PDB pada triwulan II tahun 2019. Selanjutnya pada triwulan III tahun 2021 pertumbuhan mengalami perlambatan namun tetap pada arah yang positif pada angka 3,51% yoy. Pemulihan ekonomi 2021 sempat tertahan akibat adanya varian delta COVID-19 yang tingkat penularan dan risiko fatalitasnya tinggi. Namun jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, upaya Indonesia dalam mengendalikan kasus aktif COVID-19 dan kematian akibat COVID-19 relatif lebih cepat dan terkendali. Aktivitas konsumsi dan produksi kembali meningkat dan meneruskan tren pemulihan ekonomi yang semakin baik.

Seiring dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19, Pemerintah menilai bahwa dibutuhkan anggaran tambahan untuk kebutuhan pengadaan vaksin dan vaksinasi, penanganan kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan daya beli serta mendorong kinerja dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah meningkatkan pagu anggaran dari Rp695,2 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp699,43 triliun pada triwulan I tahun 2021.

Pada pertengahan tahun 2021, terjadi peningkatan kasus *Delta Variant* COVID-19 dan Pemerintah melaksanakan PPKM Darurat dan *Leveling* PPKM guna menekan angka kasus. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan sebagai dukungan bagi dunia usaha, Pemerintah kembali merealokasi Anggaran PEN dengan meningkatkan pagu menjadi Rp 744,77 triliun. Hingga 5 November 2021, pagu yang telah direalisasikan sejumlah Rp 456,35 triliun (61,3%).

Gambar 5.1 Realisasi PEN (s.d. 5 November 2021)



Anggaran kluster Kesehatan digunakan untuk penanggungungan Rumah Sakit Darurat Asrama Haji dan Pademangan, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan 580,29 ribu pasien, insentif untuk tenaga 1,26 juta Kesehatan dan santunan kematian untuk 446 tenaga Kesehatan, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin dan bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

Perlindungan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dan kartu sembako untuk 17,3 juta KPM, Bantuan Subsidi Tunai (BST) untuk 9,99 juta KPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 5,62 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 5,91 juta orang, bantuan kuota internet untuk 60,46 juta penerima, bantuan UKT untuk 261,3 penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 6,65 juta pekerja, serta bantuan beras untuk 28,8 juta KPM dan sembako PPKM untuk 3,24 juta KPM.

Dukungan bagi UMKM dan Korporasi di program PEN berupa Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 12,71 juta usaha, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk 2,24 juta UMKM dan 36 korporasi, Penempatan Dana Bank dengan total penyaluran kredit Rp 442,19 triliun kepada 5,43 juta debitur, Subsidi Bunga KUR untuk 6,02 juta debitur dan non-KUR untuk 7,2 juta debitur, Penyertaan Modal Negara (PMN)



untuk BUMN (Hutama Karya, Pelindo III, dan Kawasan Industri Wijayakusuma) sebesar Rp8,39 triliun, serta penyaluran bantuan PKL kepada 554,1 ribu usaha.

PEN untuk Program prioritas diberikan kepada 1,23 juta tenaga kerja untuk Program padat Karya K/L. Selain itu juga diberikan dana Alokasi Khusus untuk pariwisata serta sertifikat *Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) dan akomodasi tenaga Kesehatan sebagai upaya peningkatan industri perhotelan. Alokasi juga diperuntukkan bagi ketahanan pangan berupa pembangunan bendungan dan *food estate*. Program lainnya berupa Fasilitas Pinjaman daerah sebesar Rp10 triliun melalui PT SMI.

Insentif Usaha yang diberikan melalui program PEN berupa PPh 21 ditanggung pemerintah untuk 81,890 pemberi kerja, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah untuk 124,209 UMKM, Pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.490 wajib pajak, pengurangan angsuran PPh 25 untuk 57.529 wajib pajak, pengembalian pendahuluan PPN untuk 2.419 wajib pajak, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh wajib pajak, PPN properti ditanggung pemerintah untuk 768 penjual, PPNBM mobil untuk 6 penjual dan Bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor sejumlah Rp2,28 triliun.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan optimalisasi program-program PEN agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dari 5 kluster PEN, kluster perlindungan sosial dan Kesehatan yang menjadi fokus program PEN mencatatkan peningkatan realisasi yang signifikan. Program perlindungan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem 2021.

Salah satu langkah optimalisasi yang dilakukan Pemerintah diantaranya dengan

memperluas cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021 dari memanfaatkan sisa pagu perlindungan sosial sebesar Rp1,7 triliun. Dengan persyaratan antara lain: (1) tidak ada perubahan kriteria penerima, (2) perubahan hanya terkait cakupan wilayah menjadi level nasional (514 kabupaten/Kota di 34 Provinsi), (3) total sasaran ditingkatkan 1,6 juta orang pekerja, (4) perluasan tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya (Prakerja, PKH, BPUM, BST, dll).

Selain itu akan dilakukan juga realokasi perlindungan sosial untuk program *Top-up* Kartu Sembako dan BLT Desa sebesar Rp300.000 untuk durasi 3 bulan s.d. Desember 2021 pada 35 Kabupaten Prioritas Program Pengentasan Kemiskinan ekstrem.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan program PEN di tahun 2022 dengan menganggarkan sebesar Rp321,2 triliun dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.939,3 triliun. Alokasi anggaran program untuk kluster kesehatan sebesar Rp77,05 triliun, perlindungan sosial Rp126,54 triliun, program prioritas Rp90,4 triliun dan dukungan UMKM Rp27,48 triliun.

Gambar 5.2 Rencana PEN 2022



Alokasi anggaran bagi penanganan kesehatan dialokasikan sebesar Rp 38,44 triliun untuk vaksin bagi 189 juta penduduk; Rp 4,5 triliun untuk *testing, tracing, treatment*; Rp 14,9 triliun untuk perawatan 250.000 pasien COVID-19 dengan cost



sharing BPJS; Rp1 triliun untuk 4 juta paket obat COVID-19; Rp 6,4 triliun untuk insentif tenaga kesehatan selama 12 bulan; dan sisanya Rp 6,5 triliun untuk cadangan penanganan kesehatan.

Program PEN untuk klaster perlindungan sosial dialokasikan untuk 10 juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebesar Rp 28,7 triliun; 18,8 juta penerima manfaat program Kartu Sembako sebesar Rp 45,1 triliun; Kartu Prakerja sebesar Rp 11 triliun; jaminan kehilangan pekerjaan sebesar Rp5,6 triliun; dan anggaran cadangan perlindungan sosial sebesar Rp 36,1 triliun.

Namun alokasi ini bersifat fleksibel dan responsif terhadap kondisi COVID-19 di Indonesia. Strategi penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dilakukan melalui kolaborasi setiap unsur. Termasuk juga Kemenko Perekonomian yang turut mendukung upaya penguatan tersebut melalui berbagai Program Strategis Kementerian.

1. Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra disertai Dukungan Penjaminan dalam rangka Pemulihan Ekonomi

Untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Pemerintah menempatkan Dana di Bank Umum Mitra. Harapannya, Dana tersebut dapat disalurkan dan mengembangkan ekosistem UMKM dan koperasi serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp10 triliun di BTN dan menempatkan dana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) namun tidak lagi melakukan penempatan di BNI, BRI dan Bank Mandiri. Hal ini dikarenakan ketiga bank tersebut tidak mengajukan permohonan penempatan kembali. Akan tetapi pemerintah

memastikan bahwa subsidi bunga dan penjaminan kredit modal usaha tetap diberikan sebagai dukungan kepada dunia usaha.

Sampai dengan 30 Juli 2021, Pemerintah masih menempatkan dana dengan total Rp 29,05 triliun di 23 bank umum mitra. Dari Rp 66,99 triliun, masih tersisa Rp 37,94 triliun yang dapat ditempatkan di perbankan dalam rangka meningkatkan kredit. Dari Dana yang ditempatkan, sampai dengan Oktober 2021 telah dilakukan penyaluran kredit Rp 442,19 triliun kepada 5,43 juta debitur. Melalui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa telah terjadi pertumbuhan kredit, terutama pada segmen UMKM baik secara *mom* maupun *yoy*.

2. Pinjaman PEN Daerah

Pemerintah melanjutkan pemberian pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Alokasi PEN Daerah di tahun 2021 sebesar Rp15 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp10 triliun dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 5 triliun.

Hingga Agustus 2021, PT SMI telah menandatangani 43 perjanjian pinjaman PEN Daerah dengan komitmen pembiayaan Rp 24,5 triliun. Dengan demikian total komitmen pembiayaan PT SMI saat ini mencapai Rp 122,6 triliun.

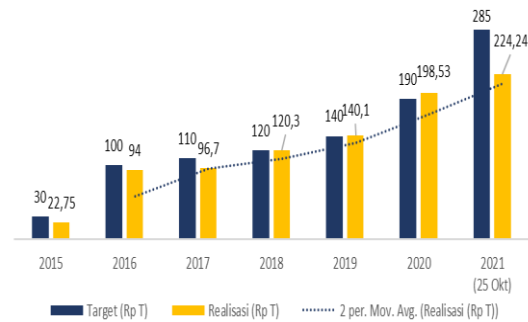
3. Stimulus UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pemerintah meningkatkan target KUR tahun 2021 dari semula Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun. Setelah penetapan perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi penyaluran KUR terus



meningkat. Pada periode bulan Januari s.d. 25 Oktober 2021, realisasi KUR mencapai Rp 224,24 triliun (72,29%) dari target tahun 2021 sebesar Rp253 triliun.

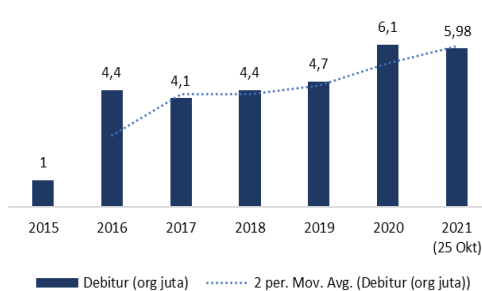
Grafik 5.1 Target dan Realisasi KUR (s.d. 25 Oktober 2021)



Terhitung sejak Agustus 2015 s.d. 25 Oktober 2021, KUR telah diberikan kepada 30,7 juta debitur dengan *outstanding* Rp355,08 triliun dan NPL 1,02%.

Penyaluran KUR selama tahun 2021 berdasarkan jenis yaitu KUR Super Mikro sebesar Rp8,88 triliun (3,96%), KUR Mikro sebesar Rp141 triliun (62,90%), KUR Kecil sebesar Rp74 triliun (33,12%), dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp27 miliar (0,01%).

Grafik 5.2 Debitur KUR (s.d. 25 Oktober 2021)



Penyaluran KUR Syariah mulai dari Januari 2021 s.d. 25 Oktober 2021 terealisasi sebesar Rp6,29 triliun yang disalurkan kepada 74.068 debitur.

Permintaan KUR terus meningkat per tahun sejak tahun 2017 sampai 2020 yang tercermin dari peningkatan jumlah debitur

KUR yaitu mengalami peningkatan rata-rata 0,3 juta debitur.

4. Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 9 tahun 2021 diberlakukan mulai diberlakukan sejak 26 Oktober 2021. Melalui beleid ini, Pemerintah memberikan perpanjangan insentif pajak hingga akhir Desember 2021 dengan perluasan jumlah KLU.

- (1) Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu sehingga dapat memperoleh insentif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Ditanggung Pemerintah, kecuali bagi karyawan perusahaan di Kawasan Berikat dan karyawan perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
- (2) Insentif PPh Final tarif 0,5% bagi UMKM Ditanggung Pemerintah.
- (3) Insentif PPh Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah diberikan bagi Wajib Pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
- (4) Insentif PPh Pasal 22 Impor bagi wajib pajak pada 397 bidang usaha tertentu, kecuali wajib pajak di Kawasan Berikat dan KITE.
- (5) Insentif angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang bergerak di 481 bidang usaha tertentu, kecuali Wajib Pajak di Kawasan Berikat dan KITE.
- (6) Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa restitusi dipercepat maksimal Rp5 miliar bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah pada 229 bidang usaha, kecuali Wajib Pajak di Kawasan Berikat dan KITE.

Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak



dan unit hunian rumah susun pada periode Maret-Agustus 2021 juga diperpanjang hingga 31 Desember 2021 yang tertuang dalam PMK 103/PMK.010/2021.

Melalui PMK 120/PMK.010/2021, Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah 100% yang semula diberikan pada periode Maret-Agustus 2021 diperpanjang hingga 31 Desember 2021.

Dukungan Pemerintah untuk usaha ritel juga diberikan dengan memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Insentif tersebut diatur dalam PMK 102/PMK.010/2021 dan diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak lainnya melalui PMK 83/PMK.03/2021 yang merupakan perubahan atas PMK 239/PMK.03/2020. Dalam beleid tersebut diatur pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.

5. Stabilisasi Harga Pangan

Bahan makanan mengalami inflasi sebesar 0,03% pada Oktober 2021, sedangkan periode Januari s.d. Oktober 2021 mengalami deflasi sebesar 0,06%. Apabila dibandingkan tahun 2020, inflasi bahan makanan sebesar 3,16% (yoy).

Dengan terus melakukan koordinasi pasokan dan harga pangan serta melakukan upaya pengendalian harga pangan di luar musim panen, Kemenko Bidang Perekonomian memperkirakan bahwa inflasi bahan makanan dapat terjaga sepanjang tahun

2021 sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu berada pada kisaran angka $4\pm 1\%$.

Stabilitas harga pangan harus terjaga dengan terus melakukan peningkatan koordinasi stabilitas pasokan bahan pangan terlebih dalam memitigasi kelangkaan pangan di daerah defisit. Selain itu juga akan dilakukan upaya pengendalian gejolak harga pangan di musim paceklik.

6. Pengembangan Kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor

Kawasan sentra produksi komoditas hortikultura unggulan daerah berorientasi ekspor saat ini telah dikembangkan di 7 (tujuh) lokasi, yaitu: Kabupaten Tanggamus-Lampung, Kabupaten Jembrana-Bali, Kabupaten Blitar-Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo-Jawa Timur, Kabupaten Bener Meriah-Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kabupaten Garut-Jawa Barat.

Sejak dimulai pada tahun 2017 sampai dengan Agustus 2021, Kawasan hortikultura komoditas pisang di Kabupaten Tanggamus telah bermitra dengan 862 petani dengan total luasan 432,49 ha. Pada September 2021 telah dilakukan ekspor perdana pisang mas ke Singapura melalui Pelabuhan Panjang-Lampung sebanyak 2.484 kg dan selanjutnya akan dilakukan ekspor secara rutin dengan minimal volume 2,5ton /minggu.

MoU Pengembangan Hortikultura Berorientasi ekspor di Kabupaten Bondowoso telah ditandatangani pada awal tahun 2021 dan saat ini sedang dilakukan persiapan lahan dan bibit pisang *Cavendish*. Sedangkan di Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan tanam perdana Pisang *Cavendish*. Menyusul pada tahun 2022 akan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.



7. Kemitraan Closed Loop Hortikultura

Kemitraan *Closed-loop* telah berhasil dikembangkan di 2 kab di Jawa Barat yaitu Kab Garut dan Kab. Sukabumi. Komoditas yang ditanam adalah cabai rawit merah dan cabai merah besar dengan tumpang sari tanaman lain seperti sawi putih, tomat, buncis dan kubis. Hingga September 2021, sudah teridentifikasi 20 petani milenial, 17 *stakeholder* terkait serta 3 *offtaker* (Paskomnas, Indofood dan Eden farm) sebagai penjamin kepastian pasar dan harga. Sejalan dengan arahan Presiden, Kemenko Bidang Perekonomian beserta para *stakeholders* terkait akan mengembangkan pelaksanaan Program *Closed Loop* dan mereplikasi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilakukan pada akhir tahun 2021.

Lahan pengembangan *closed loop* hortikultura telah meningkat dari semula hanya 1,3 ha menjadi 12 ha, diikuti dengan peningkatan hasil produksi. Percepatan replikasi program kemitraan *closed loop* selain dilakukan di wilayah lain juga dilakukan untuk komoditas lain selain hortikultura diantaranya tanaman kelapa genjah di Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah juga memberikan dukungan melalui percepatan pembiayaan KUR, percepatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, percepatan pembangunan kemitraan dari hulu sampai hilir di sentra-sentra hortikultura, serta penerapan *smart farming* sebagai upaya menciptakan ekosistem digital untuk meningkatkan produktivitas hortikultura.

8. Pengembangan Usaha Peternakan Terintegrasi

Sepanjang tahun 2021, ditargetkan dapat berkembang 5 lokasi/Kawasan peternakan

terintegrasi. Saat ini telah dikembangkan Kawasan *Integrated Agro Tech Center* (IATC) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kawasan ini memadukan peternakan sapi dengan sektor pariwisata. Kawasan IATC lainnya berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang berbasis sapi perah. Di Kabupaten Brebes telah dikembangkan Kawasan *Integrated Agro Forestry Center* (IAFC). Dan di Kabupaten Lampung Tengah telah dikembangkan kemitraan sapi perah dan hortikultura. Kawasan sapi potong dan perikanan tangkap (hulu-hilir) seluas 450 Ha di Merauke, Papua sedang diusulkan untuk menjadi KEK berbasis komoditas.

9. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas terutama di perkebunan sawit rakyat dan menjaga luasan lahannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan cara intensifikasi.

Target PSR tahun 2021 seluas 180.000 ha berpotensi menyerap tenaga kerja petani swadaya sejumlah 2,6 juta orang dan pekerja non pekebun sejumlah 4,3 juta orang. Untuk mencapai target ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memberikan dukungan pembiayaan sebesar Rp30 juta/ha dengan maksimal lahan seluas 4ha/pekebun.

Target PSR 2020-2022 sebesar 540.000 hektar meliputi wilayah Sumatera 397.200 ha, Jawa 6.000 ha, Kalimantan 86.300 ha, Sulawesi 44.500 ha dan Papua 600 ha. Adapun realisasi rekomendasi teknis s.d. November 2021 sebesar 243.278 Ha. Pemerintah terus melakukan upaya percepatan dalam rangka mencapai target tersebut.

Upaya pemerintah dalam akselerasi peremajaan sawit rakyat antara lain dengan



mengakomodasi isu-isu strategis seperti legalitas lahan, simplifikasi pengajuan proposal PSR serta bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam mencapai target Program PSR.

Dalam rangka mengintegrasikan tata kelola perkebunan sawit, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sebagai salah satu turunan UU Cipta Kerja serta sedang melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

10. Pengembangan Industri Rumput Laut

Pengembangan industri rumput laut dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri, khususnya akselerasi hilirisasi produk rumput laut sehingga akan meningkatkan nilai tambah produk rumput laut untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha rumput laut dari hulu sampai hilir melalui penciptaan lapangan kerja, menjamin ketersediaan dan kualitas bahan baku industri serta meningkatkan penguasaan pasar ekspor produk rumput laut nasional.

Sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan industri rumput laut nasional telah diterbitkan Perpres No 33 tahun 2019 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat amanah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan peta panduan dimaksud.

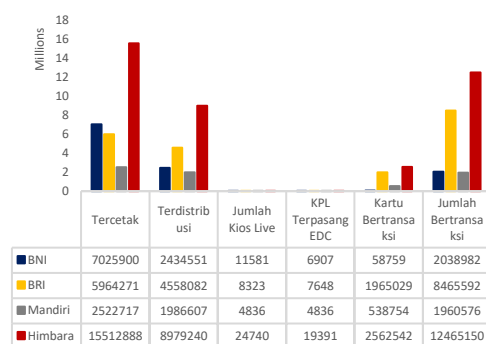
Tabel 5.1 Capaian Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional s.d. Oktober 2021

No	Keterangan	Satuan	Capaian
1	Produksi Rumput Laut	Ton	9.923.259
2	Industri Pengolahan Rumput Laut	Unit	52
3	Produksi Produk Olahan Rumput Laut	Ton	31.730
4	Volume Ekspor	Ton	28.352
5	Nilai Ekspor	US\$	86.750.000
6	Penguasaan Pasar (Nilai Ekspor)		Ekspor rumput laut terbesar kedua di dunia

11. Kartu Tani Untuk Pupuk Bersubsidi

Kartu Tani merupakan alat tebus pupuk bersubsidi secara digital yang akan mentransformasi pola pembayaran subsidi pupuk berdasarkan hasil verifikasi manual menjadi digital berdasarkan Dashboard Bank. Kartu Tani diinisiasi oleh Pemerintah sekaligus juga sebagai tindak lanjut dari rekomendasi KPK dan BPK agar pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran, yaitu diberikan kepada petani yang berhak menerima.

Grafik 5.3 Capaian Implementasi Kartu Tani (s.d. 31 Oktober 2021)



Berdasarkan data terakhir tanggal 31 Oktober 2021, jumlah Kartu Tani yang tercetak untuk petani di seluruh Indonesia sebanyak, 15,5 juta kartu, yang telah terdistribusi sebanyak 8,98 juta kartu (58%), sedangkan kartu yang dipakai transaksi



sebanyak 2,56 juta kartu (16,5%). Namun demikian, yang cukup menggembirakan adalah transaksi penebusan telah dilakukan oleh sebanyak 12,5 juta transaksi. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan penggunaan kartu tani dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6%.

Kartu Tani sebagai tools, tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, terhambatnya distribusi kartu, kartu error, kartu hilang, lupa PIN, tidak daftar ulang dalam penyusunan eRDKK setiap tahun, kuota kosong, mesin EDC rusak hingga kesulitan signal dalam penggunaan mesin EDC.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan kartu tani tersebut, Pemerintah melalui Pokja Kebijakan Pupuk Bersubsidi telah banyak melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dan implementasi Kartu Tani sebagai alat untuk menebus pupuk bersubsidi.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 520/1618/SJ tanggal 1 Maret 2021 tentang Peningkatan Pengelolaan Pangan dan Pembangunan Pertanian, serta didukung Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 520/4901/Bangda tanggal 1 November 2021 tentang Percepatan Implementasi Kartu Tani dalam Penebusan Pupuk Bersubsidi kepada seluruh Kepala Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk peningkatan penggunaan kartu tani sekaligus sebagai upaya menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Himbara, PIHC berinisiatif melaksanakan Sosialisasi Gerakan Tebus Pupuk Bersubsidi melalui Kartu Tani, serta menetapkan 15

lokasi *pilot project* (15 kabupaten/kota) agar percepatan implementasi kartu tani bisa mencapai 100% pada akhir Tahun 2021 ini.

12. Penyediaan Vaksin COVID-19

Upaya Pada Juli 2021, target sasaran untuk vaksinasi di Indonesia bertambah menjadi 208.265.720, dengan menambahkan kelompok umur di atas 12 tahun sebanyak 26,7 juta orang. Hal ini diiringi dengan penambahan kebutuhan dosis vaksin juta penduduk untuk mencapai herd protection. Pemenuhan ini dilakukan melalui pengadaan dari luar negeri dengan total suplai sebanyak 412,875,960 dosis sampai akhir tahun 2021.

Vaksin produksi dalam negeri melalui Pengembangan Vaksin Merah Putih, Vaksin BUMN dan Vaksin produksi dalam negeri lainnya diupayakan untuk dapat digunakan mulai tahun 2022.

Gambar 5.3 Data Vaksin COVID-19



Sumber: Kementerian Kesehatan, November 2021

Ketersediaan vaksin di dalam negeri diperoleh melalui kerja sama BUMN dengan perusahaan penyedia vaksin dari luar negeri. Dengan kedatangan ke-104, 4 juta vaksin Sinovac pada 28 Oktober 2021, maka saat ini sudah mencapai 305.735.960 dosis vaksin yang tiba masuk ke Indonesia, baik vaksin jadi maupun bahan baku (*bulk*).



Sampai dengan akhir tahun, diperkirakan vaksin yang masuk ke Indonesia sejumlah 428-448 juta dosis, yang kemudian akan diberikan kepada 208 juta orang yang menerima dosis lengkap. Tahun 2022, Pemerintah berencana memberikan vaksin dosis ketiga sebagai *booster*. Vaksin ini akan diberikan kepada masyarakat berisiko tinggi diantaranya tenaga kesehatan dan warga lanjut usia, serta kepada warga yang mengalami defisiensi imunitas, seperti pengidap HIV dan kanker. Jenis vaksin yang akan digunakan sebagai *booster* masih dalam tahap pengkajian.

Selain itu, Pemerintah juga berencana memberikan vaksin kepada anak usia 3-11 tahun. Saat ini sedang dilakukan uji klinis vaksin yang akan digunakan, yaitu: *Sinovac*, *Sinopharm* dan *Pfizer*. Pada akhir tahun diharapkan telah dikeluarkan *Emergency Use of Authorization (EUA)* sehingga vaksinasi dapat dilakukan di awal tahun 2022.

13. Pengembangan Katalis Merah Putih untuk produksi Bahan Bakar Hijau

Katalis Merah Putih telah berhasil diaplikasikan pada *pilot project Green Refinery* di kilang Pertamina. *Green Refinery* di RU III Plaju (Co-processing). Rencana Stand-Alone di Plaju akan berkapasitas 20.000 barel/hari. Dengan target pelaksanaan pekerjaan oleh PT Rekind akan dimulai pada akhir Juni 2021.

Green Refinery di Cilacap unit TDHT (*Revamping*). Untuk fase 1, kapasitas 3000 barel/hari RBDPO, direncanakan akan dilakukan start up unit tersebut di Desember 2021. Pada fase-1 ini unit TDHT *existing* dilakukan *minor revamp* dan tanpa POT, dengan batasan FFA dalam *feedstock* < 0,1%. Produk HVO/D-100 fase-1 direncanakan untuk penjangkauan pasar ekspor. Sementara untuk pengembangan fase 2 dengan

kapasitas CPO 6000 barel/hari, masih menunggu perkembangan hasil penjangkauan pasar ekspor fase 1 dan ketersediaan *feedstock* UCO, dimana target EPC pada Triwulan III tahun 2024. Pada 8 s.d. 6 Oktober 2021 telah dilakukan serangkaian uji teknis dan uji terbang *Bioavtur J2.4* menggunakan pesawat CV235. *Bioavtur* dihasilkan dari unit TDHT RU IV Cilacap. Pertamina telah melakukan uji coba produksi D-100/HVO di unit TDHT RU IV Cilacap menggunakan katalis Pertamina-ITB dengan umpan RBDPO. Pre assessment proses sertifikasi ICC sedang dilakukan dan ditargetkan selesai Desember 2021. Apabila telah memiliki ICC, direncanakan akan dilakukan produksi HVO secara komersial.

Green Refinery di RU II Dumai kapasitas 1000 barel/hari dengan cara memodifikasi Unit DHTD dan peningkatan kapasitas. Perbaikan infrastruktur jalur gas sudah dibesarkan yang diharapkan dapat mengakomodasi produksi s.d. kapasitas 2000 barel/hari. Seraya menunggu penggantian Katalis Unit DHTD pada November 2021 direncanakan akan dilakukan kembali uji coba *green fuel*.

Pilot Project Pengembangan Teknologi Produksi Minyak Nabati Industri (Industrial Vegetable Oil/IVO) dan Bensin Sawit (*Bensa*) dengan Katalis Merah Putih yang terintegrasi dengan Kebun Sawit di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan satu diantara Proyek Strategis Nasional. *Demo plant* pengolahan IVO di Musi Banyu Asin telah berhasil memproduksi IVO sebesar 700 ton dengan kapasitas 5-6 ton/jam telah selesai dilakukan. Sebagian produk IVO ini dimanfaatkan Tim ITB sebagai bahan baku riset bensin sawit (*Bensa*) di PT. Pura Kudus dan riset-riset lanjutan. Sedangkan rencana pembangunan pabrik IVO di Kawasan *Techno Park* Kabupaten Pelalawan saat ini masih dalam tahap pengkajian.



14. Restrukturisasi BUMN

Infrastruktur memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah berupaya memulihkan keuangan PT Waskita Karya dengan merestrukturisasi hutangnya sebesar Rp 21,9 triliun dari total Rp29 triliun (75%). Restrukturisasi ini melibatkan 7 Bank meliputi PT BNI sebagai *leading bank*, Bank Mandiri, BRI, BTPN, BSI, BPD Jabar dan Bank DKI.

Pelaksanaan *holding* BUMN sektor utilitas dan industri manufaktur melalui (1) Penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2021 tentang penambahan PMN ke dalam modal saham PT PLN yang berasal dari inbreng saham PT EMI; (2) Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1991 dalam rangka pembentukan *holding* BUMN Industri Pertahanan (PT LEN Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana); (3) Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2012 untuk perpanjangan pengembalian saham negara pada PT Nindya Karya.

Untuk sektor transportasi, telah dibentuk penggabungan BUMN Pelabuhan (PT Pelindo I, II, III, dan IV) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2021 tentang penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata, Pemerintah juga telah membentuk *holding* jasa pariwisata dan pendukung (PT PHI, PT Sarinah, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, PT Angkasa Pura I, dan PT

Angkasa Pura II) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviastri Pariwisata Indonesia.

Saat ini Pemerintah juga sedang memproses pembentukan *holding* Danareksa-PPA. *Holding* tersebut bertujuan untuk melakukan restrukturisasi BUMN yang bermasalah secara finansial (melalui titip kelola pada PT PPA) dan BUMN yang perannya perlu di *scale-up*. Pembentukan *holding* Danareksa-PPA akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dimana tahap pertama akan dilakukan inbreng 10 Perusahaan ke PT Danareksa yang ditargetkan selesai pada tahun ini.

Restrukturisasi BUMN akan terus dilanjutkan setidaknya sampai dengan triwulan II tahun 2022. Pada tahun 2023 BUMN akan diarahkan untuk bersaing dengan swasta dan melakukan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan sosial.

15. Percepatan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada BUMN

Program PEN tahun 2021 seluruhnya dialokasikan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298 tahun 2021, total PMN tahun ini berjumlah Rp52 triliun yang terdiri dari Rp35,1 triliun PMN utama dan Rp16,9 triliun PNM tambahan. PMN ini ditujukan untuk membantu penyelesaian penugasan BUMN dan restrukturisasi BUMN.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia memperoleh PMN sebanyak Rp20 triliun untuk mendukung penguatan industri asuransi Indonesia termasuk penyelesaian



polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi dan dialihkan kepada *IFG Life*. PMN akan diberikan kepada PT Waskita Karya sebesar paling banyak Rp7,9 triliun untuk restrukturisasi serta modal kerja dan investasi jalan tol.

PT Utama Karya sebesar Rp6,2 triliun dari PMN utama dan PMN tambahan Rp9 triliun untuk penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. PT Pelindo III mendapat PMN sebesar Rp1,2 triliun untuk menyelesaikan pekerjaan pengerukan dalam proyek Pelabuhan Benoa Bali, guna mendukung pengembangan Bali Maritim Tourism Hub (BMTH). Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang bertugas membangun infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan *ASEAN Summit 2023* di Labuan Bajo mendapat PMN sebesar Rp470 miliar. PT Kawasan Industri Wijayakusuma memperoleh dukungan sebesar Rp977 miliar untuk pembangunan Kawasan Industri Batang. PT PAL Indonesia memperoleh PMN senilai Rp1,26 triliun untuk penguasaan teknologi pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal selam. PT PLN memperoleh sebanyak Rp5 triliun untuk pembangunan transmisi, gardu induk dan distribusi listrik masuk desa. PT KAI sebesar Rp7 triliun untuk pelaksanaan proyek LRT dan pemenuhan *base equity* proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Pada tahun 2022, Pemerintah berencana memberikan PMN tunai sejumlah Rp42,9 triliun. Semua PMN ditujukan untuk penugasan BUMN yang diberikan kepada Perum Perumnas sebesar Rp1,57 triliun untuk melanjutkan program pengadaan satu juta rumah bagi MBR, PT PLN untuk pembangunan transmisi, gardu listrik, dan distribusi listrik desa sejumlah Rp5 triliun, PT Utama Karya sejumlah Rp23,85 triliun dan tambahan Rp7,5 triliun untuk

penyelesaian konstruksi ruas Tol Trans Sumatera dengan tambahan ruas sepanjang 162 km, PT Waskita Karya sebesar Rp3 triliun untuk penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, PT Adhi Karya senilai Rp1,98 triliun untuk pembangunan tol Solo-Yogya-Kulonprogo dan Yogyakarta-Bawean serta SPAM Regional Karian-Serpong.

16. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2019, pemberian *Super Tax Deduction* telah memasuki tahun kedua. Namun demikian, di tengah pandemi COVID-19 banyak pengusaha yang pendapatannya menurun bahkan merugi, dan banyak kegiatan pemagangan dan Prakerin tidak dapat dilaksanakan. Sehingga, selama dua tahun ini capaian sampai dengan bulan Oktober 2021, sebanyak 43 wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas insentif ini. Selama dua tahun ini terdapat 439 perjanjian kerja sama yang melibatkan 389 lembaga vokasi dan 43.466 siswa.

Untuk mempermudah akses informasi terkait *Super Tax Deduction*, Pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya antara lain dengan membuat buku saku *Super Tax Deduction* dan merilis situs web coachingclinicstd.kemenerin.go.id. Pemerintah juga secara berkala menyelenggarakan *coaching clinic* yang merupakan fasilitasi pendampingan bagi perusahaan yang berminat untuk mengajukan insentif pajak *Super Tax Deduction* tetapi masih mengalami kesulitan.

17. Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja menjadi pionir program *Government to Person (G2P)* yang

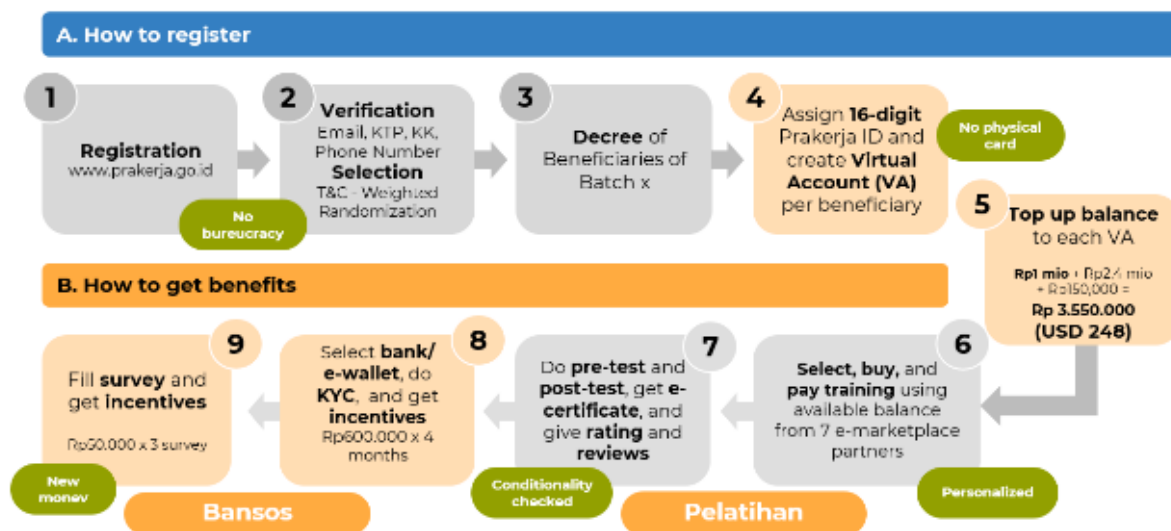


melibatkan *fintech* dan perbankan. Program yang didesain menjadi program semi bansos ini juga meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Metode delivery bantuan yang berbasis digital diakui sebagai program perlindungan sosial yang ideal selama pandemi COVID-19 karena dapat diakses dimana saja, kapan saja, (*end to end digital*) dan tanpa perantara.

Berdasarkan hasil laporan dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sampai dengan November 2021 telah dibuka pendaftaran penerima Program Kartu Prakerja sebanyak 11 gelombang (dari

gelombang 12 s.d 22). Dimana jumlah pendaftar kumulatif di situs resmi Prakerja mencapai lebih dari 78 juta orang dan orang, 5.932.867 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja, yang mendapatkan manfaat pelatihan kompetensi kerja dan kewirausahaan baik itu *skilling*, *reskilling* dan *upskilling*. Capaian program ini telah melampaui target capaian yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja pada awal tahun 2021. Penambahan jumlah penerima tersebut disebabkan karena kebijakan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran program sebesar Rp11,2 triliun pada semester II tahun 2021.

Gambar 5.4. User's Journey Program Kartu Prakerja



© Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO) 2021

Sumber: Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, 2021.

Tabel 5.2 Realisasi Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Melalui Program Kartu Prakerja

Batch	Pendaftar Join Batch	Pendaftar Eligible	Penerima SK	SK Dicabut
12	6.758.395	4.802.317	600.000	11.685
13	7.506.965	5.311.816	600.000	9.406
14	8.322.060	5.828.447	600.000	8.198
15	8.860.852	6.271.720	600.000	6.520
16	8.879.156	6.456.036	374.400	8.234
17	6.948.945	5.140.797	44.043	1.520
18	3.181.661	2.359.394	800.000	8.825
19	3.967.595	2.785.921	800.000	8.846
20	4.943.702	3.332.096	800.000	-
21	5.330.316	3.310.847	754.929	-

Sumber: PMO Prakerja, 2021

Sepanjang tahun 2021, program pelatihan Kartu Prakerja masih dilakukan secara *online* untuk membatasi mobilitas masyarakat dan kondisi pandemi belum memungkinkan adanya pelatihan tatap muka. Akan tetapi, pada tahun 2022 Pemerintah menargetkan program pelatihan *offline* juga sudah dapat mulai dilaksanakan.



18. Badan Usaha Penanaman Modal (BPUM)

Indonesia termasuk negara yang paling tertutup dalam hal penanaman modal asing jika dibandingkan dengan negara-negara lain dalam Kawasan. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagai upaya memberikan sentimen positif kepada dunia usaha dan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja melalui penyederhanaan persyaratan investasi dan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya dengan (1) mengurangi jumlah bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu; (2) menyusun daftar usaha yang menjadi prioritas Pemerintah; (3) memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkembang; (4) memberikan fasilitas pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi.

Sebagai pertimbangan terhadap kepentingan nasional, kemudian beleid ini mengalami beberapa penyesuaian melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Dari penyesuaian tersebut, jumlah Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu berkurang menjadi 37 Bidang Usaha, Bidang Usaha Tertutup menjadi 9 Bidang Usaha)

19. Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020, program Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim

investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut di pelabuhan hingga barang tiba di gudang (*hinterland*), yang berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi.

Ruang lingkup pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional terdiri dari 4 (empat) program:

- a. Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik;
- b. Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik, baik internasional maupun domestik;
- c. Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik; dan
- d. Penataan tata ruang kepelabuhan, serta jalur distribusi barang.

Beberapa layanan fitur NLE telah diimplementasikan secara “*advance*” di lima Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Batam. Selanjutnya penerapan NLE rencananya akan diperluas di Pelabuhan Makassar, Kendari, Balikpapan, Ambon, Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung secara bertahap.

Program Penataan Ekosistem Logistik Nasional tahun 2020-2024 terdiri dari 42 rencana aksi, 13 rencana aksi akan diselesaikan di tahun 2021 ini. Sampai dengan triwulan III, 24 rencana aksi (57,14%) yang telah diselesaikan.



Gambar 5.5 Penataan Ekosistem Logistik Nasional



Sumber: Kementerian Keuangan

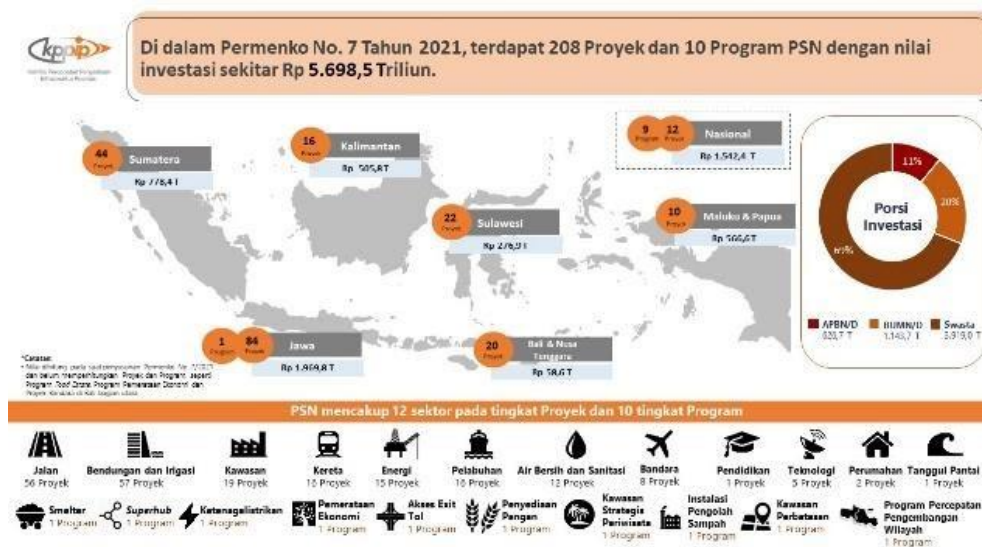
Program penataan Ekosistem Logistik Nasional tahun 2020-2024 terdiri dari 42 rencana aksi, 13 rencana aksi akan diselesaikan di tahun 2021 ini. Sampai dengan triwulan III, 24 rencana aksi (57,14%) yang telah diselesaikan.

20. Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Dalam masa pemulihan kondisi ekonomi akibat COVID-19, dilakukan reprioritisasi Proyek Strategis Nasional yang sedang

berjalan agar dana yang tersedia dapat optimal dan efektif. Kemenko Perekonomian melalui KPPIP memperkirakan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan selesai sampai dengan Desember 2021. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp 5.698,5 triliun. PSN tersebut mencakup 12 sektor pada tingkat Proyek dan 10 tingkat Program.

Gambar 5.6 Proyek Strategis Nasional



Sumber: KPPIP, 2021



Gambar 5.7 Penyelesaian PSN s.d. Oktober 2021



Sumber: KPPIP, 2021

Sampai dengan Oktober 2021, terdapat 122 proyek yang telah selesai, 26 proyek dan 7 program yang telah beroperasi sebagian, 94 proyek dalam tahap konstruksi, 10 proyek dalam tahap transaksi serta 48 proyek dan 3 program masih dalam tahap penyiapan.

Secara akumulasi saat ini telah diselesaikan 30 proyek dari total 208 proyek yang direncanakan. Sampai dengan Oktober 2021 sebanyak 112 PSN di berbagai sektor dengan nilai investasi Rp624,48 triliun telah berhasil diselesaikan dan beroperasi penuh. Pada Desember 2021 ditargetkan akan ada tambahan 10 PSN yang akan selesai.

21. Program Padat Karya Infrastruktur

Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi COVID-19, selain terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas, Pemerintah juga terus berupaya menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat salah satunya melalui Program Padat Karya Infrastruktur. Program Padat Karya Infrastruktur diselenggarakan dengan tujuan untuk pemberdayaan petani dan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja di pedesaan

maupun di perkotaan dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal (petani dan masyarakat) yang kehilangan penghasilan akibat dampak Pandemi COVID19, serta menggerakkan ekonomi daerah. Melalui program ini, pada tahun 2021 diharapkan akan terdapat sebanyak ± 1,6 juta orang tenaga kerja yang dapat terserap dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 35,77 Triliun. Hingga September 2021, terdapat sebanyak 1,33 juta orang tenaga kerja atau setara dengan 42,7 juta HOK yang telah dipekerjakan dengan nilai anggaran yang terealisasi sebesar Rp 21,56 Triliun (60,26%)

Program Padat Karya Infrastruktur Pertanian

Program padat karya infrastruktur pertanian dilaksanakan guna mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan olah tanam dan penanaman padi, penciptaan tenaga kerja di pedesaan serta menggerakkan ekonomi daerah, dan mempekerjakan para tenaga kerja (petani) yang kehilangan penghasilan akibat dari pandemi COVID-19.

Tahun 2021, diharapkan sebanyak 216.254 orang tenaga kerja dapat terserap dalam program padat karya ini dengan alokasi



anggaran sebesar Rp 2,02 Triliun. Hingga November 2021, sebanyak 176.833 orang (82%) tenaga kerja telah dipekerjakan. Dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1,51 Triliun (75%).

22. Travel Corridor Arrangement (TCA) Indonesia

Sejumlah negara telah memiliki kesepakatan *Travel Corridor Arrangement (TCA)* dengan Indonesia, diantaranya adalah Singapura, Tiongkok, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. Skema TCA adalah memfasilitasi kunjungan pebisnis esensial (pebisnis swasta, diplomat, ketenagakerjaan serta perjalanan dinas) yang melakukan berbagai proyek kerja sama investasi dan bisnis kedua negara agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Namun hal ini sempat tertunda seiring adanya kenaikan kasus COVID-19 dan pemberlakuan kembali pembatasan perjalanan di beberapa negara termasuk Indonesia.

Pada tanggal 14 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia membuka kembali perjalanan Internasional melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, salah satunya bagi pelaku perjalanan yang sesuai dengan skema perjanjian TCA. Namun pembukaan Bali ini tidak hanya bagi pelaku bisnis, melainkan utamanya bagi pelancong mancanegara.

23. Dukungan Penanganan COVID-19 dalam Forum ASEAN

Pada forum *The Forteth Meeting of The High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (the 40th HLTF-EI)*, pemulihan ekonomi di Kawasan menjadi fokus utama yang dibahas. Masing-masing negara melaporkan perkembangan ekonomi selama pandemi COVID-19. Indonesia mendorong komitmen AMS untuk mengendalikan pandemi secara konsisten, menerapkan

kebijakan ekonomi yang lebih responsif dan tepat sasaran, serta mendukung penciptaan lapangan kerja dan transformasi ekonomi. Indonesia menginisiasi *ASEAN Creative Economic Business Forum (ACEBF)* pada bulan November 2021 untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di ASEAN.

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, Indonesia juga mendukung dibentuknya *Lead Sectoral Bodies* untuk menangani isu *Fourth Industrial Revolution (4IR)* secara holistik di ASEAN, terutama pada industri farmasi, vaksin dan alat kesehatan.

Indonesia dan 9 negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati kerangka kerja pemulihan ekonomi, *ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF)*. Strategi pemulihan ACRF meliputi: peningkatan sistem Kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi sebagai upaya untuk menghadapi era baru pasca pandemi COVID-19 serta mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif.

24. Dukungan Penanganan COVID-19 dalam Forum G20

G20 Italia tahun 2021 memiliki 3 prioritas utama yang menjadi pilar pembahasan “*People, Planet, Prosperity*”. Presidensi Italia mengangkat agenda mengenai pemulihan dari pandemi hingga mengatasi perubahan iklim, dari mendukung inovasi hingga mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Dibawah Presidensi Italia, G20 telah mengadakan pertemuan Sherpa ke-1 dan juga *Health WG* pada bulan Januari 2021, dimana diskusi terkait upaya mengatasi Covid-19 melalui program vaksinasi yang luas



dan terjangkau menjadi fokus utama pertemuan. Selain itu, dari finance track G20 juga menyepakati perpanjangan waktu selama 6 bulan dari *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI) - program penundaan pembayaran utang bagi negara berpendapatan rendah dan miskin akibat dampak pandemi COVID-19 - menjadi berakhir bulan Desember 2021.

Pertemuan Sherpa G20 Italia ke-2 dilaksanakan pada 12-13 Juli 2021. Pada pertemuan ini membahas mengenai kerja sama dalam menghadapi pandemi saat ini. G20 memastikan akses vaksin COVID-19 yang adil dan terjangkau, mendukung fleksibilitas dari kesepakatan TRIPS (*Trade-related Intellectual Property Rights*), dan memberikan transfer teknologi serta pembangunan kapasitas produksi di negara berkembang. Agar dunia dapat segera bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, Co-Sherpa G20 Indonesia mengangkat pentingnya implementasi berbagai kesepakatan G20 dan peningkatan kerja sama sektor-sektor tertentu seperti di sektor kesehatan, pendidikan dan kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja terampil serta pentingnya pendidikan vokasi, termasuk *reskilling* dan *upskilling* untuk mereka yang terdampak pandemi.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi *Group of Twenty* (KTT G20) di Italia pada Oktober 2021, disampaikan bahwa berbagai negara memberikan dukungan Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022. Australia memberikan dukungan pada kebijakan sektor energi dan transisi energi di Indonesia; ketersediaan dan keterjangkauan teknologi; *Vaccinated Travel Line* (VTL).

25. Percepatan Negosiasi Indonesia – EU CEPA

Setelah negosiasi putaran ke-10 dilaksanakan pada 22 Februari-5 Maret 2021, perundingan

putaran ke-11 *Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement* (IEU-CEPA) telah dilakukan secara virtual pada minggu kedua dan ketiga November 2021. Perundingan putaran ke-11 ini kembali melanjutkan isu-isu runding di seluruh kelompok kerja (*Working Group*) yang tidak hanya mencakup perdagangan, tapi juga membahas terkait investasi, kerja sama peningkatan kapasitas, hak kekayaan intelektual, usaha kecil dan menengah, dsb. Tidak hanya terkait perdagangan, IEU-CEPA juga membahas terkait investasi, peningkatan kapasitas BUMN, hak kekayaan intelektual, dsb.

Pada putaran ini, Uni Eropa juga mengadakan sesi khusus untuk memberikan penjelasan atas usulan mereka terkait dengan penambahan cakupan isu runding, yaitu *Sustainable Food System* (SFS) yang merupakan turunan dari kebijakan/strategi *EU Green Deal*.

26. Peningkatan Kerja Sama Ekonomi RI-PEA

Pertemuan bilateral pada November 2021 dilakukan dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi termasuk industri pertahanan. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA) membahas 3 kerja sama prioritas, diantaranya terkait pembangunan ibukota baru, transisi energi dan perdagangan.

Kedua pimpinan negara sepakat agar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, *Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE CEPA) dapat diselesaikan secepatnya (dalam jangka waktu satu tahun atau kurang). Komitmen bisnis dan investasi yang disepakati dalam pertemuan bilateral tersebut sebesar US\$ 44,6 miliar dengan 19 perjanjian kerjasama.



Perundingan IUAE-CEPA sendiri telah dilaksanakan 2 (dua) putaran secara hybrid, dimana pada putaran kedua pada 28-30 Oktober 2021 telah berhasil disepakati secara substansi beberapa pasal/bab terkait sejak negosiasi diluncurkan di Jakarta pada bulan September 2021. Nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2020 mencapai US\$ 2.9 Milyar sementara dari Januari – September 2021 mencapai sekitar US\$ 2.8 Milyar, sementara di bidang investasi, realisasi investasi PEA di Indonesia mencapai US\$ 21,6 juta dengan 119 proyek kerjasama. Sementara pada Q2-2021 nilai investasi tersebut mencapai US\$ 2 juta dengan jumlah proyek kerjasama sebesar 57 proyek.

27. Penyelesaian Sengketa Dagang WTO DS477/478 (Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan)

Sengketa dagang DS 477/478 yang melibatkan Indonesia dengan Selandia Baru (SB) dan Amerika Serikat (AS) terkait importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewan hingga saat ini tetap berjalan positif dalam konteks penyelesaian sengketa secara bilateral. Pada tanggal 21 Juli 2021, Pemerintah Indonesia melalui tim Clearing House DS 477/478 telah melakukan pertemuan virtual dengan Kedutaan Besar AS membahas penyelesaian measure 18 terkait amandemen 4 (empat) Undang-undang (UU) melalui UU No 11/2021 tentang Cipta Kerja. Pertemuan serupa juga dilakukan dengan Kedutaan Besar SB pada tanggal 23 Juli 2021.

Pada pertemuan tersebut Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mematuhi seluruh putusan dan rekomendasi Panel DSB WTO (*full compliance*). Pada measure 18, Pemerintah Indonesia menyampaikan pasal-pasal dalam 4 UU tersebut yang telah diamandemen melalui UU Cipta Kerja sehingga sudah tidak bersifat

self-sufficiency. Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa penyesuaian tersebut telah mematuhi kepatuhan Panel DSB 477/478 dan ketentuan WTO. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan sudah tidak terdapat hambatan dalam penerbitan rekomendasi dan perizinan impor untuk Amerika Serikat dan Selandia Baru.

28. Penyelesaian Sengketa Dagang WTO DS 484 (Impor Daging Ayam dan Produk Ayam)

Penyelesaian sengketa dagang DS 484 yang melibatkan Indonesia dengan Brasil terkait importasi daging ayam dan produk ayam masih pada tahap banding melalui Appellate Body (AB). Penyelesaian sengketa dagang tersebut tertunda sehubungan dengan belum berfungsinya *Appellate Body* (AB).

Sehubungan dengan penundaan proses tersebut, Pemerintah perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi dampak (*worst scenario*) sekiranya importasi daging ayam Brasil ke Indonesia terjadi.

Terkait hal ini, Kemenko Perekonomian telah menginisiasi penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan informasi dalam menyusun rekomendasi kebijakan Pemerintah mengenai dampak-dampak yang mungkin terjadi dan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi yang diperlukan terkait importasi daging ayam asal Brasil dan peran industri perunggasan dalam negeri menghadapi dampak dan mitigasi tersebut.

Beberapa rekomendasi dari FGD tersebut secara garis besar antara lain sebagai berikut:

- a. Rekomendasi dalam rangka mengantisipasi masuknya daging ayam Brasil.
 - Produk daging ayam impor perlu memenuhi kriteria ASUH (Aman,



Sehat, Utuh, Halal), standardisasi budidaya dan sertifikasi Rumah Potong Ayam

- Penerapan instrumen WTO di dalam negeri antara lain bound tariff, SPS, persyaratan halal, anti dumping, CVD dan *safeguard*
- b. Rekomendasi perbaikan industri perunggasan dalam negeri
 - Pembenahan struktur pasar perunggasan nasional, restrukturisasi industri agar lebih efisien dan berkeadilan, stabilisasi harga, ketersediaan pakan dan antisipasi kelangkaan jagung
 - Adopsi teknologi close-house meskipun inisiasi pendirian kandang tertutup membutuhkan modal yang besar

29. Penyelesaian Review *Generalized System of Preferences (GSP)*

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 30 Oktober 2020, USTR telah menyampaikan

keputusan untuk mengakhiri *Country Practices Reviews (CPR)* terhadap fasilitas *Generalized System of Preference (GSP)* Indonesia karena Indonesia dianggap telah melakukan upaya positif dan produktif untuk memperkuat hubungan perdagangan kedua negara. (10 concern telah selesai). Pemerintah kedua negara menyepakati untuk melakukan monitoring atas efektivitas komitmen yang telah disepakati dalam penyelesaian review GSP melalui forum *Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA)* RI-AS ke-18 pada bulan Desember 2021.

Terkait perpanjangan program fasilitas GSP untuk Indonesia, dinamika pembahasan di Kongres masih terus berjalan. Perkembangan terakhir bahwa *US Chamber of Commerce* telah menyampaikan surat kepada kongres AS meminta agar dilakukan pembaruan fasilitas GSP sebelum Desember 2021.

PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB) BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional maka langkah yang diperlukan adalah peningkatan penanaman modal dengan salah satunya melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Melalui dasar tersebut, maka Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Keberadaan KEK diharapkan mampu memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah saat ini dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat disrupsi COVID-19 yang terjadi. Melalui kebijakan pengendalian COVID-19 dan percepatan vaksinasi saat ini diharapkan mampu memberikan sentimen positif para investor untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia khususnya pada Kawasan-kawasan ekonomi yang telah disediakan.

Dalam menjaga pengelolaan KEK agar tetap sejalan dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi, Pemerintah terus melakukan transformasi kebijakan pengembangan KEK yang tidak hanya menekankan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan nasional, namun juga mendorong terwujudnya KEK yang mampu

sejalan dengan reformasi struktural yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Melalui UU Cipta Kerja tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) peran yang diatur mengenai KEK yaitu penyederhanaan perizinan, peningkatan kewenangan Setdenas KEK, serta penguatan kelembagaan Administrator dan sistem pelayanan investasi. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan penyederhanaan prosedur pengusulan KEK tidak lagi berjenjang tanpa menghilangkan dukungan dari Pemerintah Daerah.

Selain pada aspek penyederhanaan perizinan, keberadaan UU Cipta Kerja juga menjadi salah satu payung hukum dalam pengaturan transformasi KPBPB menjadi KEK. Melalui amanat UU Cipta Kerja tersebut maka lahir PP No. 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam PP No. 40 tahun 2021 pasal 3 huruf (c) disebutkan bahwa lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK salah satunya adalah seluruh atau sebagian lokasi KPBPB. Selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan lebih lanjut bahwa KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai KPBPB sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Untuk penetapan KEK yang berada di wilayah KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun dilakukan berdasarkan usulan dari Dewan Kawasan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan PBPB Karimun kepada Dewan Nasional KEK.

Sejalan dengan implementasi UU Cipta Kerja dan PP No. 40 Tahun 2021, Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan 2 (dua) KEK yang berada di dalam Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun. Kedua KEK tersebut yaitu KEK *Batam Aero Technic* (BAT) yang ditetapkan melalui PP No. 67 Tahun 2021 dan KEK Nongsa yang ditetapkan melalui PP No. 68 Tahun 2021.

A. KEK Batam Aero Technic (BAT)

KEK Batam Aero Technic memiliki luas 30 ha yang terletak di wilayah kecamatan Nongsa, Pulau Batam. KEK ini terintegrasi dengan Kawasan Bandara Hang Nadim sebagai kawasan yang berada dalam KPBPB Batam. Kawasan ini berpotensi dalam pengembangan industri *Maintenance Repair and Overhaul (MRO)* pesawat udara dalam rangka menunjang industri transportasi udara baik untuk pesawat barang maupun pesawat penumpang. Pengembangan KEK *Batam Aero Technic* di kawasan bandara Hang Nadim sebagai pusat MRO ini memerlukan fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, ketenagakerjaan, pertanahan dan tata ruang, lalu lintas barang, keimigrasian, dan fasilitas lainnya. Fasilitas dan kemudahan lainnya dalam KPBPB belum memadai sehingga diperlukan fasilitas dan kemudahan yang diatur dalam KEK.

Dalam pengembangannya, KEK Batam Aero Technic didesain memiliki kegiatan pendukung yaitu di bidang logistik, pabrikasi, dan pelatihan mekanik bersertifikat. Kehadiran KEK ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perekonomian nasional antara lain

penghematan devisa 65-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional senilai Rp 26 Triliun/tahun yang selama ini mengalir ke luar negeri. Selanjutnya keberadaan KEK ini diperkirakan mampu menyerap jumlah tenaga kerja sebesar 9.976 orang hingga tahun 2030. Tidak hanya itu, dengan lokasi yang strategis pada pasar Asia Pasifik maka KEK ini diharapkan mampu menarik 12000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar US\$ 100 miliar pada tahun 2025, serta menghasilkan nilai investasi Rp. 7,29 Triliun hingga tahun 2030. Target investasi KEK *Batam Aero Technic* akan direalisasikan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung industri MRO, seperti hanggar *maintenance*, hanggar *painting*, hanggar *cleaning*, *component shop*, *apron*, *taxiway*, *component shop*, *workshop* untuk *tools & equipment*, dan sebagainya.

Gambar 5.8 Lokasi Usulan KEK BAT



B. KEK Nongsa

KEK Nongsa dikembangkan untuk kegiatan riset, ekonomi digital, pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif. Keunggulan geostrategis dari KEK Nongsa ini sebagai *IT hub digital bridge* Indonesia ke mancanegara. Selain itu KEK ini juga diharapkan mampu menarik investor di bidang IT, namun KEK ini diharapkan juga menarik wisatawan dengan adanya kegiatan pendukung berupa pariwisata seperti hunian sinematik, villa residential, cafe dan restoran, ferry terminal, serta area komersial dan hiburan. Saat ini di KEK Nongsa telah terbangun berbagai

akomodasi dan atraksi pariwisata bertaraf internasional serta sudah terbangun infrastruktur pendukungnya seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Terminal Bahari, Nongsa Village, dan Infinite Framework Studio.

Gambar 5.9 Lokasi Usulan KEK Nongsa



Keberadaan KEK Nongsa diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional diantaranya mampu menghemat devisa negara dalam bisnis digital sebesar Rp20-30 triliun per tahun dengan kontribusi paling besar berada pada sektor *data center* dan pendidikan internasional. Selanjutnya KEK Nongsa ini diharapkan mampu berperan sebagai *entry point* untuk perusahaan IT internasional yang berasal dari Singapura dan negara lainnya. Ke depannya KEK Nongsa ini dapat menjadi pusat pengembangan SDM bidang IT Indonesia yang selanjutnya dapat berkembang menjadi *technopreneur*.

Kontributor

Imam Wahyudi
(Analisis Kebijakan Ahli Pertama)

6

SINERGI MENJAGA PEMULIHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

**STRATEGI PENANGANAN
COVID-19 SEBAGAI KUNCI
PEMULIHAN EKONOMI DI
INDONESIA**

**SINERGI MENJAGA
PEMULIHAN EKONOMI
BERKELANJUTAN**

**PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL SEMESTER II**



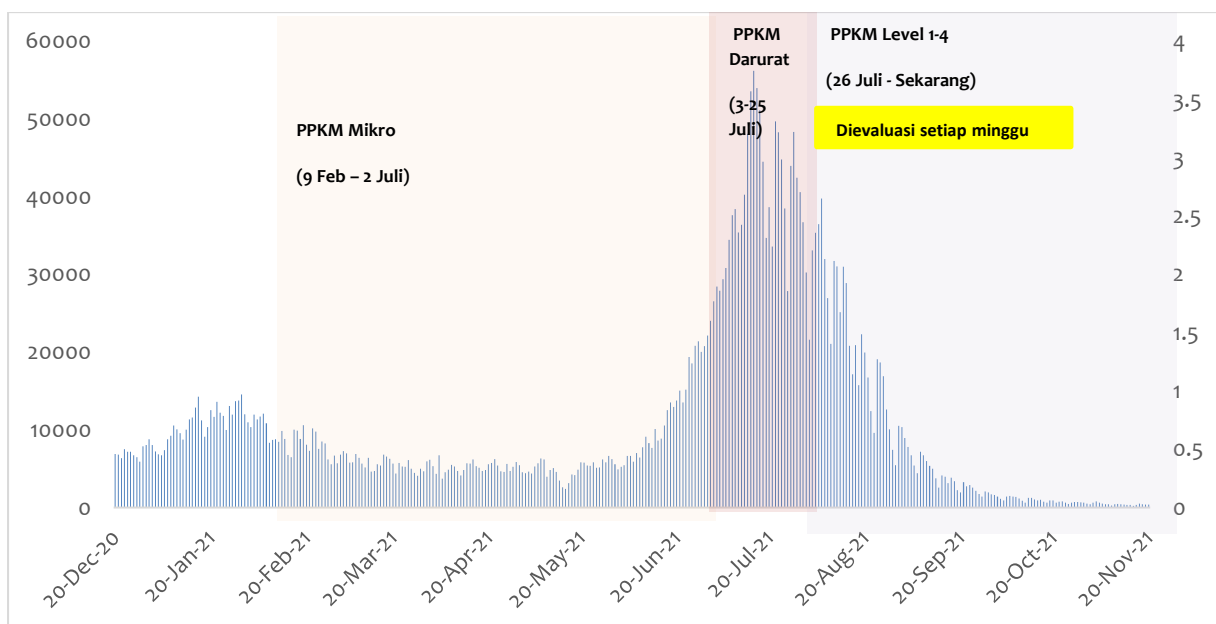
STRATEGI PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI KUNCI PEMULIHAN EKONOMI DI INDONESIA

Tahun 2021 Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menjaga keseimbangan antara prioritas penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dalam satu kemudi. Pemerintah mengeluarkan strategi penanganan COVID-19 dari hulu (pencegahan) dan hilir (penanganan). Strategi hulu merupakan upaya-upaya pencegahan dengan pembatasan mobilitas (PPKM), peningkatan *testing dan tracing*, pemantauan terhadap perubahan perilaku masyarakat (3M), percepatan vaksinasi COVID-19, pembentukan posko desa/kelurahan sebanyak 29 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia yang terus dipantau, serta membuat isolasi terpusat dengan lebih dari 20 ribu Tempat Tidur (TT) di Rusun, Hotel, asrama haji di seluruh Indonesia. Sedangkan strategi hilir merupakan upaya penanganan dengan penanganan pasien bergejala

sedang/besar segera dirujuk ke RS Rujukan Kabupaten/Kota/Provinsi dan pasien bergejala ringan dan Orang Tanpa Gejala (OTG) melakukan isolasi Mandiri dirujuk ke Fasilitas Isolasi Terpusat.

Strategi Penanganan COVID-19 dari hulu dan hilir mampu menurunkan jumlah kasus positif menjadi 623 kasus baru dibandingkan dengan gelombang kedua COVID-19 yang mencapai puncaknya pada 15 Juli 2021 sebesar 56.757 kasus baru. Penurunan yang cukup signifikan ini merupakan sinergi dari seluruh pihak terkait penanganan COVID-19 terutama kepatuhan protokol kesehatan dan upaya *tracking* kasus positif yang ketat. Penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia karena berhasil menurunkan rasio kasus positif lebih dari 50 persen dalam dua pekan berdasarkan pada Penilaian *John Hopkins University* pada September 2021. Kendati demikian, Pemerintah terus mewaspadaikan ancaman lonjakan kasus pada liburan akhir tahun Nataru dan risiko masuknya varian virus baru.

Gambar 6.1 Perkembangan Kasus COVID-19 dan Kebijakan PPKM



Sumber: DataCovid19, BLC (2021)

Pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan yang bertujuan untuk mengatur kegiatan sosial demi menurunkan jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19 di seluruh Indonesia. Adapun beberapa peraturan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 (ttt 14 Juni 2021) tentang Pemberlakuan **PPKM Berbasis Mikro**. Pada kebijakan ini pemerintah memberikan kebebasan penentuan zonasi yang akan dibatasi aktivitasnya sampai tingkat RT yang berpotensi menimbulkan kluster penularan bagi pemerintah daerah. Adapun zonasi yang diklasifikasikan menjadi 5 yaitu Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah. Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan masing-masing terhadap anggaran lembaga personil yang bertugas. Dalam peraturan ini juga mengatur mengenai jumlah pegawai yang bisa masuk kerja atau WFO sesuai dengan zonasinya.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 (ttt 2 Juli 2021) tentang **PPKM Darurat Wilayah Jawa Bali**. Pada kebijakan ini menjelaskan mengenai pemberlakuan Level 1,2,3 dan 4 di beberapa daerah Jawa dan Bali. Selain itu pemerintah juga mengatur kegiatan aktivitas pada kawasan esensial dan non esensial untuk menghindari kerumunan yang ada. Jumlah minimal testing juga diberlakukan di beberapa daerah untuk mengetahui tingkat penyebaran virus.
3. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid Nomor 14 Tahun 2021 (ttt 2 Juli 2021) tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi. Pada peraturan ini pemerintah mengatur perjalanan yang mewajibkan

beberapa persyaratan yaitu melalui Tes Swab PCR ataupun Tes Swab Antigen untuk beberapa moda transportasi yang memiliki masa aktif tertentu. Selain itu penumpang juga diwajibkan untuk mengisi E-HAC untuk memantau mobilitas masyarakat.

Untuk mempertahankan pandemi COVID-19 tetap pada level terkendali perlu dilakukan berbagai upaya melalui peningkatan *testing* dan *tracing*, pengendalian mobilitas yang terukur melalui PPKM level 1-4, perubahan perilaku masyarakat dengan disiplin protokol Kesehatan 3M, menggunakan sertifikat vaksin, tes COVID-19 (Antigen dan PCR) sebagai syarat melakukan aktivitas dan mobilitas, serta pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi sebagai upaya untuk memantau mobilitas masyarakat.

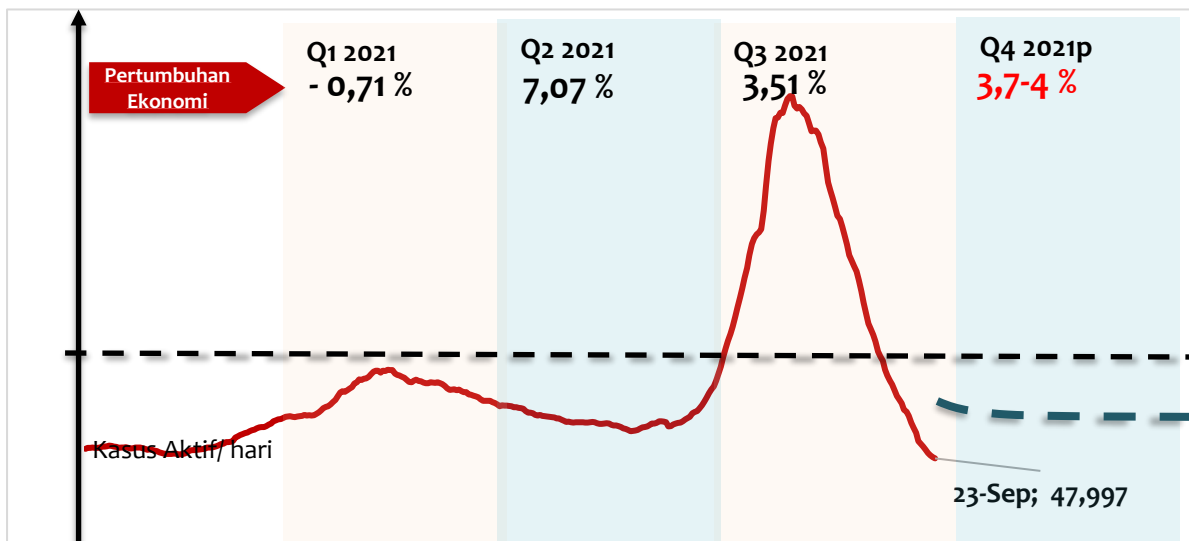
WHO pada tanggal 15 Juli 2021 menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak akan hilang dalam jangka pendek. Pernyataan WHO tersebut didukung oleh para imunolog dan virologi yang menyatakan bahwa pandemi dapat berubah menjadi endemi. Oleh karena itu Pemerintah perlu mempersiapkan strategi yang lebih efektif dan berkesinambungan melalui persiapan ekosistem dalam rangka penerapan pola hidup baru. Strategi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022-2025 melalui penerapan pola hidup baru "*living with endemic*". Pemerintah sedang menyiapkan *Road Map* transisi pandemi menjadi endemi dari berbagai aspek mulai dari Kesehatan, perlindungan sosial, aktivitas ekonomi, sosial, dan keagamaan dengan mensyaratkan anggota populasi yang memiliki kekebalan mencapai ambang tertentu

(*herd immunity threshold*). Kekebalan dapat dicapai melalui infeksi alami maupun vaksinasi.

Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pandemi dapat turun level kewaspadaan wabah menjadi endemi jika telah terjadi *herd immunity* dengan 70-100 persen populasi telah memiliki imunitas baik melalui vaksin COVID-19 lengkap ataupun memiliki riwayat pernah terinfeksi COVID-19. Kementerian Kesehatan mencatat hingga November 2021 123.433.856 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sementara 77.113.810 orang telah selesai menerima dua dosis suntikan vaksin, dan 1.153.030 tenaga kesehatan telah menerima tiga dosis suntikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Capaian vaksinasi baru menyentuh 59,27 persen dari sasaran vaksin pertama, vaksin suntikan

kedua pada angka 37,03 persen, dan sasaran suntikan ketiga (vaksin booster tenaga Kesehatan) pada angka 78,50 persen. Sejumlah strategi percepatan vaksinasi terus dilakukan dengan melibatkan peran TNI/POLRI.BKKBN, dan badan untuk meningkatkan kapasitas vaksinator, juga mengoptimalkan semua jalur vaksinasi dan menambah jam operasional, membuat prioritas zona merah/risiko tinggi, membuka kriteria usia 12-17 tahun bagi yang sebelumnya telah diterapkan minimal usia 18 tahun, serta adanya pelibatan aktif tokoh masyarakat untuk mengajak partisipasi masyarakat divaksin. Ketentuan umum mengenai KTP domisili juga dihapus untuk mempermudah akses masyarakat terhadap vaksinasi di RS Vertikal, Kemenkes, Poltekkes, dan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan).

Gambar 6.2 Tren kasus COVID-19 dan Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2021



Sumber: Datacovid19, BLC (2021)

Kebijakan Penanganan COVID-19 dengan menjaga keseimbangan antara prioritas penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara komprehensif dan masif melalui hulu dan

hilir diperkirakan mampu meningkatkan *confidence* masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Hal tersebut diharapkan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga yang disertai dengan upaya

Pemerintah bersama otorisasi moneter menjaga tingkat inflasi kebutuhan pokok masyarakat yang stabil. Karena konsumsi masyarakat tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi apabila

SINERGI MENJAGA PEMULIHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Dalam menghadapi Covid 19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga perekonomian Indonesia yang diyakini akan *rebound* pada tahun ini, Pemerintah telah menyiapkan “*game changer*” pertama melalui program vaksinasi untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan *herd immunity*, kedua Pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp699,43 Triliun atau naik 21 persen dari realisasi PEN tahun 2020, ketiga reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja yang diharapkan menjadi terobosan reformasi di bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pada tahun 2021 membuat Pemerintah mengambil Langkah untuk memitigasi dampak yang lebih buruk. Pada Juli 2021 Menteri Keuangan menaikkan anggaran PEN 2021 menjadi Rp 744,75 Triliun. Angka tersebut meningkat 6,4 persen dibandingkan pagu anggaran semula sebesar Rp 699,43 Triliun.

Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dilakukan Pemerintah mulai membuahkan hasil. Sejumlah strategi dan sinergi telah dilakukan pemerintah untuk menjaga Pemulihan Ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertahankan kestabilan pemulihan ekonomi. Sinergi dilakukan pada sisi kesehatan melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,7-4%.

serta program vaksinasi yang terus dijalankan. Sedangkan untuk mempertahankan tingkat pengendalian COVID-19 pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan diantaranya memberlakukan pelarangan mudik dan sejumlah pengaturan pembatasan mobilitas masyarakat yang diatur dalam Surat Edaran oleh Kementerian Agama, BNPB, dan Kementerian Perhubungan.

Pada sisi ekonomi, sinergi upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah berhasil menumbuhkan optimisme dengan menahan kontraksi ekonomi lebih dalam dengan mendorong konsumsi domestik melalui perlindungan sosial dan pemulihan daya beli masyarakat dan usaha.

Pemulihan ekonomi tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 disepakati sebesar 5,2 persen. Pemenuhan target tersebut tentunya akan sangat bergantung pada penanganan COVID-19, respons kebijakan ekonomi yang tepat dan penciptaan lapangan kerja yang signifikan yang mendorong transformasi ekonomi masa depan. Berdasarkan RKP Tahun 2022 Pemerintah akan mengarahkan kebijakan pemulihan ekonomi untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan/ *demand*. Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh. Disamping pemulihan ekonomi, peningkatan

daya saing juga terus dilakukan melalui reformasi struktural.

a. Pemulihan Daya Beli dan Usaha

Sejumlah strategi pemulihan ekonomi juga sudah dilaksanakan pemerintah melalui keberlanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021. Program Kesehatan dan perlindungan sosial masih menjadi fokus program PEN untuk menjaga kesehatan dan daya beli masyarakat. Sebagai bagian dari pemulihan daya beli masyarakat dikeluarkan Program Pengungkit Ekonomi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H melalui pemberian THR untuk ASN/TNI/POLRI dan karyawan swasta, penyaluran bantuan beras BULOG selama Ramadhan, percepatan perlindungan sosial, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dan #BagibagiKURMA (Kado Untuk keluaRga di ruMAh). Selain itu untuk mendukung pemulihan usaha dukungan PEN diarahkan untuk menjaga keberlangsungan sektor strategis.

Pemerintah pada tahun 2022 berupaya untuk menjaga pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha melalui:

1. Penuntasan krisis kesehatan
2. Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha
3. Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga
4. Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya
5. Program khusus.

b. Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara meningkatkan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian melalui hilirisasi produk pertanian pada sektor perkebunan dan perikanan karena sektor pertanian merupakan salah satu

sektor yang tidak terdampak saat pandemi COVID-19. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mendorong produksi pangan melalui kebijakan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing dilakukan dengan menerapkan pembangunan rendah karbon (*green recovery*) dengan meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca. Di samping itu juga dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

Menko Perekonomian menyatakan bahwa Pandemi COVID-19 merupakan momentum dalam mengakselerasi ekonomi melalui transformasi digital. Pemerintah akan terus mendukung ekosistem ekonomi digital melalui penyiapan infrastruktur, regulasi, SDM, dan penguatan UMKM.

c. Reformasi Struktural

Reformasi struktural tetap akan dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah saat ini sedang bersinergi untuk mendorong implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya untuk mempermudah investasi dengan memfokuskan investasi terhadap area prioritas, monitoring dan mendorong investasi berkelanjutan. UU Cipta kerja merupakan *game changer* yang akan fokus pada empat area, yaitu mendorong usaha sektor mikro, kecil dan menengah, menguatkan daya saing pasar tenaga kerja, penyederhanaan persyaratan investasi, serta peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) yang saat ini berada pada peringkat 73. Reformasi struktural akan tetap dilaksanakan pada tahun 2022.

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SEMESTER II

Realisasi PEN (November 2021)

Belanja penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam pelaksanaan program dianggarkan sebesar Rp 744,77 Triliun pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Belanja Penanganan COVID-19 dan PEN

No	Klaster	Pagu	Realisasi
1	Kesehatan	214,96	129,30
2	Perlindungan Sosial	186,64	139,04
3	Program Prioritas	117,94	117,94
4	Insentif Usaha	62,83	62,47
5	Dukungan UMKM dan Korporasi	162,40	78,73
Total		744,77	527,48

Anggaran PEN tahun 2021 tetap dijaga sebesar Rp 744,77 triliun dengan mempertimbangkan berbagai risiko perubahan sampai dengan akhir tahun. Biaya PEN dibagi menjadi dua berdasarkan pada *demand side* dan *supply side* tanpa memasukkan biaya Kesehatan. Untuk biaya *Demand Side* terdiri dari Perlindungan Sosial dengan total biaya Rp 186,64 Triliun. Sedangkan *Supply Side* terdiri dari Program Prioritas, Insentif usaha dan Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar 529,81 Triliun.

Program PEN masih menjadi penyokong pemulihan ekonomi sebagai bantalan di masa transisi. Kebijakan PEN tahun 2021 lebih fleksibel menyesuaikan dinamika pandemi yang dipenuhi ketidakpastian. Realisasi PEN hingga 5 November 2021 mencapai 527,48 Triliun atau 70,82 persen dari pagu Rp 744,77 Triliun. Progres realisasi paling signifikan terjadi pada kluster kesehatan mencapai Rp 129,30 Triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 139,04 Triliun. Program prioritas sebesar Rp 117,94 Triliun, dukungan UMKM dan Korporasi Rp 78,73 Triliun. Insentif usaha Rp 62,47 Triliun.

Gambar 6.3 Realisasi Program PEN

Dukungan UMKM dan Korp Rp 162,40T

1. Dukungan bunga UMKM KUR dan Non-KUR 42,17T
2. BPUM (Unit Usaha) 15,36T
3. Bantuan PKL 1,2T
4. IJP UMKM dan Korporasi 5,66T
5. Penjaminan Loss Limit 2T
6. Pembebasan Rekmin, Biaya Beban dan Abodemen PMN untuk 6 BUMN, LPEI dan SWF/LPI 63,66T
7. Penempatan Dana untuk restrukturisasi kredit perbankan 30,25T

Perlinsos Rp 186,64T

1. Program Keluarga Harapan (PKH) 28,31T
2. Bantuan Beras 3,58T
3. Kartu Sembako 48,89T
4. Bantuan Sosial Tunai (BST) 17,46T
5. Kartu Prakerja 21,20T
6. Diskon Listrik 9,49T
7. BLT Desa 28,80T
8. BSU 8,8T
9. Subsidi Kuota 7,79T
10. Bantuan UKT 0,75 T
11. Iuran JKP 1,55
12. Antisipasi Perlinsos lainnya 1,94T

Kesehatan Rp 214,96 T

1. Diagnostik (*Testing&Tracing*) 4,5T
2. Therapeutic 87,99 T
3. Vaksinasi 57,75 T
4. Penelitian Lab COVID-19 0,67 T
5. BNPB 1,99 T
6. Komunikasi 0,5T
7. Sarpras Lab COVID-19 1,6T
8. Penebalan PPKM 0,79T
9. Bantuan Iuran JKN PBP 2,43 T
10. Insentif Perpajakan Kesehatan 20,85T
11. Alokasi BOK untuk Tracing/APD 3,3T
12. Penanganan COVID lainnya di Daerah 32,61 T

Program Prioritas Rp 117,94T

1. Program Padat Karya K/L 37,37
2. Pariwisata 7,67T
3. Ketahanan Pangan 33,1T
4. ICT 16,66T
5. Kawasan Industri 10,54T
6. Dukungan Ekonomi Kreatif 2,28T
7. Fasilitas Pinjaman Daerah 10,00
8. Program Prioritas lainnya 0,31T

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022

Pemerintah masih melanjutkan Program PEN pada tahun 2022, dengan asumsi masih ada COVID-19 sehingga membutuhkan antisipasi dampak yang akan ditimbulkan. Pengendalian pandemi dan percepatan vaksinasi masih menjadi strategi utama untuk mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Pengendalian pandemi dan vaksinasi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (*consumer confidence*) yang berdampak pada konsumsi rumah tangga (55,7% dari PDB) dan investasi (29,86% dari PDB). Alokasi anggaran PEN tahun 2022 sebesar Rp 321,2 T pada tahun 2022. Pemerintah akan tetap merespons dampak pandemi COVID-19 dengan fleksibel, sehingga alokasi anggaran PEN pada tahun 2022 dapat menyesuaikan adanya penambahan apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19. Kebijakan PEN ke depan akan responsif dan fleksibel, sehingga apabila kasus COVID-19 melonjak dapat dilakukan realokasi belanja pemerintah pusat non-PEN ke PEN.

Alokasi sementara PEN tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2 Alokasi Sementara PEN Tahun 2022

No	Klaster	Pagu
1	Kesehatan	77,05 T
2	Program Prioritas	90,04 T
3	Perlindungan Masyarakat	126,54 T
4	Dukungan UMKM dan Korporasi	27,48 T
	Total	321,2 T

Program PEN tahun 2022 akan difokuskan Kembali pada klaster Kesehatan dan perlindungan masyarakat untuk menjaga rem dan gas pemulihan ekonomi melalui penanganan pandemi dan menjaga daya beli masyarakat. Alokasi PEN tahun 2022 (sementara) sebagai berikut :

Perlindungan Sosial Rp 126,54 T

1. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 jura keluarga penerima manfaat (KPM) 28,7 T
2. Kartu sembako untuk 18,8 juta KPM 45,1 T
3. Kartu Prakerja 11 T
4. Dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan 5,6T
5. Antisipasi perluasan program perlindungan sosial 36,1 T

Insentif Usaha Rp 62,83T

1. PPh 21 DTP 5,16T
2. PPh Final UMKM DTP 1,42T
3. PPnBM DTP Kendaraan Bermotor 3,46T
4. BM DTP 0,49T
5. PPN DTP Perumahan 3,31T
6. Pembebasan PPh 22 Impor 13,35T
7. Pengurangan Angsuran PPh 25 20,49T
8. Pengembalian Pendahuluan PPN 6,48T
9. Penurunan Tarif PPh Badan 6,53T
10. PPN tidak dipungut KITE 0,004T
11. PPh Final DTP P3TGAI 0,07T
12. PPN DTP Sewa Outlet 1,18T
13. Carry Over DTP 2020 0,88T

Dukungan UMKM dan Korporasi Rp27,48 T

1. Subsidi bunga UMKM
2. IJP UMKM dan Koporasi
3. Program Dukungan UMKM dan Korporasi lainnya

Program Prioritas Rp 90,04 T

1. Dukungan kegiatan pariwisata
2. Ketahanan Pangan
3. ICT
4. Program Prioritas lainnya

Kesehatan Rp 77,05 T

1. Testing, tracing dan treatment 4,5T
2. Perawatan pasien COVID-19 14,9 T
3. Paket obat Covid-19 (4 juta paket) 1 T
4. Insentif tenaga Kesehatan 6,4 T
5. Pengadaan vaksinasi 38,44 T
6. Antisipasi anggaran Kesehatan lainnya 6,5 T

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. [Seri 2010] PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah), 2021. Diakses melalui laman <https://bps.go.id/indicator/11/65/1/-seri-2010-pdb-seri-2010.html> pada 10 November 2021.
- Bank Indonesia. 2021. Survei Kegiatan Dunia Usaha Triwulan III-2021. Diakses melalui laman https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SKDU_Tw.III_2021.pdf#search=skdu pada 5 November 2021.
- CNN Indonesia. 2021. Kemenkes : Endemi Terjadi saat Vaksinasi COVID-19 Rampung 70-100 Persen. Jakarta. Diakses melalui laman : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021112010010-20-720029/kemenkes-endemi-terjadi-saat-vaksinasi-covid-rampung-70-100-persen> pada 12 November 2021.
- Dahlan, M. 2020. Shadow Economy, AEOI, dan Kepatuhan Pajak. Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Vol 2:1 Oktober 2020. Jakarta: DJP.
- Grahanusa Mediatama. 2021. Anggaran PEN Naik 6,4% menjadi Rp 744,75 triliun. [kontan.co.id](https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-pen-naik-64-menjadi-rp-74475-triliun). diakses melalui laman : <https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-pen-naik-64-menjadi-rp-74475-triliun> Kementerian 4 November 2021
- IHS Markit. 2021. PMI Manufaktur Indonesia™. Diakses melalui laman <https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/85636a049cb04cdc8a16e4f9a99eeda> pada 6 November 2021.
- Kuangan. 2021. Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2022. Jakarta
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. 2020. Kementerian Keuangan <https://infobanknews.com/topnews/begini-peluang-ekonomi-indonesia-2021/>
- OJK. Siaran Pers 57/DHMS/OJK/X/2021: OJK Siapkan Delapan Arah Kebijakan Strategis Tahun 2022. 16 Oktober 2021. Diakses melalui laman: <https://ojk.go.id> tanggal 4 November 2021.
- Siaran Pers Kementerian Perindustrian 1 Februari 2021. PMI Manufaktur Indonesia Naik Lagi, Lampau Vietnam dan Thailand. Kemenperin.go.id
- Siaran Pers Kementerian Keuangan 13 April 2021. Menkeu Hadiri Rangkaian 2021 IMF-WBG Spring Meetings, Serukan Pentingnya Pemulihan yang Menyeluruh dan Berkelanjutan. Kemenkeu.go.id
- The International Energy Agency. 2021. Oil Market Report - October 2021. Diakses melalui laman: <https://www.iea.org/> tanggal 9 November 2021.

Ikuti Kami:



@perekonomian RI



<https://ekon.go.id>

ISBN 978-623-94584-8-5



9 786239 458485